

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD KABUPATEN REMBANG

MASA PERSIDANGAN III

TANGGAL : 03, 04, 05 DAN 18 SEPTEMBER 2012



MEMBAHAS PERSETUJUAN PENETAPAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012

**SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194
Rembang 59212**

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD (I) KABUPATEN REMBANG

MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

Hari : SENIN

Tanggal : 03 September 2012

Waktu : Pkl. 09.30 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012;
3. Penutupan.

1. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : Ir. H. SUNARTO

2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

IV. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF

2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

V. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 45 orang

VI. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 6 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 4 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 38 orang

VII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 2 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: - orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 1 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: - orang
Jumlah	: 7 orang

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang saya hormati Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah
Kabupaten Rembang.

Yang saya hormati Ketua Pengadilan Negeri Rembang.

Yang saya hormati Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten
Rembang.

Yang saya hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten
Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian,
Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang

Yang saya hormati Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan
semua undangan lainnya yang tidak dapat saya
sebutkan satu persatu.

Mengawali Rapat Paripurna hari ini sebagai Insan Pancasila yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, marilah kita tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih lagi Penyayang yang telah memberi kita nikmat, rahmah dan hidayah, sehingga kita masih diberikan kesempatan untuk mengikuti Rapat Paripurna DPRD dalam keadaan sehat wal afiat tanpa aral suatu apa dalam rangka membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan APBD Tahun 2012.

Mudah-mudahan sampai selesainya pembahasan Raperda nantinya dapat berjalan lancar dan selalu memperhatikan kondisi dan

kepentingan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Rembang yang kita cintai dan kita banggakan ini.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, karena masih dalam suasana Iedul Fitri, kami Pimpinan dan segenap Anggota Dewan sebagai manusia biasa yang tak luput dari salah dan lupa, kami mengucapkan "*Minal A'idin wal Faizin, Mohon maaf Lahir dan Batin, Taqobbalallohu Minna wa Minkum, Taqobbala yaa Kariim*". Semoga perjalanan kita dalam menempuh tugas yang akan datang tidak terlalu terbebani kesalahan-kesalahan yang sudah berlalu dan melangkah kedepan untuk mencapai tujuan yang lebih baik. Selanjutnya kami ucapkan selamat kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang beserta seluruh masyarakat Kabupaten Rembang yang telah memperingati Hari Jadi Kabupaten Rembang yang ke-271. Semoga moment peringatan Hari Jadi Kota Rembang tahun ini bisa lebih menggugah kita semua, terutama para pengambil kebijakan di Kabupaten Rembang untuk lebih meningkatkan semangat pengabdian dalam mengantarkan masyarakat Rembang untuk menuju masyarakat madani yang sejahtera dan berkeadilan setara dengan masyarakat di wilayah lain yang lebih maju.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Marilah kita masuki acara pokok dalam Rapat Paripurna hari ini. Sesuai dengan hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang bersama dengan TAPD Kabupaten Rembang tanggal 29 Agustus 2012, bahwa Rapat Paripurna hari ini merupakan Rapat Paripurna pertama dari 4 (empat) Rapat Paripurna untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan

APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012. Adapun susunan acara selengkapnya adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012;
3. Penutupan.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD dijelaskan bahwa "*Rapat Paripurna DPRD memenuhi kuorum apabila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk menetapkan Peraturan Daerah*"

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 38 orang. Dengan demikian, maka Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan "*Bismillahirrohmanirrohim*" tepat pukul 10.30 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*).

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Selanjutnya kita masuki acara yang kedua, yaitu " *Penjelasan Bupati Rembang tentang Rancangan Peraturan Daerah Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012*".

Kepada Saudara Bupati , dipersilakan.

===== **PENJELASAN BUPATI REMBANG TENTANG
RAPERDA KABUPATEN REMBANG** =====

(H. MOCH SALIM, M.Hum Teks Terlampir)

Terima kasih saya sampaikan kepada Sdr. Bupati yang telah menyampaikan Penjelasan Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012 yang telah diajukan ke DPRD Kabupaten Rembang.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Demikian acara Rapat Paripurna I (pertama) dalam Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012 hari ini telah sampai pada penghujung acara, selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Rapat Fraksi untuk menyusun pendapat Fraksi sebagai bahan untuk Pelaksanaan Rapat Paripurna II (kedua) tanggal 4 September 2012 besok pagi.

Akhirnya terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan selama saya memimpin rapat hari ini. Dan dengan mengucap "*Alhamdulillah robbil 'alamiin*" tepat pukul 10.50 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*).

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA


Ir. H. SUNARTO

SEKRETARIS


Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN
REMBANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN
REMBANG T.A. 2012.**

**LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum
koordinasi Pimpinan Daerah, Camat dan SKPD Se
Kabupaten Rembang ;**

**LAMPIRAN II: Penjelasan Bupati Rembang tentang Pengantar Nota
Keuangan Raperda Perubahan APBD Kabupaten
Rembang Tahun 2012.**

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA I
PENJELASAN BUPATI
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD 2012**

HARI / TANGGAL : SENIN, 03 SEPTEMBER 2012
JAM : 09.30 WIB

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	1	
2	H. HARNO, SE	Anggota	2	
3	GUNASIH, SE	Anggota	3	
4	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	4	
5	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	5	
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota	6	
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota	7	
8	ISLAHUDDIN	Anggota	8	
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	9	
10	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota		
11	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	11	
12	GATOT PAERAN, SH, MSi	Anggota	12	
13	SRI REJEKI, SH	Anggota	13	
14	H. I S M A R I	Anggota	14	
15	DJOKO SOESILO	Anggota	15	
16	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	16	
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>				
17	K. H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua	17	
18	SA'DULLAH	Anggota	18	
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	19	
20	H. HAKAM, SH	Anggota	20	
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	21	
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota	22	
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	23	
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua	24	
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pdi	Anggota	25	
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	26	
27	PUJI SANTOSO, SP	Anggota	27	
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	28	
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	29	
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	30	

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>			
31	RIDWAN, SH	Anggota	31	
32	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	32	
33	SUPRIHADI	Anggota	33	
34	JASMANI	Anggota	34	
35	SUMARSIH	Anggota	35	
	<u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u>			
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
	<u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u>			
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL: Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

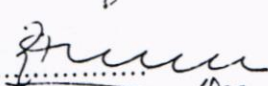
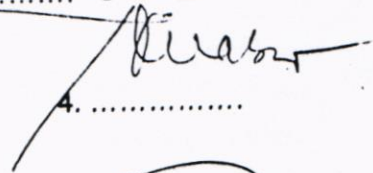
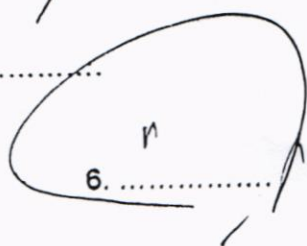
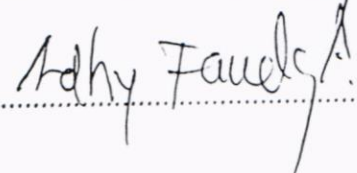
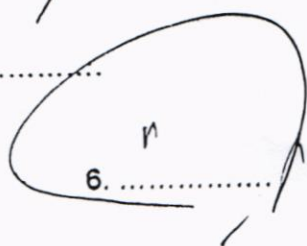


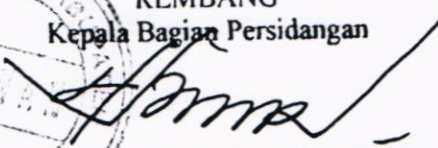
Ketua
[Signature]
Ir. H. SUNARTO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
 RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
 PENJELASAN BUPATI
 TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD 2012

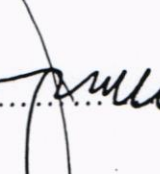
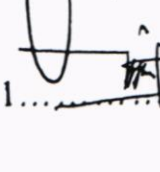
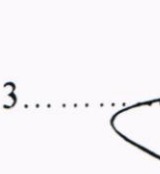
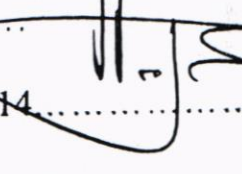
HARI / TANGGAL : SENIN, 03 SEPTEMBER 2012
 PUKUL : 09.30 WIB

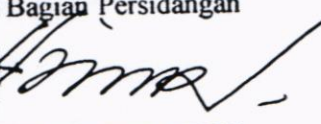
NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM		1. 
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. 
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3. 
4.	H. SUNARSO, SH. MH	Pengadilan Negeri Rembang	4. 
5.		Dandim 0720 Rembang	5. 
6.		Kepolisian Resort Rembang	6. 
7.		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8.		Kejaksaan Negeri Rembang	8.

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan

Drs. YULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
PENJELASAN BUPATI
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD 2012

HARI / TANGGAL : SENIN, 03 SEPTEMBER 2012
PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	N A M A	TANDA TANGAN
1	Camat Rembang	H. Agus Salim	1. 
2	Camat Kaliori	MUSTHOCH	2. 
3	Camat Sumber	HERMUNO	3. 
4	Camat Sulang	W. W. W. W.	4. 
5	Camat Bulu	Sulianto	5. 
6	Camat Pamotan	M. W. W. W.	6. 
7	Camat Gunem	DEBATH. S.	7. 
8	Camat Sale	H. Sunarto	8. 
9	Camat Lasem	ISMANTO	9. 
10	Camat Pancur	Muryasa	10. 
11	Camat Sedan	SUSWANTORO	11. 
12	Camat Sluke	MARDIYANTO	12. 
13	Camat Kragan		13. 
14	Camat Sarang	Aleksander	14. 

SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Kepala Bagian Persidangan

Drs. YULIUS SUDARNO
NIP. 19570711 198603 1 004

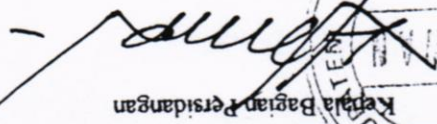
DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA I DPRD KABUPATEN REMBANG
PENJELASAN BUPATI
TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD 2012

HARI / TANGGAL : SENIN, 03 SEPTEMBER 2012
PUKUL : 09.30 WIB

10	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANBA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	Murshidin	K SAB	1
2	STAF AHLI BUPATI	Curmuh	W K S A B	2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	Subandi	As. I	5
6	ASISTEN II SEKDA	GUYUN	As. II	6
7	ASISTEN III SEKDA	A. H. W. A. K.	As. III	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Susanto	Kep. Lapas	8
9	BAG. HUKUM	Eddy Doko P.	Hukum	9
10	BAG. HUMAS	M. D. M. W.	Kab. Hum	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	ANANG S	Pembang	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Suhanto	Kab.	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Abdulhak	Kab. Kesa	13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	A. JAWA Wi.	As. III	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Erdi Sulant	Kep.	15
16	BAG. UMUM	Daman.	Kab. Um	16
17	LPPKAD	SUPATONO	LPPKAD	17
18	INSPEKTORAT	DJOJO P.	SEKRETARIS	18
19	BAPPEDA	K. H. H. H. H.	K. H. H. H. H.	19
20	BPMPKB	Dwi L. H. H. H.	K.	20
21	B K D	Supatrin		21
22	BKP & P4K			22
23	BPBD	B. H. H. H. H.	K.	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	B. H. H. H. H.	K.	24
25	DINAS KESEHATAN	Supriy. H. H.	K.	25
26	DINAS PENDIDIKAN	BAMBANG SOLO H.	K.	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	Muntaha.	K.	27
28	DINTANHUT	Suratmin	K.	28
29	DINLUTKAN	SUPARMAN	K.	29
30	DINHUBKOMINFO	SUYON	K.	30
31	DINAS DUKCAPIL	Gadih	K.	31
32	DINSOSNAKERTRANS	H. H. H. H.	K.	32
33	DINBUDPARPORA	Hon Effendi	K.	33
34	DINAS ENERGI & SDM	W. H. H. H.	K.	34
35	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Purnani S	K.	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO		36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Gusiana	Gub. H. H. H.	37
38	KANTOR PPT	Abdul Rozak		38

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	M. MAHMUDI	Kasi URUS	39
40	RSUD dr. R. SUTRASNO	Sulbago	Kasubag WDU	40
41	SATPOL PP	Shamir Riyad	Kasatpol PP	41
42	TIM PKK KAB. REMBANG	My. Supriyanto		42
43	P D A M	GIKWAHID 4	DIR	43
44	PERCETAKAN DAERAH			44
45	PD. BANK PASAR			45
46	BPD JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	BKK LASEM			48
49	BKK KALIORI			49
50	RBSJ	Ny. Andika		50
51	BPN KAB. REMBANG			51
52	UPS KAB. REMBANG	Isnaini	Kasubag TU	52
53	DIPENDA PROPINSI/UP3AD			53
54	KANTOR POS DAN GIRO			54
55	RUMAH TAHANAN	REGUH G.S	Ka KPR	55
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN			56
57	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			57
58	KANTOR PERHUTANI SPH IV			58
59	KPU KAB. REMBANG			59
60	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG	Sulisti	Sekretaris	60
61	FANWASLU KAB. REMBANG			61
62	TELKOM REMBANG			62
63	PLN CAB. REMBANG			63
64	STIE "YPPK" Rembang	Masritha	Dir.	64
65	STP FPG	Agus		65
66				66
67				67
68				68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	J A B A T A N	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
83			83	
84			84	
85			85	
86			86	
87			87	
88			88	
89			89	
90			90	
91			91	
92			92	
93			93	
94			94	
95			95	
96			96	
97			97	
98			98	
99			99	
100			100	

An- SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan

 Drs. YULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004



**PENGANTAR
NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



TAHUN ANGGARAN 2012



BUPATI REMBANG

PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Salam sejahtera untuk kita semua

- Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan DPRD, Ketua Komisi, Ketua Fraksi dan segenap anggota DPRD;
- Yang saya hormati, Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati, Sdr. Wakil Bupati Rembang;
- Yang saya hormati, Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati, Sdr. Staff Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
- Yang saya hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Mengawali sambutan ini, perkenankanlah saya mengajak hadirin untuk memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan rahmat dan karunia serta hidayah Nya, kita dapat menghadiri Rapat Paripurna DPRD dalam rangka penyampaian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012.

Pada kesempatan dibulan syawal ini perkenankanlah, saya atas nama pribadi dan Pemerintah Kabupaten Rembang menyampaikan selamat HARI RAYA IDUL FITRI 1433 H Minal Aidzin Walfaidzin Mohon Maaf Lahir Batin, semoga hikmah-hikmah selama menjalankan ibadah puasa dibulan suci Ramadhan senantiasa menambah dan memperteguh ketaqwaan kita di hadapan Allah SWT.

Dan memasuki hari yang penuh keberkahan ini kami senantiasa berdoa dan berharap agar berbagai momentum daerah, agenda-agenda daerah dapat kita tingkatkan terus dalam upaya pencapaian visi dan tujuan mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Rembang yang kita cintai ini.

Hadirin Sidang Dewan yang saya hormati

Rancangan APBD Perubahan yang kita awali dengan kesepakatan bersama melalui Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012, yang dalam penyusunannya berpedoman kepada :

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Perubahan asumsi dasar kebijakan umum APBD merupakan kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan. Perkembangan dinamika pelaksanaan pembangunan yang disertai dengan kebijakan fiskal yang diambil pemerintah, menuntut kita untuk lebih dapat mengimplementasikan program dan kegiatan pembangunan agar lebih efektif dan efisien. Menyikapi hal tersebut diperlukan perubahan perubahan dalam Kebijakan Umum Anggaran untuk mencapai sasaran prioritas pembangunan.

Mengingat dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012 telah terjadi perkembangan yang memenuhi syarat untuk disusunnya Perubahan APBD maka langkah-langkah yang akan ditempuh dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun anggaran 2012 meliputi :

1. Penyesuaian pendapatan daerah
2. Pergeseran anggaran Belanja Daerah
3. Penyesuaian atas penerimaan Pembiayaan (SiLPA)

Berikut saya sampaikan perubahan pendapatan, belanja maupun pembiayaan dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 :

PENDAPATAN DAERAH

Komponen Pendapatan Daerah terdiri dari :

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp. 89.947.696.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp.4.724.585.800,00 sehingga menjadi Rp.94.672.281.800,00 dengan rincian:
 - Pajak Daerah sebesar Rp. 16.920.000.000,00
 - Retribusi Daerah sebesar Rp. 22.911.304.700,00
 - Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp.5.739.706.000,00
 - Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah sebesar Rp.49.101.271.100,00
2. Dana Perimbangan semula Rp. 690.600.636.000,00 mengalami penurunan sebesar Rp.28.589.000,00 sehingga menjadi Rp.690.572.047.000 dengan rincian:

- Dana Bagi hasil Pajak/Bukan Pajak turun sebesar Rp.28.589.000,00 sehingga menjadi Rp.41.766.439.000,00
 - Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp. 570.454.948.000,00
 - Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp. 78.350.660.000,00
3. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah yaitu pada Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak naik sebesar Rp.10.309.866.500,00.

Total seluruh Pendapatan Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 adalah Rp.1.006.506.434.800,00 atau naik sebesar Rp.15.005.863.300,00 (1,51 %) dari APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.991.500.571.500,00

BELANJA DAERAH

Pada sisi Belanja Daerah terdapat kenaikan sebesar Rp.26.420.280.581,00

Belanja Tidak Langsung

Belanja Tidak Langsung mengalami penurunan sebesar Rp.217.622.150,00 dengan rincian:

1. Penurunan Belanja Pegawai sebesar Rp 2.623.291.150,00 karena adanya penyesuaian terhadap belanja gaji PNS dan tunjangan berdasarkan realisasi sampai dengan bulan Juli 2012.
2. Kenaikan Belanja Hibah sebesar Rp 8.980.306.000,00 dan penurunan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 8.574.637.000,00 karena penyesuaian terhadap posting anggaran beberapa SKPD dan pergeseran Belanja Tidak Langsung pada DPPKAD menjadi Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan.
3. Kenaikan Belanja Bantuan Keuangan kepada Pemerintahan Desa sebesar Rp.2.000.000.000,00

Belanja Langsung

Pada Belanja Langsung terdapat kenaikan sebesar Rp.26.637.902.731,00 yang merupakan jumlah dari Belanja Pegawai, Belanja Barang/Jasa dan Belanja Modal.

Kenaikan ini antara lain :

1. Pergeseran Belanja Tidak Langsung berupa Belanja Bantuan Sosial pada DPPKAD menjadi Belanja Langsung pada Dinas Pendidikan.
2. Tambahan JKRS.
3. Tambahan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan se Kab. Rembang.
4. Tambahan Pembangunan Tempat Parkir.
5. Penanganan Bencana Abrasi Pantai.
6. Peningkatan pelayanan kependudukan (E-KTP) untuk seluruh Kecamatan

Total seluruh Belanja Daerah pada Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012 adalah Rp.1.023.166.799.043,00 atau naik sebesar Rp.26.420.280.581,00 (2,65%) dari APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.996.746.518.462,00

PEMBIAYAAN DAERAH

Pada Penerimaan Pembiayaan Daerah terdapat kenaikan sebesar Rp.13.668.417.281,00.

Sedangkan pada Pengeluaran Pembiayaan Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp.2.254.000.000,00.

Sidang Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Selanjutnya saya sampaikan Ringkasan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 sebagai berikut :

PENDAPATAN DAERAH	Rp. 1.006.506.434.800
--------------------------	------------------------------

Pendapatan Asli Daerah	Rp. 94.672.281.800
-------------------------------	---------------------------

Hasil Pajak Daerah	Rp. 16.920.000.000
--------------------	--------------------

Hasil Retribusi Daerah	Rp. 22.911.304.700
------------------------	--------------------

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	Rp. 5.739.706.000
---	-------------------

Lain - lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	Rp. 49.101.271.100
---	--------------------

Dana Perimbangan	Rp. 690.572.047.000
-------------------------	----------------------------

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	Rp. 41.766.439.000
--	--------------------

Dana Alokasi Umum	Rp. 570.454.948.000
-------------------	---------------------

Dana Alokasi Khusus	Rp. 78.350.660.000
---------------------	--------------------

Lain - lain Pendapatan Daerah yang Sah	Rp.	221.262.106.000
Pendapatan Hibah	Rp.	622.670.000
Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	41.653.651.000
Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	Rp.	107.189.630.000
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	Rp.	71.796.155.000

Jumlah Pendapatan Rp. 1.006.506.434.800

BELANJA DAERAH	Rp.	1.023.166.799.043
Belanja Tidak Langsung	Rp.	636.226.337.850
Belanja Pegawai	Rp.	557.293.201.850
Belanja Bunga	Rp.	37.000.000
Belanja Subsidi	Rp.	700.000.000
Belanja Hibah	Rp.	30.006.370.000
Belanja Bantuan Sosial	Rp.	12.021.366.000
Belanja Bantuan Keuangan Kepada - Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan - Desa	Rp.	35.168.400.000
Belanja Tidak Terduga	Rp.	1.000.000.000

Belanja Langsung	Rp.	386.940.461.193
Belanja Pegawai	Rp.	55.597.752.475
Belanja Barang dan Jasa	Rp.	119.339.969.116
Belanja Modal	Rp.	212.002.739.602

Jumlah Belanja Rp. 1.023.166.799.043

Surplus / (Defisit) Rp. (16.660.364.243)

PEMBIAYAAN DAERAH

Penerimaan Pembiayaan		
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)	Rp.	33.462.940.243

Jumlah Penerimaan Pembiayaan Rp. 33.462.940.243

Pengeluaran Pembiayaan		
Penyertaan Modal	Rp.	7.254.000.000
Pembayaran Pokok Utang yang jatuh tempo	Rp.	9.548.576.000

Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Rp. 16.802.576.000

Pembiayaan Netto Rp. 16.660.364.243

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	
---	------------	--

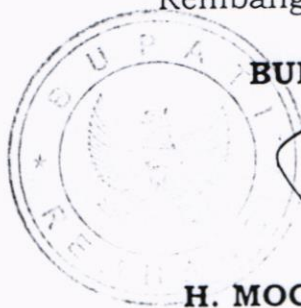
Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya Hormati,

Demikian Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012, untuk segera dibahas melalui mekanisme pembahasan di DPRD dan selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Akhirnya tidak lupa saya menyampaikan terimakasih dan semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuk Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 3 September 2012



BUPATI REMBANG

H. MOCH. SALIM, M. Hum

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD (II) KABUPATEN REMBANG

MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

Hari : SELASA

Tanggal : 04 September 2012

Waktu : Pkl. 09.30 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten
Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan.
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda
Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012.
3. Penutupan.

1. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : Ir. H. SUNARTO

2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

IV. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. ACHMAD MUALIF

2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

V. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 45 orang

VI. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 7 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 6 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 1 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 4 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 4 orang
Jumlah	: 36 orang

VII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: - orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 1 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 1 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 4 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 1 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 1 orang
Jumlah	: 9 orang

LAGU INDONESIA RAYA.

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Ketua Pengadilan Negeri Rembang.
Yang saya hormati	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya.

Sebelum kita melangkah pada pokok acara rapat hari ini, perkenankan kami terlebih dahulu memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas segala rahmat dan anugerah-Nya yang dilimpahkan kepada kita sekalian, sehingga Alhamdulillah sampai detik ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kesempatan untuk dapat menghadiri Rapat Paripurna II (kedua) DPRD Kabupaten Rembang dalam pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 dengan agenda pokok Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2012.

Rapat Dewan yang terhormat.

Sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 29 Agustus 2012 yang lalu bahwa Rapat Paripurna hari ini adalah merupakan Rapat Paripurna II (kedua) untuk membahas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Sebagaimana Rapat Paripurna pertama terdahulu, sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 1 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD. Untuk itu sesuai dengan catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 36 orang, dengan demikian maka Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan **“Bismillahirrohmanirrohim”** tepat pukul 11.00 WIB Rapat Paripurna DPRD saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali).

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Agenda pokok dalam paripurna pertama tanggal 3 September 2012 kemarin adalah penyampaian pengantar Bupati Rembang tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012, untuk selanjutnya yang menjadi agenda pokok paripurna kedua hari ini

adalah Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang 2012.

Namun untuk lebih lengkapnya akan saya sampaikan susunan acara yang akan berlangsung pada rapat paripurna hari ini adalah sebagai berikut:

1. Pembukaan.
2. Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012.
3. Penutupan.

Selanjutnya marilah kita masuki acara yang kedua, yaitu Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD.

Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi yang akan menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya, saya persilahkan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Demokrat : EDI KARTONO, SPd
2. Fraksi Partai Golkar : GATOT PAERAN, SH, MSI
3. Fraksi PPP : KODRIYAH, SPd
4. Fraksi PKB : MUH. ASNAWI, SPdi
5. Fraksi PDI Perjuangan : SUMARSIH
6. Fraksi Amanat Nasional : H. MOH. NURHASAN
7. Fraksi Bintang Keadilan : DHIAN RAHWENI DEWI

Selanjutnya dimulai dari Juru Bicara Fraksi Partai Demokrat sampai dengan Fraksi Bintang Keadilan, secara berurutan saya persilakan untuk menyampaikan Pemandangan Umum Fraksinya :

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI

1. Fraksi Demokrat : EDI KARTONO, SPd
- Membaca Teks Terlampir
2. Fraksi Partai Golkar : GATOT PAERAN, SH, MSI
- Membaca Teks Terlampir
3. Fraksi Persatuan Pembangunan: KODRIYAH, SPd
- Membaca Teks Terlampir
4. Fraksi PKB : MUH. ASNAWI, SPdi
- Membaca Teks Terlampir
5. Fraksi PDI Perjuangan : SUMARSIH
- Membaca Teks Terlampir
6. Fraksi Amanat Nasional : H. MUH. NURHASAN
- Membaca Teks Terlampir
7. Fraksi Bintang Keadilan : DHIAN RAHWENI DEWI
- Membaca Teks Terlampir

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya masing-masing.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara rapat paripurna hari ini telah kita lalui dengan seksama dan selesai sesuai dengan acara yang diagendakan, akhirnya terima kasih saya sampaikan atas perhatiannya, mohon maaf segala kekurangan selama saya memimpin rapat. Selanjutnya akan diteruskan dengan Rapat Paripurna III (ketiga) besok pagi hari Rabu tanggal 5 September 2012 dengan agenda pokok "Penyampaian Jawaban Bupati Atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Tahun 2012. Untuk itu dimohon Saudara Bupati untuk mempersiapkannya.

Demikianlah Rapat Paripurna telah selesai dan dengan mengucapkan
“Alhamdulillahirobbil ‘alamin“ tepat pukul 12.00 WIB Rapat
Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*).

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

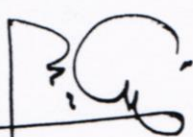
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA



Ir. H. SUNARTO

SEKRETARIS



Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

**LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN
REMBANG MEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN
DAERAH TENTANG PERUBAHAN APBD KABUPATEN
REMBANG T.A. 2012.**

**LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum
koordinasi Pimpinan Daerah, Camat dan SKPD Se
Kabupaten Rembang ;**

**LAMPIRAN II : Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD
Kabupaten Rembang terhadap Rancangan Peraturan
Daerah Tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang
T.A. 2012.**

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA II
PENYAMPAIAN PANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD 2012**

HARI / TANGGAL : SELASA, 04 SEPTEMBER 2012
WAKTU : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	1	
2	H. HARNO, SE	Anggota	2	
3	GUNASIH, SE	Anggota	3	
4	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	4	
5	Hj. HIKMAH PURNAMA WATI	Anggota	5	
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota	6	
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota	7	
8	ISLAHUDDIN	Anggota	8	
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	9	
10	CHAIRUL ANVAR, S.Sos	Anggota	10	
11	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	11	
12	GATOT PAERAN, SH, MSI	Anggota	12	
13	SRI REJEKI, SH	Anggota	13	
14	H. ISMARI	Anggota	14	
15	DJOKO SOESILO	Anggota	15	
16	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	16	
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>				
17	K. H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua	17	
18	SATDULLAH	Anggota	18	
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	19	
20	H. HAKAM, SH	Anggota	20	
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	21	
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota	22	
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	23	
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua	24	
25	MUHANIMAD ASNAWI, S.Pd	Anggota	25	
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	26	
27	PUJI SANTOSO, SP	Anggota	27	
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	28	
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	29	
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	30	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>			
31	RIDWAN, SH	Anggota	31	
32	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	32	
33	SUPRIHADI	Anggota	33	
34	JASMANI	Anggota	34	
35	SUMARSIH	Anggota	35	
	<u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u>			
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
	<u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u>			
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENTI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sa'dit
- 3 C : Culi
- 4 DL: Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD 2012

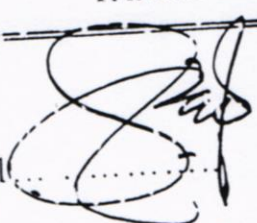
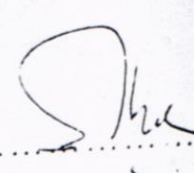
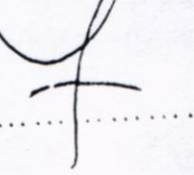
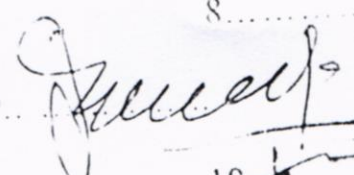
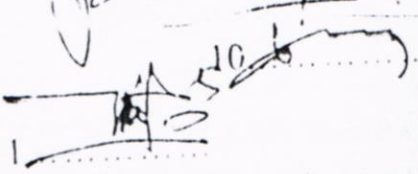
HARI / TANGGAL : SELASA, 04 SEPTEMBER 2012
PUKUL : 09.30 WIB

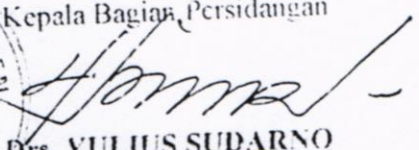
NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM	Wakil Bupati Rembang	1.
2.	H. ABDUL HAFIDZ		2.
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3.
4.		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5.		Dandim 0720 Rembang	5.
6.	LEONE ARON	Kepolisian Resort Rembang	6.
7.		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8.		Kejaksaan Negeri Rembang	8.

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIS DPRD KAB.
REMBANG
Kepala Bagian Persidangan
Drs. YULIUS SUDARNO
No. 19570711 198603 1 001

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD 2012

HARI / TANGGAL : SELASA, 04 SEPTEMBER 2012
PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Camat Rembang	Sa'adi	1. 
2	Camat Kaliori	SUDIRMAN	2. 
3	Camat Sumber	TASMIK	3. 
4	Camat Suiang	W. W. W. W.	4. 
5	Camat Bulu	Purhanto	5. 
6	Camat Panjotan	M. W. W. W.	6. 
7	Camat Gunem		7.
8	Camat Sale		8.
9	Camat Lasem	ISMAANTO. AS	9. 
10	Camat Paricur	Maryasa	10. 
11	Camat Sedan	SUSWANTORO	11. 
12	Camat Sluke	Bambang	12.
13	Camat Kragan		13.
14	Camat Sarang	Akhmad	14. 


 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan

Drs. YULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 001

DAFTAR HADIR SKPD
RAFAT PARIPURNA II DPRD KABUPATEN REMBANG
PENYAMPAIAN PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP RAERDA PERUBAHAN APBD 2012

HARI / TANGGAL : SELASA, 04 SEPTEMBER 2012
 PUKUL : 09.30 WIB

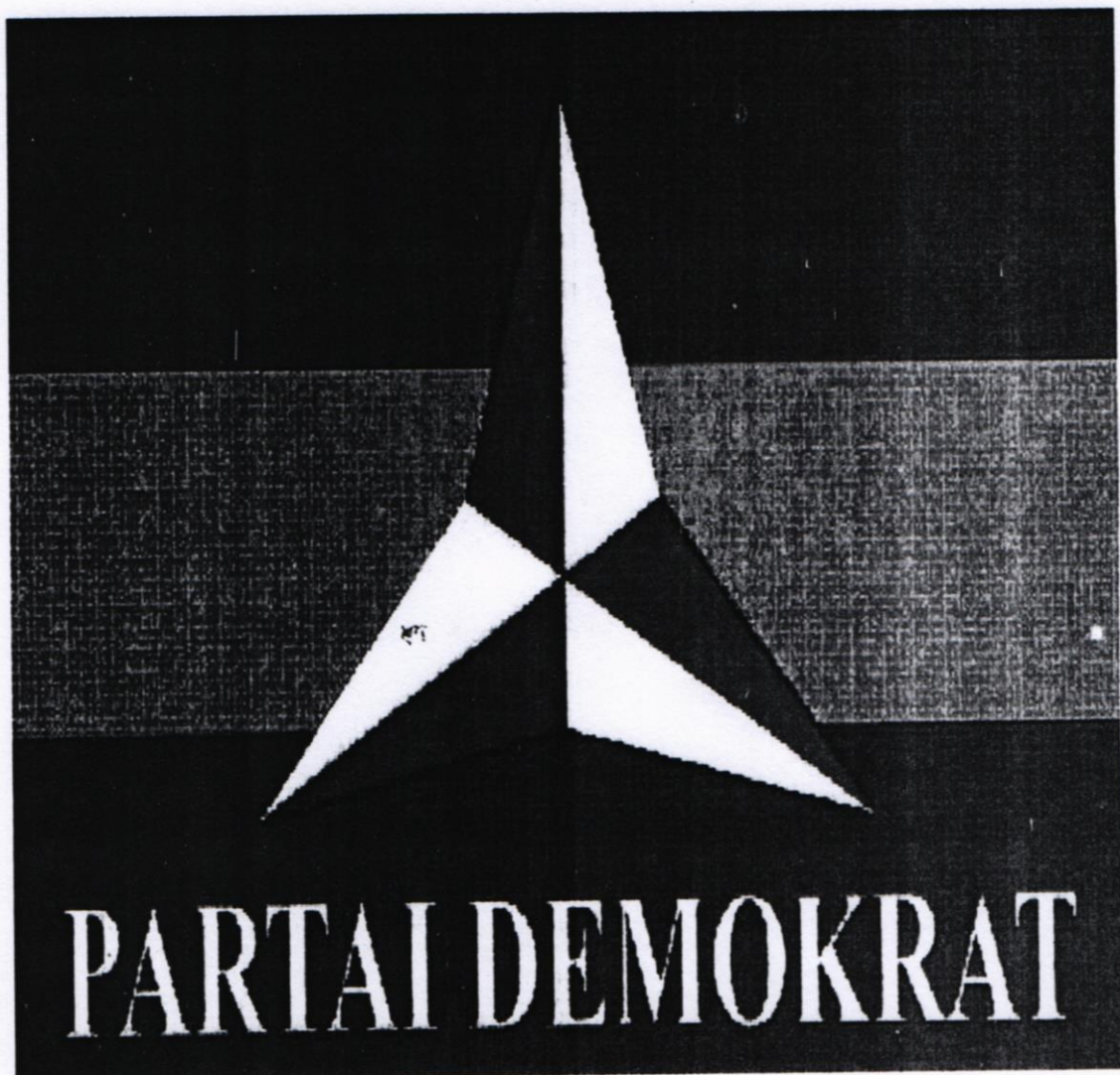
NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI		FRB	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA	Surya	As. II	6
7	ASISTEN III SEKDA	A. J. ...	As. III	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Ses ...	Bag. Tata Pemerintahan	8
9	BAG. HUKUM	Edy ...	Bag. Hukum	9
10	BAG. HUMAS	Il. ...	Bag. Humas	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	Karyanto	Ka Bag. Pembangunan	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Suharno	Ka Bag. Perekonomian	12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Abdullah	Ka Bag. Kesejahteraan Rakyat	13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Tri ...	Ka Bag. Administrasi Keuangan	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Endang ...	Ka Bag. Organisasi & Kepegawaian	15
16	BAG. UMUM	Endang ...	Ka Bag. Umum	16
17	DPPKAD	Sucip ...	DPPKAD	17
18	INSPEKTORAT	SOEBAGIJO	Inspektur	18
19	BAPPEDA	Drupodo	Sekretaris	19
20	BPMPKB	Don ...		20
21	BKD	Sugamir	Ka	21
22	BKP & P4K	Wartono		22
23	BPBD	Su ...	Ka	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Agus ...	Ka Dinas Pekerjaan Umum	24
25	DINAS KESEHATAN	Agus ...	Ka Dinas Kesehatan	25
26	DINAS PENDIDIKAN	Agus ...	Ka Dinas Pendidikan	26
27	DINPERINDAGKOP & UIMKM	Ex. ...	Ka Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi & UKM	27
28	DINTANHUT	Su ...	Ka Dinas Perikanan dan Kehutanan	28
29	DINLUTKAN	BUDIYONO	Sekretaris	29
30	DINHUBKOMINFO	SUYONO	Ka Dinas Komunikasi dan Informatika	30
31	DINAS DUKCAPIL	Edy ...	Ka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	31
32	DINSOSNAKERTRANS	H. ...	Ka Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Transmigrasi	32
33	DINBUDPARPORA	SURYANA	Ka Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga	33
34	DINAS ENERGI & SDM	Nus ...	Ka Dinas Energi dan Sumber Daya Manusia	34
35	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	Purnomo		35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	KARTONO		36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	VAZID A.C.		37
38	KANTOR PPT			38

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	gasim	gasi	39
40	RSUD dr. R. SUTRASNO	Karyo		40
41	SATPOL PP	Slamet Pujiadi		41
42	TIM PKK KAB. REMBANG	M. Supriyanto		42
43	P D A M	Rachmad Ipdadu	PDAM	43
44	PERCETAKAN DAERAH			44
45	PD. BANK PASAR			45
46	BPD JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	BKK LASEM			48
49	BKK KALIORI			49
50	R B S J	Nuruk Andriyati		50
51	B P N KAB. REMBANG			51
52	BPS KAB. REMBANG			52
53	DIPENDA PROPINSI/ UP3AD			53
54	KANTOR POS DAN GIRO			54
55	RUMAH TAHANAN			55
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN			56
57	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			57
58	KANTOR PERHUTANI SPH IV			58
59	KPU KAB. REMBANG			59
60	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			60
61	PANWASLU KAB. REMBANG			61
62	TELKOM REMBANG			62
63	PLN CAB. REMBANG			63
64	Dintari huy	Nurhi Daryah		64
65	BPS	KHAERUL A		65
66	SI/IG "YPPS" 206	Masudi		66
67	Radio Extra Bahari FM	Masudi	Reporter Sekret	67
68	Binas Kesehatan	Priyo Utomo	sekr.	68
69	ESDM	Wuryatun	KAGIS	69
70	RSU R. R. Soelomo	STI Sektro		70
71	Staf ahli POK	Elke Oksinia S.		71
72	"	Agus W		72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82

KEMENTERIAN KOPERASI DAN KREDIT
 JABATAN PERKAWANAN
 KANTOR KOPERASI DAN KREDIT
 KUALA LUMPUR
 198603 1 004
 DR. OTTUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004

10	1	2	3	4	5
	BADAN/BAG/DIN./S./KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
93					84
94					85
95					86
96					87
97					88
98					89
99					90
100					91
					92
					93
					94
					95
					96
					97
					98
					99
					100

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
RANCANANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN 2012**



DPRD KABUPATEN REMBANG



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

**PEMANDANGAN UMUM FRAKSI TERHADAP RAPERDA
PERUBAHAN APBD TAHUN 2012**

**Selasa , 4 September 2012
Dibacakan oleh : Edi Kartono, SPd.**

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati , Wakil Bupati .
2. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang .
3. Saudara Ketua pengadilan Negeri dan pengadilan Agama Rembang.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang .
5. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang beserta Staf.
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM , rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pemandangan umum kami terhadap Raperda Perubahan APBD tahun 2012 ini, marilah kita selalu memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, berkat limpahan Rahmat, Hidayah serta Inayah-Nya, kita masih diberikan kesehatan dan kebugaran tak kurang suatu apa.

Dalam kesempatan ini pula karena masih dalam bulan syawal, kami mewakili Fraksi Demokrat mengucapkan Minal Aidzin Wal Faizin Mohon Maaf Lahir Batin kepada seluruh jajaran Eksekutif, Pimpinan dan anggota DPRD, Muspida dan seluruh hadirin semua, semoga segala kesalahan dan kekhilafan dapat dimaafkan.

Bupati, Wakil Bupati dan Hadirin yang terhormat yang terhormat,

Dalam kesempatan yang berbahagia ingin kami sampaikan beberapa masukan berkaitan dengan pemandangan umum ini.

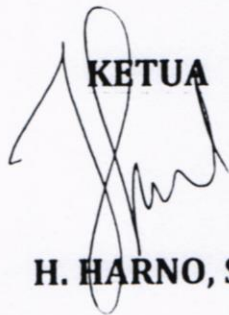
1. Di masa kemarau ini banyak terjadi kebakaran yang melanda beberapa rumah dan wilayah perkebunan di Kabupaten Rembang. Dengan realitas ini kami mengharapkan pemerintah mempersiapkan kualitas dan kuantitas petugas serta alat-alat penunjang pemadam kebakaran sehingga dapat menangani kejadian kebakaran dengan cepat.
2. PDAM dapat mencari trobosan -trobosan dan mengatur sebaik-baiknya sumber air yang telah diolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pelanggan .
3. Kami harapkan pemerintah daerah bisa mengamankan aset-aset daerah khususnya aset yang berkaitan dengan bekas-bekas pasar.
4. Berkaitan dengan Infrastruktur khususnya jalan-jalan banyak yang rusak parah. Berkaitan dengan hal tersebut kami mengharapkan pemerintah daerah dapat segera memperbaikinya.

5. Untuk pemerintah agar memperhatikan kebersihan lingkungan semua TPI di Kabupaten Rembang yang terlihat jorok dan kotor dan kumuh.
6. Pelayanan Rumah sakit yang sudah beberapa kali disinggung tapi tidal ada perubahan sama sekali bahkan cenderung menurun.
7. Untuk semua penambang memperhatikan lingkungan yang setelah ditambang agar melakukan penghijauan .

Demikian Pemandangan Umum Fraksi Demokrat ini kami sampaikan, akhirnya kepada saudara bupati, wakil bupati, saudara ketua dan para wakil ketua DPRD serta segenap tamu undangan kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

KETUA

H. HARNO, SE



SEKRETARIS

IMRO'ATUS SOLICHAH, SE.

PEMANDANGAN UMUM

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA DPRD KABUPATEN REMBANG



**Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang
Tahun Anggaran 2012**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Sekretariat: DPRD Rembang, Jl. Diponegoro No.88, Rembang 59212

PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap

Rancangan Peraturan Daerah
tentang

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012

Disampaikan dalam Rapat Paripurna
DPRD Kabupaten Rembang

Hari Selasa, 4 September 2012
Juru Bicara GATOT PAERAN, SH, MSi.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yang kami hormati Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yang kami hormati Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian Pemandangan Umum Fraksi kali ini, perkenankanlah kami mengajak semua untuk memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang senantiasa memberikan kesehatan, keselamatan, rahmah dan berkah kepada kita semua sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang berbahagia ini. Mumpung masih dalam suasana lebaran, perkenankanlah kami segenap keluarga besar Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Rembang mengucapkan Selamat Idul Fitri 1433 Hijriyah - Mohon Maaf Lahir Batin. ***“Seburuk apapun telah tertulis dalam catatan kita, masih ada lembar berikutnya yang putih dan bersih dimana kita bisa menulis dan melukis diatasnya dengan hal-hal yang lebih baik dan indah”.***

Juga tak lupa ***“Selamat Hari Jadi Kabupaten Rembang ke-271”*** serta ***“Dirgahayu Republik Indonesia di ke-67”***, semoga dalam usia yang cukup matang ini segenap bangsa Indonesia, khususnya warga Kabupaten Rembang bisa lebih mensyukuri anugerah Tuhan YME dan lebih meningkat derajat kehidupannya.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Sebelum menyampaikan Pemandangan Umum mengenai Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 yang kemarin disampaikan oleh Sdr. Bupati kepada DPRD Kabupaten Rembang, perkenankanlah kami menyampaikan informasi daya serap kementerian/lembaga negara terhadap APBN 2012, sebagai pembanding daya serap SKPD kita terhadap APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012. Berdasarkan laporan Tim Evaluasi dan Pengawasan Penyerapan Anggaran (TEPPA), disebutkan:

- 10 Kementerian/Lembaga dengan daya serap belanja tertinggi (antara 39,7% - 57%), lembaga yang bisa menyerap anggaran paling tinggi adalah BKKBN
- 28 Kementerian/Lembaga dengan daya serap antara 30% - 39,6%
- 5 Kementerian/Lembaga dengan daya serap di bawah daya serap nasional antara 20%-29,7%.
- 10 Kementerian/Lembaga dengan daya serap terendah, dibawah 20%.
- Dan yang paling rendah adalah Kementerian Pemuda dan Olahraga, hanya 2,4%.

Fakta itu sungguh menjadi potret betapa respons aparaturnya kita terhadap percepatan ekonomi amat lamban. Padahal, di tengah perekonomian dunia yang murung akibat krisis, stimulus APBN amat penting untuk mempertahankan atau bahkan mendorong pertumbuhan. Lambatnya penyerapan anggaran jelas bisa menjadi inefisiensi bagi perekonomian kita. Ini juga sebagai pertanda tidak beresnya perencanaan. Untung hal ini tidak terjadi pada daya serap SKPD Kabupaten Rembang terhadap APBD Kabupaten Rembang tahun 2012, karena perencanaan yang cukup matang dan besaran anggaran yang sangat kecil dibanding APBN.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Membaca Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2012 ini FPG memberi apresiasi yang tinggi berkenaan dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir 6 %, dari Rp. 89,947 M menjadi Rp. 94,672 M. Dari PAD tsb. terdapat pendapatan dari Hasil

Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp. 5.739 M. Kami ingin mendapat jawaban dari Sdr Bupati, apakah dana tersebut sudah termasuk pemasukan dari deviden "PT RBSJ" serta keuntungan kapal "Collecting Ship" yang dikelola oleh pihak ketiga sejak beberapa tahun yang lalu, kalau belum masuk kenapa?

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menanggapi Raperda APBD Perubahan ini kami menyampaikan hal-hal sbb.

- Agar dana yang meningkat hendaknya digunakan sesuai peruntukannya agar tidak terjadi pemborosan atau mengambil untung demi kepentingan pribadi.
- Berkenaan dengan perubahan konsumsi BBM kendaraan dinas dari premium ke pertamax (baik roda 2 maupun roda 4), kami mohon penjelasan apakah hal ini menyebabkan peningkatan belanja yang signifikan dalam APBD Perubahan dan kami berharap momentum ini hendaknya digunakan sebagai langkah efisiensi anggaran.
- Mengenai tambahan pembangunan tempat parkir, kami mohon penjelasan kenapa tempat parkir yang ada di Sendangasri Lasem, sampai saat ini belum difungsikan.
- Aset daerah yang ada, seperti kompleks GOR mBesi, proyek BBS (Bonang-Binangun-Sluke) hendaknya dioptimalkan penggunaannya sehingga bisa menambah pendapatan daerah.

Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

Menutup Pandangan Umum ini kami ingin menyampaikan filosofi Jawa atau *sesanti* dalam Bahasa Jawa:

- *"Sepi ing pamrih rame ing gawe, banter tan mbancang, dhuwur tan ngungkuli"* artinya mari kita bekerja keras dan

bersemangat tanpa pamrih, cepat tanpa harus mendahului, tinggi tanpa harus melebihi.

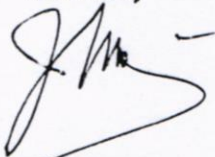
- **"Urip Iku urub"** artinya hidup itu nyala, hidup ini hendaknya memberi manfaat bagi orang lain disekitar kita, semakin besar manfaat yang bisa kita berikan tentu akan lebih baik, tapi sekecil apapun manfaat yang dapat kita berikan, jangan sampai kita menjadi orang yang meresahkan masyarakat.

Bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pemandangan Umum Fraksi Partai GOLKAR kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan rahmah dan berkah kepada kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian membangun Kabupaten Rembang. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

Ketua,



H. ISMARI



Sekretaris,

DJOKO SOESILO

PANDANGAN UMUM

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD) KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2012**



**DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
HARI : SELASA
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2012**

Dibacakan oleh :

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P. Diponegoro no.88 Rembang Telp. (0295) 693292**

**PANDANGAN UMUM
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**PENGANTAR NOTA KEUANGAN RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
(APBD) KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
HARI : SELASA
TANGGAL : 4 SEPTEMBER 2012
Dibacakan oleh :

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati :

- Saudara Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Rembang;
- Saudara Muspida kabupaten Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Agama kabupaten Rembang;
- Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Camat se- kabupaten Rembang;
- Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
- Saudara-saudara dari kalangan media serta semua yang hadir pada sidang paripurna hari ini yang berbahagia.

Mengawali pendapat Fraksi ini, kami mengajak kepada hadirin sidang dewan yang terhormat, marilah kita senantiasa bersyukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang senantiasa memberikan taufiq dan hidayahNya kepada kita sekalian, Tuhan yang tiada memberikan beban kepada hambaNya kecuali sesuai dengan kesanggupan hambaNya, Tuhan yang selalu memberi pertolongan kepada para hambanya serta memberi petunjuk bagi siapapun yang dikehendakiNya.

Sholawat dan Salam senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Akhir zaman, Nabi yang tiada lagi Nabi setelahnya, Nabi yang pada dirinya terdapat tauladan yang baik; Nabi yang padanya kita harapkan syafaat; beliau adalah Nabi Muhammad SAW.

Selanjutnya kami keluarga besar Fraksi Partai Persatuan Pembangunan mengucapkan " JA'ALANALLAAHU WAIYYAKUM MINAL 'AIDIN WAL FAIZIN, SELAMAT HARI RAYA 'IDUL FITRI 1433 H, MOHON MAAF LAHIR BATIN atas segala kesalahan dan kekhilafan kami selama ini baik yang sengaja maupun yang tidak kami segaja. Sekaligus kami membukakan pintu maaf kepada bapak/ibu/saudara hadirin sidang dewan yang terhormat.

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat

Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran (APBD) 2012 ini, FP3 menilai sudah merupakan konsep APBD yang sudah memenuhi aspirasi dari masyarakat, namun FP3 menyadari dalam perubahan APBD tahun 2012 ini tentu ada beberapa kegiatan yang *dicancel*, dan tentu ada kegiatan yang muncul baru. FP3 meminta agar perubahan-perubahan yang ada tersebut, harus benar-bener sesuai dengan aspirasi masyarakat serta benar-benar sesuai dengan skala prioritas.

Saat ini kita memasuki minggu bulan september 2012, kurang dari empat bulan lagi kita akan memasuki tahun 2013, ini berarti "tutup buku" untuk tahun anggaran 2012, sementara masih banyak kegiatan yang belum terealisasi, mengapa? Dan sudah sejauhmanakah pelaksanaan APBD tahun anggaran 2012 ini?

Hadirin Sidang dewan yang terhormat...!

Beberapa bulan yang lalu kita dikejutkan dengan kenaikan tarif PDAM, terutama bagi para pelanggan. Kenaikan ini terasa mengagetkan karena sosialisasi tentang akan adanya kenaikan tersebut dirasa sangat kurang terutama bagi para pelanggan. FP3 berharap hal ini tidak terjadi lagi, sekaligus FP3 meminta penjelasan atas kenaikan tersebut dan sudahkah diimbangi dengan peningkatan pelayanan?

Dibidang infra struktur jalan, FP3 melihat masih banyak jalan yang sudah rusak, yang sangat segera untuk di perbaiki. ironisnya anggaran untuk perbaikan jalan ini terasa masih jauh dari kata cukup. Karena itu FP3 meminta untuk dicukupinya anggaran perbaikan jalan tersebut mengingat pembangunan infra struktur termasuk jalan merupakan salah satu 4 pilar pokok pembangunan di kabupaten Rembang.

Dibidang pendidikan, yang merupakan salah satu program 4 pilar pembangunan, pemerintah kabupaten Rembang menekankan pada peningkatan aksesibilitas pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat miskin. FP3 sangat memberikan apresiasi positif terhadap program tersebut. bahwa aksesibilitas pendidikan tidak sebatas pada pendidikan dasar dan menengah saja, akan tetapi sampai pada tingkat ... bagi masyarakat kurang mampu. FP3 meminta agar anggaran untuk program dibidang pendidikan ini segera direalisasikan. Jangan sampai program ini hanya indah didengar ditelinga saja.

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang terhormat,

Saat ini kita berada di musim kemarau, musim kering dimana-mana kekurangan air bersih. FP3 meminta kepada pemerintah untuk menginventarisir daerah-daerah mana saja yang kekurangan air untuk segera di suplai air bersih. Selain itu FP3 mengingatkan untuk berhati-hati jangan sampai terjadi musibah kebakaran. BPBD sebagai badan penanggulangan bencana harus benar-benar mengantisipasi hal tersebut. FP3 mengusulkan armada DAMKAR untuk ditempatkan diberbagai zona agar kalau terjadi kebakaran segera teratasi jangan sampai terjadi mobil damkar datang ketika kebakaran selesai seperti di film-film india.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia....

Sebelum kami akhiri Pandangan Umum kami ini, kami ingin mendapat info tentang e KTP, apa kabar e KTP, sejauhmana pelaksanaannya?

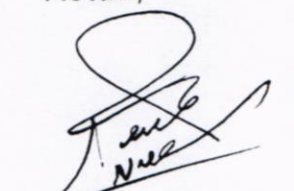
Demikian Pandangan Umum Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dalam rangka menanggapi Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD tahun Anggaran 2012 ini kami sampaikan, segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf, teriring doa semoga rahmat, taufiq dan hidayah-Nya senantiasa mengiringi langkah kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Amien, Amien, Amien yaa Robbal 'alamien ...!

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 4 September 2012

Fraksi PPP,

Ketua,


SAKDULLAH

Sekretaris,




KODRIYAH, S.Pd.I



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

**Pemandangan Umum
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012**

disampaikan oleh puji santoso

Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Selasa 4 September 2012

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah kabupaten

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Perkenankan kami menyampaikan : *ja'alanallahu minal 'aidin wal faizin kullu 'aammin wa antum bi khair*, mohon ma'af atas segala kesalahan yang kami lakukan, baik yang disengaja atau tidak kami sengaja.

Dalam tradisi Jawa, lebaran identik dengan saling ma'af mema'afkan yang ditunjukkan dengan terminologi "kupas" yang artinya ngaku lepat (mengakui kesalahan). Mengakui kesalahan yang telah dilakukan di dalamnya mengandung konsekuensi-konsekuensi logis, tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Di beberapa desa lebaran juga dibarengkan dengan tradisi tasyakuran desa (sedekah desa/laut) sebagai rasa syukur atas rejeki dan ni'mat yang diberikan Allah SWT. Dalam hal ini selalu ada "tumpeng" artinya metu lan mepeng (jika sudah memulai yang baru harus profesional). Diharapkan mereka memiliki kesadaran baru bahwa setelah meminta ma'af

dan mengakui kesalahan harus serius (profesional) untuk tidak melakukan kesalahan lagi, serta profesional dengan bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanat.

Dalam pengelolaan pemerintahan, "kupas" ngaku lepat atau mengakui kesalahan diimplementasikan melalui "open house" untuk saling memaafkan. Tentu saja mereka yang memiliki potensi salah yang lebih besar yang meminta ma'af terlebih dahulu..

Keteladanan melalui sikap "open house: seperti di atas yang dimulai dari yang memiliki potensi kesalahan lebih besar mudah-mudahan juga menjadi teladan bagi seluruh masyarakat Rembang agar tidak terbalik dalam melakukan prosesi tahunan "kupas" atau ngaku lepat. Dengan demikian kita bisa selalu belajar untuk mencerdasi segala persoalan sosial dan kekinian serta mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi publik.

Jika kita sungguh-sungguh mengakui kesalahan, insyaallah akan selalu ada "campur tangan Tuhan" dalam mengelola kabupaten tercinta ini. Sekali lagi kepada seluruh masyarakat Rembang, fraksi kebangkitan bangsa menyampaikan : mohon ma'af lahir dan batin.

Sidang Dewan Yang Kami Mulyakan

Kami ingin mengingatkan kembali tentang pembahasan KUA-PPAS Perubahan tahun 2012 secara umum telah memuat kebijakan fiskal menyangkut perubahan kebijakan pendapatan dan perubahan kebijakan belanja. Tujuh perubahan kebijakan pendapatan sebagaimana yang direncanakan pada dasarnya bukanlah perubahan kebijakan pendapatan, melainkan hanya perubahan pendapatan yang naik 7,1 miliar dari kenaikan PAD 3,7 miliar dan kenaikan pendapatan lain lain pendapatan daerah yang sebesar 3,4, dengan tanpa perubahan kebijakan pendapatan karena kebijakannya masih sama dengan kebijakan APBD 2012 yang lalu.

Dalam rancangan perubahan APBD tahun 2012 ini, sebagaimana pengantar nota keuangan perubahan APBD tahun 2012, disebutkan bahwa terdapat kenaikan pendapatan terdapat kenaikan PAD sebesar 4.7 miliar dan penurunan dana perimbangan sebesar 28,5 miliar, serta terjadinya kenaikan pada lain-lain pendapatan yang sah sebesar 10,3 miliar. Artinya, terjadi penurunan anggaran pendapatan sebesar 13,5 miliar.

Atas kondisi ini patut kita pertanyakan sejauh mana perencanaan pendapatan pada dana perimbangan yang turun hingga 28,5 miliar? Agar dalam perencanaan berikutnya kita mampu menjadikannya sebagai pembelajaran.

Secara umum belanja perubahan RAPBD tahun 2012 ini mengalami kenaikan sebesar 26,4 miliar. Kami memberikan apresiasi, meskipun perubahannya hanya kecil, tetapi memberikan tanda bahwa mulai ada kebijakan untuk menekan belanja tidak langsung yang berkurang sebesar 217 juta yang masuk menjadi belanja langsung.

Peruntukan belanja langsung sebesar 26,6 miliar dalam nota pengantar keuangan perubahan RAPBD 2012 diantaranya adalah; pergeseran di DPPKAD, JKRS, pemeliharaan jalan dan jembatan pembangunan tempat parkir, bencana abrasi pantai, dan E-KTP. Atas hal ini kami meminta penjelasan beberapa hal sebagai berikut :

1. Penambahan untuk JKRS juga disertakan cash flow yang telah menjadi tanggungan JKRS terhadap RSU atau Puskesmas sebagai bahan dasar untuk merumuskan kebijakan baru yang mungkin lahir atas program kesehatan ini
2. Sejauh mana hotmix-sasi jalan mampu memberikan efisiensi sebagaimana yang pernah disosialisasikan. Sebab pada kenyataannya jalan-jalan tersebut sudah mulai hancur atau rusak.
3. Dalam kondisi kemarau panjang yang melanda semua daerah di Jawa Tengah ini apakah tambahan tempat parkir dan abrasi pantai (relatif terkendali karena) lebih memiliki skala prioritas dibandingkan dengan penanganan air bersih dan kerusakan lahan produktif>
4. Penambahan dana E-KTP sebaiknya disertai daftar kebutuhan agar tidak tumpang tindih dengan anggaran yang sudah ada.

Jika kebijakan perubahan RAPBD ini adalah kebijakan fiskal yang digunakan untuk mengatasi permasalahan dan tantangan dalam pembangunan agar implementasi program dan kegiatan pembangunan lebih efektif dan efisien, kami perlu mendapatkan klarifikasi atas sumber-sumber kenaikan penerimaan pembiayaan sebesar 13,6 miliar dan kenaikan pengeluaran pembiayaan sebesar 2,25 miliar.

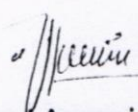
Sidang Dewan Yang Kami Hormati

Demikian pandangan umum ini kami sampaikan agar mendapatkan perhatian semua pihak. Kami berharap selalu ada tahapan kemajuan bagi proses menyejahterakan masyarakat Rembang melalui pengelolaan keuangan yang benar/.

Atas segala kekurangannya disampaikan permohonan maaf dan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 4 September 2012
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa


Muhammad Asnawi, SPdI
Ketua


Puji Santoso, SE
Sekretaris





**Pemandangan Umum
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

**Terhadap
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

**Dibacakan Oleh,
SUMARSIH**

**PADA SIDANG PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
SELASA, 04 SEPTEMBER 2012**



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Pemandangan Umum

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Terhadap

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

Dibacakan Oleh,

SUMARSIH

**Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh
Salam sejahtera untuk kita semua
MERDEKA...!!!**

Yang terhormat, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

Yang terhormat, Saudara Ketua beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Saudara Pimpinan Fraksi, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan dan Saudara-Saudaraku Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang terhormat, Saudaraku yang tergabung dalam Forum Koordinasi Daerah.

Yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

Yang terhormat, Saudara Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, serta Saudaraku-Saudaraku Camat se-Kabupaten Rembang;

Hadirin, Peserta Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang yang berbahagia

Alhamdulillah robbil alamin,

Puja dan puji syukur selalu kami panjatkan ke hadirat Ilahi Robbi, atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga di pagi yang cerah ini, kita semua dapat menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari.

Selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 Hijriyah, kami Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Rembang yang merupakan kepanjangan tangan Partai menghaturkan permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekhilafan selama ini, semoga berkah Idul Fitri mampu mensucikan hati, mampu menjernihkan pola pikir dan mengawal kebijakan yang lebih amanah dan mensejahterakan rakyat Rembang.

Sehubungan dengan kewajiban konstitusional kami sebagai Fraksi yang harus membuat dan menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terkait Pengantar Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012, maka perkenalkanlah Fraksi PDI Perjuangan menyampaikan hal-hal sebagai berikut;

Pertama, meminta penjelasan tentang Pelabuhan Tanjung Bonang Kecamatan Sluke.

1. Dari manakah sumber dana yang digunakan untuk membangun jetty dan melakukan pengurugan pada Pelabuhan areal dimaksud.?
2. Siapakah pelaksana pembangunan jetty, pelaksana pembangunan dan pengurugan areal pelabuhan dimaksud.?
3. Kami bersyukur bahwa Pelabuhan dimaksud telah ada aktivitas kepelabuhanan, namun Apakah pijakan normative yang dipergunakan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam melakukan pembangunan dan kerja sama dengan pihak ketiga atas Pelabuhan dimaksud.?

Kedua, meminta penjelasan tentang upaya-upaya menanggulangi dampak kekeringan.

1. Langkah-langkah apakah yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam menghadapi musim kemarau yang berakibat pada kekeringan dan kesulitan air bagi warga Rembang.?
2. Langkah-langkah apa sajakah yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam mengantisipasi datangnya musim hujan yang tak lama lagi akan tiba yang sangat mungkin mengakibatkan banjir.?
3. Upaya-upaya apakah yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang terkait kemungkinan terulangnya kembali abrasi di wilayah pantai desa Blimbing Kecamatan Sluke dan wilayah lainnya seperti beberapa waktu lalu.?

Ketiga, meminta penjelasan tentang rencana Penyertaan Modal Rp.7.254.000.000,- (tujuh milyar dua ratus lima puluh empat juta rupiah).

1. Akan dipergunakan untuk penyertaan modal di bidang apa sajakah anggaran sebesar itu.?
2. Bagaimanakah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang mentaati amanat Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang mengatur tentang Investasi Daerah yang telah disyahkan beberapa waktu yang lalu.?

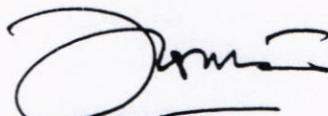
Demikian Pemandangan Umum Fraksi PDI Perjuangan dibuat, ada kurang lebihnya mohon maaf, atas tanggapan dan jawaban yang diberikan pada paripurna besok sebelumnya disampaikan banyak terima kasih .

Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh
MERDEKA...!!!

Rembang, 04 September 2012

FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

KETUA,


JASMANI



SEKRETARIS,


SUMARSIH

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

4 SEPTEMBER 2012



FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN REMBANG

PEMANDANGAN UMUM FRAKSI

TERHADAP

RAPERDA PERUBAHAN APBD T.A 2012

Dibacakan Oleh : MOH. NURHASAN

Yang Terhormat,

Saudaraku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Saudaraku Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Saudaraku Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Saudaraku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala

Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat Lingkungan Pemerintah Kab. Rembang.

Saudaraku Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD T.A 2012 dalam keadaan sehat.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswatun hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. *Aamin.*

Dalam kesempatan ini, kami juga menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri 1433 H, Minal Aidzin Walfaidzin, mohon maaf lahir. Semoga kita dapat dipertemukan lagi dengan bulan Ramadhan di tahun yang akan datang. *Aamin.*

Saudaraku Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, adalah kesempatan yang diberikan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21

tahun 2011, untuk melakukan penyesuaian alokasi anggaran agar lebih optimal. Pada kesempatan ini Fraksi Partai Amanat Nasional :

1. Kebijakan pemerintah tentang pencabutan subsidi BBM untuk kendaraan dinas, tentunya akan berkonsekuensi pada kenaikan Belanja. Hal ini perlu diakomodir agar kinerja Pemerintah Daerah masih tetap bisa berjalan dengan baik.
2. Kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 4.724.585.800,00 cukup signifikan. Kami mengharapkan dalam penetapan target PAD ini telah melalui kajian-kajian kuantitatif yang rasional.
3. Dalam mengalokasikan kegiatan-kegiatan baru, perlu dikaji skala prioritas berdasar kepentingan yang lebih besar dan keterdesakan waktu akan kegiatan tersebut.

Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pemandangan umum dari Fraksi Partai Amanat Nasional, semoga kita punya cukup waktu untuk membahas Raperda ini dan tentunya semangat bahwa APBD ini kita susun untuk sebesar-besarnya manfaa yang dirasakan masyarakat. Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 4 September 2012

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB. REMBANG

Ketua



JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE.



Sekretaris

MOH. IMAM ZARKASI

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2012**



REMBANG, 04 SEPTEMBER 2012

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2012**



REMBANG, 04 SEPTEMBER 2012



**FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194 Kode Pos 59251**

**PEMANDANGAN UMUM
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APBD
TAHUN ANGGARAN 2012**

Selasa , 04 September 2012

Dibacakan oleh : Dhian Rahweni Dewi SE

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Yang kami hormati Saudara BUPATI dan Saudara WAKIL BUPATI.

Yang kami hormati Saudara Pimpinan DPRD beserta seluruh anggota Dewan.

Yang kami hormati Forum Koordinasi Pimpinan Daerah.

Yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Yang kami hormati Saudara Staf Ahli Bupati, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, kepala Kantor, Kepala Bagian, Camat dan Hadirin yang berbahagia.

Mengawali penyampaian pandangan Umum Fraksi Bintang Keadilan terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 ini, kami tiada lupa mengajak kita semua senantiasa bersyukur kepada Alloh SWT atas segala limpahan nikmat dan karuniaNya sehingga sampai saat ini kita semua dapat melaksanakan tugas pengabdian kepada seluruh masyarakat Rembang bisa berjalan dengan baik. Tak lupa pula di bulan Syawal ini

kami mengucapkan **Taqobalallahu minna wa minkum, minal 'aidzin wal fa izin, mohon maaf lahir dan batin.** Dirgahayu HUT RI ke 67 dan HUT Rembang ke 271.

Hadirin sidang paripurna yang kami hormati

Terkait dengan Struktur APBD Perubahan 2012 FBK tidak banyak berkomentar mengingat Perubahan ini tidak bersifat Fundamental terhadap APBD induk 2012. FBK berharap terhadap proyeksi pendapatan **1,006T** dapat tercapai dan atas turunnya belanja pegawai serta kenaikan prosentase belanja langsung kami mengapresiasi. Namun FBK melihat ada beberapa Kinerja SKPD yang perlu diperbaiki dan lebih dipacu kinerjanya :

1.Masalah PDAM

Pelayanan PDAM khususnya menjelang kemarau panjang seperti halnya tahun ini sangat mengecewakan pelanggan.Semestinya hubungan antara management PDAM dengan masyarakat merupakan hubungan antara produsen dan konsumen yang saling menguntungkan. ketika kemarin PDAM menaikkan tarifnya dengan berat hati masyarakat rela untuk membayarnya. Akan tetapi ketika musim kemarau seperti saat ini yang gilirannya masyarakat membutuhkan air, berbulan – bulan PDAM tidak mengalirkan air meskipun Cuma setetes . ini adalah merupakan pemandangan yang sangat ironi. Apapun alasannya sebuah pemerintahan yang baik senantiasa memberikan pelayanan yang terbaik buat masyarakatnya.

2.BIDANG PENDIDIKAN

Terkait dengan Program Sekolah Gratis, sampai saat ini pelaksanaannya masih tidak sesuai harapan sebagian besar masyarakat, mengingat setiap pendaftaran penerimaan

siswa baru masih ditemukan berbagai macam pungutan, belum lagi tarikan siswa disana sini khususva pada jenjang pendidikan dasar padahal pendidikan dasar sudah mendapatkan bantuan BOS yang seharusnya sudah bisa mengcover biaya Operasional sekolah .Jika hal tersebut masih berlanjut, FBK berharap Diknas untuk melakukan tindakan tegas bagi Kepala Sekolah yang melakukannya dan kekedanan anakah tidak sebaiknya APBD yang semula untuk mensubsidi sekolah gratis pada jenjang tingkat dasar dialihkan ke jenjang sekolah menengah ?

3.BIDANG PERTANIAN

Terkait dengan keresahan petani tembakau di Rembang pada tahun ini

Terjadi dikarenakan beberapa hal :

- 1.Tidak adanya MOU antara perusahaan, mitra petani dengan petani yang terkait dengan Kualitas tembakau dan harga.
- 2.Tidak adanya standartisasi kualitas dan harga tembakau sehingga tidak ada parameter yang baku. Bagaimana pemerintah mengatasi permasalahan petani tembakau tahun 2012 ini ?

4. Bidang Kamtibmas

FBK mendapatkan laporan adanya keresahan sebagian masyarakat atas maraknya **warung-warung remang-remang** di sepanjang jalur pantura, mulai dari Kali untu, Dorokandang dan yang lebih memprihatinkan lagi di senutar SMPN 2 Lasem. Untuk itu kami berharan agar upaya penertiban lintas sektoral yang sudah dilaksanakan lebih dioptimalkan lagi sehingga akses negatifnya dapat dikurangi secara signifikan.

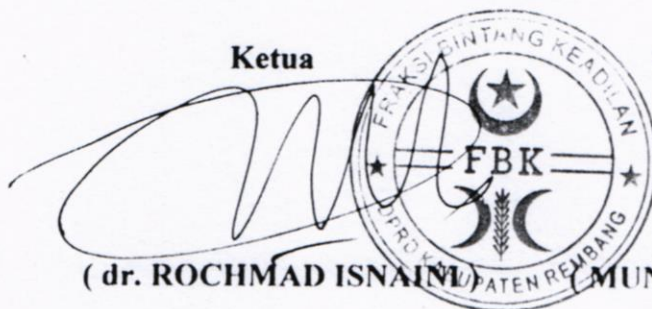
Demikian Pandangan Umum Fraksi Bintang Keadilan terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang TA 2012 yang kami sampaikan, yang selanjutnya akan kami cermati dalam setiap pembahasan. Sekian dan terima kasih.

WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Rembang, 04 September 2012

**FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Ketua



(dr. ROCHMAD ISNAINI)

Sekretaris

(MUNTUHOHID, SH)

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD III KABUPATEN REMBANG

MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

Hari : RABU
Tanggal : 05 September 2012
Waktu : Pkl. 09.30 WIB.
Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan;
2. Laporan Ketua Panitia Khusus Pembahas Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
3. Pengesahan Hasil Pembahasan Panitia Khusus tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
4. Penyampaian Jawaban Bupati Rembang atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012.
5. Penutupan.

IV. **PIMPINAN RAPAT**

1. Nama : **Ir. H. SUNARTO**
2. Jabatan : Ketua DPRD Kabupaten Rembang

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : Drs. **ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 6 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 7 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 4 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 4 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 2 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 33 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 2 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 1 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 3 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 3 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 3 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: - orang
Jumlah	: 12 orang

JALANNYA RAPAT

PIMPINAN RAPAT : (Ir. H. SUNARTO)

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Ketua Pengadilan Negeri Rembang.
Yang saya hormati	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang.
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu.

Sebagai hamba Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pemurah terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadliratNya atas segala kenikmatan,

kerohmatan serta hidayahnya, sehingga kita dapat melaksanakan tugas sampai dengan hari ini sebagaimana yang telah diamanahkan kepada pundak kita masing-masing sehingga kita harus bertanggungjawab terhadap amanah tersebut. Selanjutnya kita memanjatkan do'a dan syukur, semoga setiap aktifitas dan langkah kita sehari-hari selalu dalam lindungan dan ridlo Allah SWT. Amiin.

Rapat Dewan yang terhormat.

Menindaklanjuti hasil Rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang tanggal 29 Agustus 2012, sebagaimana Rapat Paripurna I (pertama) dan II (kedua) yang telah kita laksanakan hari Senin dan Selasa kemarin, bahwa Rapat Paripurna hari ini adalah merupakan Rapat Paripurna III (ketiga) sebagai lanjutan dalam membahas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Menurut Catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD Kabupaten Rembang bahwa dari jumlah anggota DPRD sebanyak 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir sebanyak 33 orang. Oleh karena menurut ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan Tata Tertib DPRD dijelaskan bahwa Rapat Paripurna DPRD untuk membahas Rancangan Peraturan Daerah dinyatakan sah apabila dihadiri secara fisik oleh sekurang-kurangnya $\frac{2}{3}$ dari jumlah anggota DPRD, maka dengan demikian Rapat Paripurna hari ini telah memenuhi kuorum.

Selanjutnya dengan mengucapkan “ **Bismillahirrohmanirrohim**” tepat pukul 11.15 WIB Rapat Paripurna hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(Ketuk palu 3 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebelum memasuki acara yang pokok, terlebih dahulu akan saya sampaikan acara yang akan berlangsung pada Rapat Paripurna hari ini, disamping Penyampaian Jawaban Bupati atas Pemandangan Umum Fraksi, terlebih dahulu akan dilaksanakan Penyampaian Laporan Panitia Khusus Pembahas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah melaksanakan tugasnya, sekaligus pengesahan terhadap Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD dimaksud. Sehingga dengan demikian maka susunan selengkapnyanya acara hari ini adalah sebagai berikut :

1. Pembukaan;
2. Laporan Ketua Panitia Khusus Pembahas Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
3. Pengesahan Hasil Pembahasan Panitia Khusus tentang Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
4. Penyampaian Jawaban Bupati Rembang atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012.
5. Penutupan.

Selanjutnya mari kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Ketua Panitia Khusus Pembahas Perubahan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Kepada Saudara Ketua Panitia Khusus Pembahas Perubahan tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang dipersilakan.

==LAPORAN KETUA PANSUS PEMBAHAS TATIB DPRD==

(dr. Rochmad Isnaini Ketua Pansus Teks Terlampir)

Terima kasih kepada Saudara dr. Rochmad Isnaini selaku Ketua Pansus yang telah membacakan laporannya.

Rapat Dewan yang terhormat.

Berikutnya marilah kita lanjutkan acara Rapat Paripurna hari ini menginjak acara yang ketiga, yaitu pengambilan keputusan untuk mengesahkan Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang hasil pembahasan yang telah dilaksanakan oleh Panitia Khusus sebagaimana dilaporkan oleh Ketua Pansus tadi.

Untuk itu saya sampaikan kepada seluruh Anggota DPRD Kabupaten Rembang yang hadir saat ini :

▪ **INTERUPSI**

Joko Suprihadi, SH (FBK)

Pada pasal 50 angka 4 huruf c pada angka 4 fotocopy yang saya terima Badan Penanggulangan Bencana sementara yang dibacakan ketua Pansus Badan Penanggulangan Bencana Daerah, ini yang betul yang mana? Sebelum disahkan !

▪ **JAWABAN KETUA PANSUS (dr. Rochmad Isnaini)**

Maaf Ketua, kemarin ada koreksi pengetikan jadi yang sah yang tadi saya bacakan.

▪ **JAWABAN PIMPINAN RAPAT (Ir. H. Sunarto)**

Terima kasih atas koreksi yang telah disampaikan oleh Pak Joko, tadi sudah dijawab oleh Pak dr. Rochmad Isnaini bahwa yang betul adalah yang tadi dibacakan oleh ketua Pansus

“ Apakah Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang fotocopynya telah berada pada tangan saudara dapat disetujui ? ”

==SETUJUUUUU !!!!!==

(Ketuk palu 1 kali)

Terima kasih.

Dengan demikian Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang hasil kerja Panitia Khusus Pembahas Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang yang baru saja disahkan. Semoga Perubahan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah disahkan dapat mewadahi dan menampung hak dan kewajiban Anggota DPRD Kabupaten Rembang sesuai dengan keadaan saat ini dan yang akan datang.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Marilah kita lanjutkan dengan acara pokok Rapat Paripurna hari ini, yaitu Penyampaian Jawaban Bupati Rembang atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012. Untuk itu saya mohon hadirin agar berkonsentrasi sejenak untuk turut mendengarkan dan mencermati jawaban Bupati yang akan disampaikan sehingga semuanya lebih bisa memahami arah dan tujuan serta penjelasan-penjelasan yang terkandung dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012, yang nantinya akan dibahas dan diperdalam oleh Komisi-Komisi DPRD yang membidangi bersama SKPD terkait sebelum disepakati oleh Badan Anggaran DPRD bersama TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang dan disahkan dalam Rapat Paripurna mendatang.

Selanjutnya kepada Saudara Bupati Rembang dipersilakan .

== PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI REMBANG ==

(dibacakan oleh H. Moch. Salim Bupati Rembang Teks terlampi)

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan Jawaban atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2012.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Sebelum acara Rapat Paripurna hari ini saya akhiri, terlebih dahulu saya sampaikan kepada rekan-rekan anggota Komisi untuk menindak lanjuti pembahasan Raperda ini pada rapat-rapat Komisi bersama SKPD terkait secara intensif sesuai jadwal yang telah ditentukan. Dengan demikian diharapkan kesimpulan hasil pembahasan komisi dapat mencapai sasaran yang selanjutnya hasil pembahasan tersebut dapat digunakan sebagai bahan acuan Rapat Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rembang terhadap Perubahan APBD 2012 Kabupaten Rembang yang hasilnya akan dilaporkan / disampaikan pada Rapat Paripurna IV (keempat) DPRD mendatang yang direncanakan akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 18 September 2012 yang akan datang . Untuk itu, dengan waktu yang relatif singkat saya minta kepada Komisi A,B,C dan D agar dapat memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya.

Peserta Rapat dan hadirin yang berbahagia.

Atas nama Pimpinan DPRD saya ucapkan selamat bekerja dan mengharap agar proses pembahasan nanti dapat menyelaraskan antara kebutuhan pembangunan, pelayanan kepada masyarakat dan pengaturan terhadap kepentingan pemerintah daerah dengan ketersediaan sumber dana yang dimiliki, sehingga Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012 dapat dipergunakan secara efektif dan efisien agar

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Rembang dapat tercapai.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Sehubungan dengan acara Rapat Paripurna hari ini telah sampai pada penghujung acara maka tak lupa saya sampaikan terima kasih atas perhatian dan kehadirannya, mohon maaf segala kekurangannya.

Dengan demikian dengan mengucapkan “**Alhamdulillahirobbil ‘alamin**” tepat pukul 12.10 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan ditutup.

(Ketuk palu 3 kali)

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA



Ir. H. SUNARTO

SEKRETARIS



Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (III) DPRD KABUPATEN REMBANG TENTANG MEMBAHAS MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

- LAMPIRAN I : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum koordinasi Pimpinan Daerah, SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN II : Laporan Ketua Pansus tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kab. Rembang;
- LAMPIRAN III : Keputusan DPRD Kab. Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
- LAMPIRAN IV : Penyampaian Jawaban Bupati Rembang atas Pemandangan Umum Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun T.A 2012.

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA III
PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP KAPERDA PERUBAHAN APBD 2012**

HARI / TANGGAL : RABU, 05 SEPTEMBER 2012
JAM : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	1	
2	H. HARNO, SE	Anggota	2	
3	GUNASIH, SE	Anggota	3	
4	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	4	
5	Hj. HEKMAH PURNAMAWATI	Anggota	5	
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota	6	
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota	7	
8	ISLAHUDDIN	Anggota	8	
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	9	
10	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota	10	
11	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	11	
12	GATOT PAERAN, SH, MSI	Anggota	12	
13	SRI REJEKI, SH	Anggota	13	
14	H. ISMARI	Anggota	14	
15	DJOKO SOESILLO	Anggota	15	
16	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	16	
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>				
17	K. H. MAJID KAMIL MZ	Wakil Ketua	17	
18	SA'DULLAH	Anggota	18	
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	19	
20	H. HAKAM, SH	Anggota	20	
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	21	
22	KODRIVAIL, S.Pd	Anggota	22	
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	23	
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua	24	
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd	Anggota	25	
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	26	
27	PUJI SANTOSO, SP	Anggota	27	
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	28	
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	29	
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	30	

- Keterangan :
- 1 I : Ijin
 - 2 S : Sakit
 - 3 C : Cuti
 - 4 DL : Dinas Luar

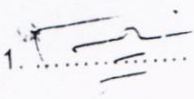
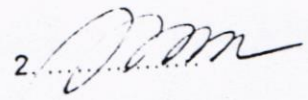
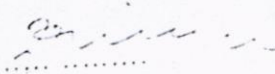
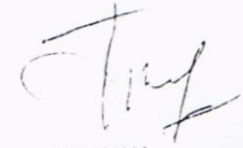
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KABUPATEN REMBANG
 Ketua
 H. H. SUNARTO

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
31	FRAKSI PDI Perjuangan	Anggota	31	
32	RIDWAN, SH	Anggota	32	
33	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	33	
34	SUPRIHADI	Anggota	34	
35	JASMANI	Anggota	35	
36	SUMARSHI	Anggota	36	
36	FRAKSI AMANAT NASIONAL	Anggota	36	
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
41	FRAKSI BINTANG KADILAN	Anggota	41	
41	DR. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	IDHAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

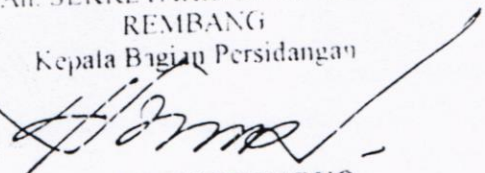
DAFTAR HADIR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD 2012

HARI / TANGGAL : RABU, 05 SEPTEMBER 2012
PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM		1. 
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2. 
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3. 
4.		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5.		Dandim 0720 Rembang	5.
6.	IGEDE ARDA	Kepolisian Resort Rembang	6. 
7.		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8.		Kepolisian Negeri Rembang	8.

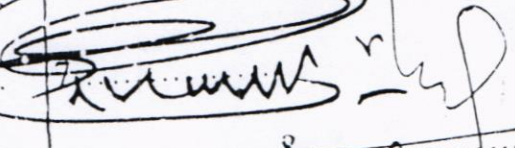
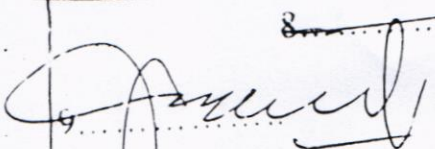
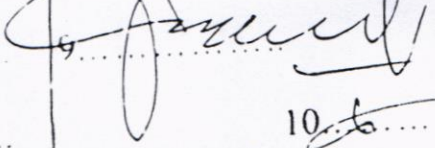
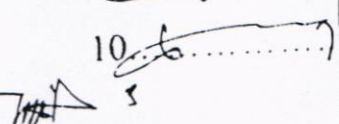
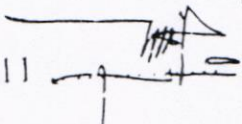
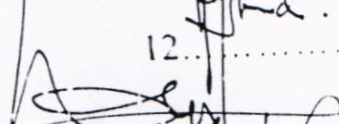


An. SEKRETARIS DPRD KAB.
REMBANG
Kepala Bagian Persidangan

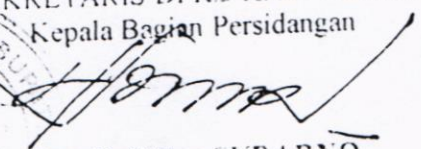

Drs. YULIUS SUDARNO
NIP. 19570711 198603 1 004

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI
TERHADAP RAPERDA PERUBAHAN APBD 2012

HARI / TANGGAL : RABU, 05 SEPTEMBER 2012
PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Camat Rembang	H. Agus Achm	1. 
2	Camat Kaliori	MUSTHOUF	2. 
3	Camat Sumber	JAENIKAW	3. 
4	Camat Sulang	SUKISSUTARTO	4. 
5	Camat Bulu	Fajri Riza DS	5. 
6	Camat Pamotan	Teguh, G.	6. 
7	Camat Gunem	SUNARTO	7. 
8	Camat Sale	ISMANTO	8. 
9	Camat Lasem	Maryosa	9. 
10	Camat Pancur	SUSANTORO	10. 
11	Camat Sedan	MARDIYANTO	11. 
12	Camat Sluke	Eddy Kurnanto	12. 
13	Camat Kragan	Akh Samde	13. 
14	Camat Sarang		14. 

An. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Kepala Bagian Persidangan


Drs. YULIUS SUARDONO
NIP. 19570711 198603 1 004

DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA III DPRD KABUPATEN REMBANG
PENYAMPAIAN JAWABAN BUPATI ATAS PEMANDANGAN IJUM FRAKSI
TERHADAP PAPERDA PERUBAHAN APBD 2012

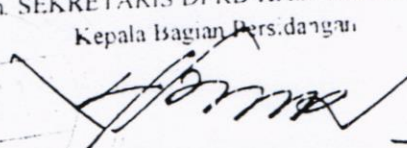
HARI / TANGGAL : RABU, 05 SEPTEMBER 2012
 WUKU : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI	M. Subhan	JAB	1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA	Subandi	AS I	5
6	ASISTEN II SEKDA	Surya	AS II	6
7	ASISTEN III SEKDA	A. Satrio	AS III	7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Susanto	Kabag.	8
9	BAG. HUKUM	Eddy Dolo P.	Kep. Hukum	9
10	BAG. HUMAS	M. Daman		10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN			11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN	Rifardar		12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT	Abdullah		13
14	BAG. ADM. KEUANGAN			14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	Tri Kurni	Kep. Lemm	15
16	BAG. UMUM	Djennari	Kab. Lemm	16
17	DPPKAD	SUCIPTONO	DEPUTI	17
18	INSPEKTORAT	Doko P.	SEKRETARIS	18
19	BAPPEDA	Hari	Ka	19
20	BPMPKB	Djennari	sekr.	20
21	BKD	Suparman	Ka. P. K.	21
22	BKP & P4K	Wartono	Ka	22
23	BPBD	Susanto	Ka	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	M. W. Oke	Ka.	24
25	DINAS KESEHATAN			25
26	DINAS PENDIDIKAN	Djennari	Kab. Lemm	26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM	FX. Sidiq	sekr.	27
28	DINTANHUT	Nurhidayah	sekr.	28
29	DINLUTKAN	Suparman	Kab. Lemm	29
30	DINHUBKOMINFO	Surya	Ka. Lemm	30
31	DINAS DUKCAPIL	M. W. Oke	sekr.	31
32	DINSOSNAKERTANS	H. W. W. W.	Kab. Lemm	32
33	DINBUDPARFORA	M. Effendi	Kab. Lemm	33
34	DINAS ENERGI & SDM	KEUS. SUPRIATNO	Ka	34
35	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	P. W. Oke	Ka	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	Kantor	Kab. Lemm	36
37	KANTOR PERPUST & ARSIF	Gusman	Sub. Bag. TI	37
38	KANTOR PPT	Sri Sugiyanto	Ka. PPT	38

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	A. KH. ILLAH.	R. PR. Pontre	39
40	RSUD dr. R. SUTRASNO	Subyoyo NH	Hubg in RSV	40
41	SATPOL PP	Slamet Riyadi	Lusat PP	41
42	TIM PKK KAB REMBANG	My. Subyoyo NH	Hubg Hublang	42
43	P D A M	Rachmad Spdadi		43
44	PERCETAKAN DAERAH	Kusbarun.		44
45	PD. BANK PASAR			45
46	BPD JATENG CAB. REMBANG			46
47	BRI CAB. REMBANG			47
48	BKK LASEM			48
49	BKK KALIORI			49
50	R B S J	Nuruk Anandon		50
51	B P N KAB. REMBANG			51
52	BPS KAB. REMBANG	Lane Fandi R.	- GEL 1215	52
53	DIPENDA PROPINSI/ UP3AD	Teguh	Ka TL	53
54	KANTOR POS DAN GIRO			54
55	RUMAH TAHANAN			55
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN			56
57	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			57
58	KANTOR PERHUTANI SPH IV			58
59	KPU KAB. REMBANG			59
60	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			60
61	PANWASLU KAB. REMBANG			61
62	TELKOM REMBANG			62
63	PLN CAB. REMBANG			63
64	Pura BA	Eka Lanana		64
65	STIE YPPI	R. Shun		65
66	Supriyo Utan DKK	Supriyo Utan	Cebret	66
67	Staf ahli FRG	A. W. S. S. S.		67
68	Staf ahli *BK	Ilme OKINIA		68
69				69
70				70
71				71
72				72
73				73
74				74
75				75
76				76
77				77
78				78
79				79
80				80
81				81
82				82

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100

An. SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
Kepala Bagian Persidangan


Drs. YULIUS SUDARNO

NIP 19570711 198603 1 004



LAPORAN PANSUS



TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KAB.
REMBANG NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG
TATA TERTIB DPRD KAB. REMBANG**

**DPRD KABUPATEN REMBANG
JL. P. DIPONEGORO NO: 88 REMBANG**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**
Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

L A P O R A N

**PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN REMBANG
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DPRD KABUPATEN REMBANG NOMOR 01
TAHUN 2010 TENTANG TATA TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG**

A. DASAR :

Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dibentuk dan melaksanakan tugas berdasarkan pada :

1. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.
2. Keputusan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang Membahas Rancangan Peraturan DPRD kabupaten Rembang tentang Perubahan Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD kabupaten, dengan susunan Keanggotaan Panitia Khusus sebagai berikut :

- dr. ROCHMAD ISNAINI
- SA'DULLAH
- ISLAHUDDIN
- IMRO'ATUS SOLICHAH, SE
- H. ISMARI
- CHAIRUL ANWAR.S.Sos
- SUCI RAHAYU.SH
- H. MURSYID. ST
- SULISTYO WETI ARIANI
- MUHAMMAD ASNAWI.S.Pdi
- PUJI SANTOSO.SP
- H.NOOR HASAN.SH
- SUMARSIH
- ACHMAD MASKUR RUKHANI
- JIHAD ASIA PUSTAKAWAN.SE
- SUKARMAIN
- MUNTHOHID,SH
- GUNASIH SE

**KETUA
WK.KETUA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA
ANGGOTA**

B. PELAKSANAAN PEMBAHASAN

Panitia Khusus sesuai jadwal Badan Musyawarah DPRD melaksanakan pembahasan sebagai berikut :

1. Rapat internal Panitia Khusus pada tanggal 30 Juli 2012.
2. Rapat internal Panitia Khusus pada tanggal 31 Juli 2012.
3. Rapat internal Panitia Khusus pada tanggal 08 Agustus 2012.

C. HASIL PEMBAHASAN :

Dari pembahasan-pembahasan tersebut, Panitia Khusus menyepakati dan menyimpulkan dengan penyempurnaan-penyempurnaan Tata Tertib DPRD Kab. Rembang sebagai berikut:

❖ Pada Pasal 1 ada penambahan poin 13, sehingga berbunyi:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD
5. Kepala Daerah adalah Bupati Rembang
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Rembang
7. Bupati adalah Bupati Rembang
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang
9. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Rembang
11. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
13. Awal Tahun Anggaran adalah bulan Januari.

❖ Pada Pasal 47, ada Penambahan ayat (6), yang berbunyi :

Penempatan Anggota DPRD dalam Badan Musyawarah didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan pergantian pada setiap awal tahun anggaran.

❖ Pada pasal 50 ayat (3) ada Perubahan dan Penambahan :

- a. Pada huruf a, ada Perubahan Kantor Lingkungan Hidup menjadi badan Lingkungan Hidup.
- b. Pada huruf c, ada Penambahan poin 4), Komisi C, bidang Pembangunan meliputi:
 - 1) Bagian Administrasi Pembangunan Setda;
 - 2) Dinas Pekerjaan Umum;
 - 3) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; dan
 - 4) Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

❖ Pada Pasal 75 ada Perubahan Waktu dan hari Kerja DPRD sehingga berbunyi sebagai berikut :

- a. Hari Senin – Kamis : pukul 09.00 – 14.00 WIB;
Hari Jumat : pukul 09.00 – 11.00 WIB;

- b. Kegiatan yang dilaksanakan diluar ketentuan ayat (1) diputuskan dalam Rapat Konsultasi

Secara keseluruhan, hasil pembahasan tertuang dalam Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang sebagaimana fotocopy yang berada di tangan Saudara Anggota DPRD semuanya.

D. KESIMPULAN

Dari hasil pembahasan Tata Tertib DPRD Kab. Rembang, Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dapat menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan DPRD kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

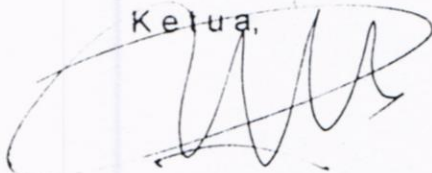
E. PENUTUP.

Demikian Laporan Panitia Khusus DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang selanjutnya sebagai bahan pertimbangan Persetujuan DPRD pada Rapat Paripurna DPRD tanggal 05 September 2012.

Rembang, 08 Agustus 2012

PANITIA KHUSUS DPRD KABUPATEN REMBANG

Ketua,



dr. ROCHMAD ISNAINI

Wakil Ketua,



SA'DULLAH



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 01 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG NOMOR 01 TAHUN 2010 TENTANG TATA TERTIB TERTIB DPRD KABUPATEN REMBANG

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang: a. Bahwa beberapa ketentuan Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang ada dipandang tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada maka perlu diadakan perubahan dan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada huruf a, perlu melakukan perubahan yang ditetapkan dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat: 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;
3. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
6. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan: Hasil Rapat Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

: Peraturan DPRD Kabupaten Rembang tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 1.

Dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah .
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .
4. Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD .
5. Kepala Daerah adalah Bupati Rembang.
6. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Rembang.
7. Bupati adalah Bupati Rembang.
8. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Rembang.
10. Pengadilan Negeri adalah Pengadilan Negeri Rembang.
11. Komisi Pemilihan Umum yang disingkat KPU adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rembang .
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang.
13. Fraksi adalah pengelompokan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang mencerminkan konfigurasi partai politik di Kabupaten Rembang.

14. Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
15. Badan Musyawarah adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
16. Badan Anggaran adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
17. Badan Legislasi Daerah adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten Rembang.
18. Komisi adalah alat kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang bersifat tetap dan dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
19. Tata tertib adalah Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang berfungsi untuk memperjelas tugas dalam mengatur mekanisme kerja anggota DPRD yang ditetapkan oleh dan untuk kepentingan intern anggota.
20. Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Kode Etik adalah norma yang wajib dipatuhi oleh anggota DPRD selama menjalankan tugasnya untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas.
21. Awal Tahun Anggaran adalah bulan Januari.

2. Ketentuan Pasal 47 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

- (1) Badan Musyawarah merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD.
- (2) Jumlah anggota Badan Musyawarah terdiri dari unsur-unsur fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggota dengan menggunakan bilangan pembagi 2,5 (dua setengah) dari tiap-tiap fraksi.
- (3) Susunan keanggotaan Badan Anggaran ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya pimpinan DPRD, Komisi, Badan Anggaran dan Fraksi.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah pimpinan Badan Musyawarah merangkap anggota.
- (5) Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah sekretaris Badan Musyawarah dan bukan sebagai anggota.
- (6) Penempatan anggota DPRD dalam Badan Musyawarah didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan pergantian pada setiap awal Tahun Anggaran.

3. Ketentuan Pasal 50 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 50

- (1) Komisi DPRD Kabupaten Rembang meliputi :

Komisi A	: Bidang Hukum dan Pemerintahan;
Komisi B	: Bidang Ekonomi dan Keuangan;
Komisi C	: Bidang Pembangunan ;

Komisi D : Bidang Kemasyarakatan .

(2) Komisi-komisi dalam pelaksanaan tugas didasarkan atas kompetensinya.

(3) Pembidangan komisi meliputi :

a. Komisi A. bidang Hukum dan Pemerintahan meliputi :

1. Bupati dan Wakil Bupati ;
2. Sekretariat DPRD ;
3. Sekretariat Daerah ;
4. Bagian Tata Pemerintahan Setda ;
5. Bagian Hukum Setda ;
6. Bagian Umum Setda ;
7. Bagian Hubungan Masyarakat Setda ;
8. Bagian Organisasi dan Kepegawaian Setda ;
9. Bagian Kepegawaian Daerah ;
10. Dinas Perhubungan , Komunikasi dan Informatika ;
11. Inspektorat ;
12. Kantor Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat ;
13. Satpol PP ;
14. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil ;
15. Kecamatan/Kelurahan /Desa ; dan
16. Badan Lingkungan Hidup .

b. Komisi B bidang Ekonomi dan Keuangan meliputi :

1. Bagian Administrasi Perekonomian Setda ;
2. Bagian Administrasi Keuangan Setda ;
3. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah ;
4. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah ;
5. Dinas Pertanian dan Kehutanan ;
6. Dinas Kelautan dan Perikanan ;
7. Badan Ketahanan Pangan dan Pelaksanaan Penyaluran Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ;
8. Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu ;
9. Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral ; dan
10. BUMD .

c. Komisi C . bidang Pembangunan meliputi :

1. Bagian Administrasi Pembangunan Setda ;
2. Dinas Pekerjaan Umum ;
3. Badan Perencana Pembangunan Daerah ; dan
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

d. Komisi D bidang Kemasyarakatan meliputi :

1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda ;
2. Dinas Pendidikan ;
3. BLUD RSUD dr. R. Sutrasno ;
4. Dinas Kesehatan ;
5. Badan Pemberdayaan Masyarakat , Perempuan dan Keluarga Berencana ;
6. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi ;
7. Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda dan Olahraga ; dan
8. Kantor Perpustakaan dan Arsip .

4. Ketentuan Pasal 75 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 75

(1). Waktu dan Hari Kerja DPRD ditetapkan :

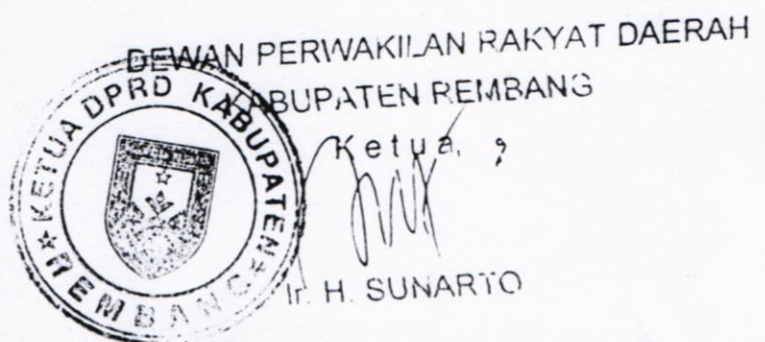
- a. Hari Senin - Kamis : Pukul 09.00 - 14.00 WIB
- b. Hari Jumat : Pukul 09.00 - 11.00 WIB

(2). Kegiatan yang dilaksanakan di luar ketentuan ayat (1) diputuskan dalam Rapat Konsultasi .

Pasal II

Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
Pada tanggal 05 September 2012





JAWABAN BUPATI REMBANG

**ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI
DPRD KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS
PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG**



TAHUN ANGGARAN 2012



**JAWABAN BUPATI REMBANG
ATAS PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD
KABUPATEN REMBANG
DALAM RANGKA MEMBAHAS PENGANTAR NOTA KEUANGAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang terhormat :

- Saudara Ketua, Para Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang,
- Rekan-rekan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang,
- Saudara Wakil Bupati Rembang,
- Tamu undangan yang kami hormati, tokoh masyarakat, wartawan dan segenap jajaran eksekutif yang berbahagia.

Mengawali jawaban Saya atas Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012, terlebih dahulu marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Allah, SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga kita masih diberi nikmat, kesehatan dan kebahagiaan.

Berkenaan dengan pertanyaan, saran, pendapat dan catatan yang disampaikan dalam Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang, dapat saya jelaskan sebagai berikut :

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	I. FRAKSI DEMOKRAT	
1.	Dimusim kemarau ini banyak terjadi kebakaran yang melanda beberapa rumah dan wilayah perkebunan di Kabupaten Rembang.	1. Kami sepakat bahwa mutu penanganan dan kecepatan mobilisasi pemadam kebakaran untuk selalu ditingkatkan dan Pelayanan pemadam kebakaran telah menyediakan kontak langsung termasuk sarana dan prasarana dan telah diketahui sebagian besar masyarakat, sehingga setiap informasi kejadian kebakaran, semua layanan dan peralatan yang ada segera kelokasi kejadian, guna mengatasi bencana kebakaran.
2.	PDAM dapat mencari terobosan – terobosan dan mengatur sebaik-baiknya sumber air yang telah diolah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pelanggan.	2. PDAM Kabupaten Rembang telah berupaya mencari sumber air baku dan mengoptimalkan pemanfaatan sumber-sumber air baku yang ada.
3.	Kami harapkan pemerintah daerah bisa mengamankan aset-aset daerah khususnya aset yang berkaitan dengan bekas-bekas pasar.	3. Aset eks Pasar yang masih belum termanfaatkan akan lakukan optimalisasi sesuai dengan bentuk dan peruntukannya, dengan menggandeng Pihak Ketiga dalam bentuk Sewa, Kelola Bersama, Bangun Guna Serah, Bangun Serah Guna. Dalam hal ini tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4.	Berkaitan dengan infrastruktur khususnya jalan-jalan banyak yang rusak parah. Berkaitan dengan hal tersebut kami mengharapkan pemerintah daerah dapat segera memperbaikinya. (Sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi PPP dan Fraksi PKB)	4. Kerusakan jalan akan ditangani perbaikannya pada Perubahan APBD Tahun 2012 melalui penganggaran pemeliharaan rutin jalan Kabupaten Rembang. Direncanakan pada Rancangan APBD Tahun anggaran 2013 penanganan jalan diprioritaskan pada peningkatan jalan yang menghubungkan antar pusat kegiatan ekonomi, pertanian, perdagangan, dan pertambangan serta ruas-ruas jalan yang terkena bencana alam.
5.	Untuk pemerintah agar memperhatikan kebersihan dilingkungan semua TPI di Kabupaten Rembang	5. Upaya-upaya yang telah dilakukan Pemerintah Kabupaten Rembang : 1. Melaksanakan kegiatan Jum'at bersih di lingkungan TPI 2. Memberikan tugas khusus kepada karyawan TPI untuk melakukan kebersihan rutin setiap hari 3. Melakukan penataan lingkungan yang meliputi drainase, pavingisasi secara bertahap 4. Menyediakan bak penampungan sampah sementara.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
6.	Terkait dengan Pelayanan Rumah Sakit Umum	a. Dari segi kuantitas pelayanan telah kami kembangkan: - membuka produk layanan baru yaitu klinik orthopedi dan rawat inap orthopedi - menambah frekuensi buka layanan klinik jiwa menjadi 4 kali sebulan atau setiap minggu yang sebelumnya adalah 2 minggu sekali b. Peningkatan kualitas pelayanan yang telah kami lakukan : - mempersiapkan akreditasi Rumah Sakit standar baru dengan target terakreditasi dengan predikat peripurna pada awal tahun 2013. - menambah jumlah dokter umum dan dokter spesialis c. menyelenggarakan pelatihan kompetensi baik internal maupun eksternal d. meningkatkan sarana prasarana Rumah Sakit
7	Untuk semua penambang memperhatikan lingkungan yang setelah ditambang agar melakukan penghijauan.	Sebagaimana diamanatkan Perda nomor 5 tahun 2011 tentang pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara, dengan prosedur dan tahapan sebagai berikut: a. Pada tahap awal, pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk membuat rencana reklamasi dan menyetor jaminan reklamasi. b. Pada tahap eksploitasi, pengelolaan lokasi harus dilakukan c. Pada pasca tambang reklamasi dilakukan dan dievaluasi oleh Dinas ESDM, sebagai jaminan untuk mencairkan jaminan reklamasi.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	II. FRAKSI GOLONGAN KARYA	
1.	Peningkatan PAD hampir 6 % dari Rp.89.947 M menjadi Rp.94.672 M. Dari PAD tersebut terdapat Pendapatan dari Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sebesar Rp.5.739 M. Apakah termasuk deviden dari PT. RBSJ serta keuntungan kapal "collecting Ship"?	1. a. Kenaikan PAD hampir 6% atau sebesar Rp.4.724.585.800,00 sudah termasuk penerimaan collecting ship sebesar Rp.80.000.000,00 yang sudah masuk dalam Tahun anggaran 2012. Untuk realisasi penerimaan dari PT.RBSJ sebesar Rp.262.578.300,00 belum kami masukan dalam Rancangan Perubahan APBD TA 2012 b. Kekayaan yang dipisahkan merupakan aset yang dikelola BUMD. Untuk collecting ship bukan merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan, saat ini dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang sehingga pendapatan dari collecting ship masuk dalam setoran pendapatan yang dikelola oleh Dinas Kelautan dan Perikanan.
2.	Perubahan konsumsi BBM kendaraan dinas dari premium ke pertamax, apakah menyebabkan peningkatan belanja peningkatan belanja yang signifikan dalam APBD. (Sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi PAN)	2. Pemerintah Kab. Rembang telah melakukan langkah efisiensi anggaran dengan cara : 1. Seluruh SKPD menyusun skala prioritas dan penghematan terkait kegiatan-kegiatan yang membutuhkan mobilisasi kendaraan Dinas. 2. Mengurangi Perjalanan Dinas Luar Daerah yang dapat diganti/diwakili dengan memanfaatkan teknologi lain seperti alat komunikasi elektronik yang dapat menggantikannya.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
3.	Tempat parkir yang ada di Sendangasri Lasem belum difungsikan	3. Pembangunan tempat parkir di Desa Sendangasri, pemba-ngunannya tahun 2012 baru selesai 100% tanggal 19 Agustus 2012 dan masih dalam masa pemeliharaan pihak rekaman selama 180 hari, apabila sudah diserahkan dari pihak rekaman maka akan segera dioperasikan sesuai peruntukannya.
4.	Optimalisasai GOR Mbesi dan BBS	4. Terkait dengan Optimalisasi Aset seperti kompleks GOR Mbesi dan BBS, Pemerintah daerah masih melakukan kajian-kajian strategis dan mengambil langkah-langkah optimalisasi pemanfaatannya dalam rangka peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik secara langsung atau tidak langsung, dalam hal ini pelaksanaannya tetap berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan perlu kami informasikan bahwa lingkungan GOR Mbesi telah kami tetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH)

NO.	PERTANYAAN/SARAN	JAWABAN
III. FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN		
1.	Sejauhmanakah pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2012?	Realisasi pelaksanaan kegiatan APBD Tahun 2012 sampai dengan akhir bulan Juli 2012 adalah sebagai berikut : 1. Jumlah kegiatan sebanyak : 1.494 kegiatan 2. Jumlah realiasi kegiatan : a. 100 % sebanyak 191 kegiatan b. 51 % s.d 99 % sebanyak 574 kegiatan c. 1 % s.d 50 % sebanyak 573 kegiatan d. 0 % sebanyak 156 kegiatan Kegiatan-kegiatan yang belum dilaksanakan pada umumnya, perencanaan pelaksanaannya pada triwulan III dan triwulan IV tahun 2012.
2.	Terkait dengan kenaikan tarif PDAM	Tahun 2012 PDAM Kabupaten Rembang tidak memberlakukan kenaikan tarif. Jika memberlakukan kenaikan tarif baru maka PDAM akan melakukan sosialisasi terlebih dahulu kepada pelanggan.
3.	Di bidang pendidikan yang merupakan salah satu program 4 pilar pembangunan, pemerintah Kabupaten Rembang menekankan pada peningkatan aksesibilitas pendidikan terutama pendidikan dasar dan menengah bagi masyarakat miskin.	Pemerintah Kabupaten Rembang akan terus berupaya meningkatkan akses layanan pendidikan bagi masyarakat Kabupaten Rembang terutama pada jenjang pendidikan menengah.

NO.	PERTANYAAN/SARAN		JAWABAN
4.	Saat ini kita berada dimusim kemarau, musim kering dimana-mana kekurangan air bersih.	4.	Upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang adalah : 1. Melaksanakan droping air bersih dimulai pada tanggal 16 Juli 2012 ; 2. Pemerintah Kabupaten Rembang mempersiapkan bantuan droping air bersih sebanyak 1.200 tangki ; 3. Mengajukan permohonan bantuan ke Gubernur melalui Bakorwil I Pati 550 tangki ; 4. Bantuan dari pihak swasta kurang lebih 50 tangki. Jadi jumlah yang disiapkan bantuan droping air bersih sebanyak 1.800 tangki.
5.	Terkait dengan E-KTP, sejauh mana pelaksanaannya ? (Sekaligus menjawab pertanyaan Fraksi PKB)	5.	Pelaksanaan Perekaman E-KTP sampai dengan tanggal 31 Agustus 2012 di telah selesai 11 Kecamatan yaitu Kecamatan Sumber, Bulu, Gunem, Sale, Sarang, Sedan, Pamotan, Sulang, Pancur dan Sluke, Kaliori, sehingga tinggal penyisiran bagi wajib KTP yang belum melaksanakan perekaman e-KTP. Adapun 3 Kecamatan (Rembang, Lasem dan Kragan) belum selesai penjadwalan di semua desa. Bagi Kecamatan yang belum selesai masih terus melaksanakan perekaman E-KTP. Bagi warga yang belum melakukan perekaman, pada saat ini baru dipersiapkan pencarian dengan menyandingkan data wajib KTP yang sudah melakukan perekaman dengan wajib KTP dari database SIAK.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
IV. FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA		
1.	Terdapat kenaikan PAD sebesar 4,7 milyar dan penurunan Dana Perimbangan sebesar 28,5 milyar, serta terjadinya kenaikan pada lain-lain pendapatan yang sah sebesar 10,3 milyar. Artinya terjadi penurunan anggaran pendapatan sebesar 13,5 milyar.	1. Perlu kami Koreksi, yang benar adalah penurunan penerimaan dana perimbangan sebesar Rp. 28.589.000,- dengan perincian sebagai berikut: a. Penurunan dana perimbangan : 1. Dana Bagi Hasil Provisi Sumber Daya Hutan Rp. 55.170.000,- 2. Dana Bagi Hasil Pungutan Hasil Perikanan Rp. 1.946.000,- Jumlah Penurunan Rp. 57.116.000,- b. Kenaikan dana Perimbangan : Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Rp. 28.527.000,- Jadi jumlah penurunan Dana Perimbangan sebesar Rp. 28.589.000,-
2.	Penambahan untuk JKRS juga disertakan cash flow yang telah menjadi tanggungan JKRS terhadap RSU atau Puskesmas sebagai bahan dasar untuk merumuskan kebijakan baru yang mungkin lahir atas program kesehatan ini.	2. Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang telah melakukan perhitungan untuk tahun anggaran 2012 sebesar Rp. 7.050.000.000,- sedangkan kebutuhan sampai dengan 31 Desember 2012 sebesar Rp. 8.331.000.000,- sehingga terjadi kekurangan sebesar Rp. 1.281.000.000,-. Sedangkan untuk membayar klaim yang belum terbayar tahun anggaran 2010, 2011, dan tahun anggaran 2013 mendatang telah kami rencanakan pengalokasian dana sebesar Rp. 11.384.000.000,-

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
3.	Dalam kondisi kemarau panjang yang melanda semua daerah di Jawa Tengah ini, apakah tambahan tempat parkir dan abrasi pantai (relatif terkendali karena) lebih memiliki skala prioritas dibandingkan dengan penanganan air bersih dan kerusakan lahan produktif.	3. Penganggaran program dan kegiatan telah kami sesuaikan dengan skala prioritas, sedangkan penanganan kebutuhan air bersih dan penanggulangan kerusakan lahan produktif telah dianggarkan dalam APBD tahun anggaran 2012.

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	V. FRAKSI PDI PERJUANGAN	
1.	Penjelasan tentang Pelabuhan Tanjung Bonang Kecamatan Sluke a. Darimanakah sumber dana yang digunakan untuk membangun jetty dan yang melakukan pengerukan di wilayah tersebut? b. Siapakah pelaksana pembangunan jetty, pelaksana pembangunan dan pengurukan areal pelabuhan dimaksud? c. Apakah pijakan normatif yang dipergunakan sebagai landasan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang dalam melakukan pembangunan dan kerja sama dengan pihak ketiga atas pelabuhan dimaksud?	a. Sumber dana APBN tahun anggaran 2010, tahun 2011, tahun 2012 jumlah anggaran seluruhnya <u>±</u> Rp.45 M. <u>—</u> Yang melakukan penggarukan / reklamasi adalah pihak swasta ✓ b. 1. Pelaksana pembangunan jetty adalah PT. LINGGAR JATI PERKASA SURABAYA. 2. Yang melakukan reklamasi pada area pelabuhan berdasar Keputusan Menteri Perhubungan, Nomor: KP 586 Tahun 2012 bekerjasama dengan pihak swasta adalah : Badan Usaha Pelabuhan (BUP) Rembang yaitu PT. PELABUHAN REMBANG KENCANA (PT.PRK) c. 1. Undang –Undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran 2. Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan. 3. Peraturan Pemerintah No. 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian 4. Peraturan Menteri Perhubungan No.PM 52 Tahun 2011 tentang Pengerukan dan Reklamasi
2.	Penjelasan tentang upaya-upaya menanggulangi dampak kekeringan a. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang	a. Langkah-langkah apa yang dilakukan Pemerintah untuk kekeringan: - Penataan embung - Reboisasi - Bantuan Air Bersih - Pembuatan sumur pantek

No	PERTANYAAN	JAWABAN
	b. Langkah-langkah apa sajakah yang direncanakan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang dalam mengantisipasi datangnya musim hujan yang tak lama lagi akan tiba yang sangat mungkin mengakibatkan banjir? c. Upaya-upaya apakah yang direncanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang terkait kemungkinan terulangnya kembali abrasi di wilayah pantai desa Blimbing Kecamatan Sluke dan Wilayah lainnya seperti beberapa waktu lalu?	b. Persiapan yang dilakukan untuk menghadapi musim penghujan khususnya banjir: - Normalisasi Sungai - Pembuatan grow in di muara sungai c. Untuk mengurangi bencana terkait kehidupan dan penghidupan masyarakat di pinggir pantai. Abrasi pantai telah ditangani oleh Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juwana, namun kalau kejadian abrasi bisa mengkhawatirkan dan menimbulkan bencana akan ditangani secara darurat. ✓
3.	Penjelasan tentang rencana penyertaan modal sebesar Rp. 7.254.000.000,00 a. Akan dipergunakan untuk penyertaan modal di bidang apa sajakah anggaran sebesar itu? a. Bagaimanakah Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang mentaati amanat Peraturan Daerah Kabupaten Rembang yang mengatur tentang investasi daerah yang telah disyahkan beberapa waktu yang lalu?	3. Penyertaan modal dalam APBD Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.5.000.000.000,00 sedangkan dalam rancangan perubahan APBD bertambah sebesar Rp.2.254.000.000,00 a. Dalam APBD Tahun 2012 dipergunakan : PDAM sebesar Rp. 3.000.000.000,00 PD.BPR Bank Pasar Rp.1.000.000.000,00 PT. Bank Jateng Rp.1.000.000.000,00 Dalam Rancangan Perubahan APBD Tahun 2012 penyertaan modal pada PT. Bank Jateng Rp. 2.254.000.000,00 b. Penyertaan modal tersebut telah sesuai dengan Perda Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Penyertaan Modal.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
	VI. FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL	
1.	Kenaikan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp. 4.724.585.800,00 cukup signifikan. Kami mengharapkan dalam penetapan target PAD ini telah melalui kajian-kajian kuantitatif yang rasional.	1. Perlu kami sampaikan bahwa dalam penyusunan APBD Perubahan tahun anggaran 2012 khususnya untuk kenaikan PAD sebesar Rp. 4.724.585.800,00 sudah kami hitung secara rinci sesuai dengan potensi yang ada sehingga diharapkan kenaikan tersebut benar-benar bisa tercapai.
2.	Dalam mengalokasikan kegiatan-kegiatan baru, perlu dikaji skala prioritas berdasar kepentingan yang lebih besar dan keterdesakan waktu akan kegiatan tersebut.	2. Dalam setiap kegiatan prioritas pembangunan kami selalu berpedoman pada RKP Tahun 2012 yang merupakan penjabaran RPJM sebagai upaya untuk mencapai visi dan misi pembangunan Kabupaten Rembang. ✓ Beberapa hal yang menjadi pertimbangan adalah kesesuaian pencapaian sasaran kegiatan dengan mengingat kemendesakan dan daya ungkit bagi kinerja pembangunan daerah.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
VII. FRAKSI BINTANG KEADILAN		
1.	Pelayanan PDAM di waktu musim kemarau .	1. Pelayanan PDAM Kabupaten Rembang pada musim kemarau seperti ini mengalami penurunan debit air baku sehingga berdampak pada produksi dan pelayanan pelanggan. Kami tetap terus berupaya mengoptimalkan pelayanan kepada pelanggan.
2.	Terkait dengan Program Sekolah Gratis sampai saat ini masih belum sesuai dengan harapan sebagian besar masyarakat.	2. Dinas Pendidikan telah mengeluarkan surat edaran Nomor 420/9218/2011 tanggal 5 September 2011 tentang Larangan Pungutan Uang Sekolah yang disampaikan kepada semua satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar (SD dan SMP). Bahwa dengan adanya dana BOS, satuan pendidikan di tingkat pendidikan dasar sudah tidak lagi memungut biaya operasional sekolah. Tetapi di luar dana BOS, para siswa, orang tua yang mampu, atau walinya tetap bisa memberikan sumbangan yang tidak mengikat kepada sekolah selama diberikan secara sukarela, tidak terikat waktu, tidak ditetapkan jumlahnya dan tidak ada intimidasi bagi yang tidak menyumbang. Walaupun ada dana BOS, orang tua/wali masih menanggung biaya personal/pribadi untuk memenuhi kebutuhan siswa, seperti biaya transport, pembelian buku untuk pribadi, pembelian baju seragam, pembelian alat-alat tulis dan sebagainya. Kecuali untuk sekolah RSBI masih diperbolehkan menarik iuran untuk memenuhi biaya operasional dan investasi.

NO.	PERTANYAAN	JAWABAN
3.	Keresahan petani tembakau di Rembang dikarenakan tidak adanya MOU antara perusahaan, mitra petani dengan para petani tembakau mengenai kualitas tembakau dan harga serta tidak adanya standarisasi kualitas dan harga tembakau.	Adanya Nota kesepahaman antara Pemerintah Kab. Rembang dengan PT. SADHANA ARIF NUSA, terkait dengan kesanggupan untuk membeli semua hasil tembakau petani. Terkait dengan kualitas dan harga telah diadakan penyuluhan kepada para petani secara terus menerus. Petani sudah memahami jenis kualitas tembakau. Namun ada petani yang belum memahami karena tidak datang pada saat latihan. Penentuan harga sesuai dengan kualitas tembakau.
4.	Maraknya warung-warung remang-remang di sepanjang jalur pantura.	4. Satpol PP tetap berupaya melaksanakan penertiban terhadap keberadaan warung remang-remang sepanjang Pantura dengan melibatkan Polres, Dinbudparpora, Dinkesosnakertran, Muspika, Pemerintah Desa dan Tokoh Masyarakat.

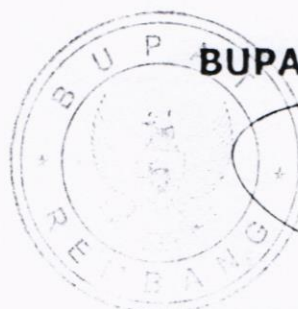
Rapat Dewan dan Hadirin yang Saya hormati,

Demikian jawaban atas pemandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD Kabupaten Rembang terhadap Pengantar Nota Keuangan Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012. Untuk selanjutnya terhadap hal-hal yang masih membutuhkan penjelasan secara teknis, kami mempersilahkan untuk dibahas dan diperdalam dalam pembahasan komisi-komisi.

Akhirnya tidak lupa saya sampaikan terima kasih. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberi bimbingan dan petunjuk-Nya kepada kita sekalian.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 5 September 2012

 **BUPATI REMBANG**

H. MOCH. SALIM, M.HUM

**TAMBAHAN PENJELASAN JAWABAN BUPATI DALAM RAPAT PARIPURNA ATAS
PEMANDANGAN UMUM FRAKSI-FRAKSI DPRD DALAM RANGKA MEMBAHAS PENGANTAR
NOTA KEUANGAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN APBD T.A. 2012**

TANGGAL 5 SEPTEMBER 2012

FRAKSI DEMOKRAT

2. PDAM Kabupaten Rembang telah berusaha mencari sumber air baku dan mengoptimalkan sumber –sumber baku yang ada, Namun dengan dana yang cukup besar yang harus dikeluarkan PDAM untuk menaikkan debit air, utamanya dari sumber semen sale , kita masih punya cadangan 60 – 80 lt/dtk, hal ini belum bisa kita optimalkan karena paling tidak PDAM membutuhkan dana kurang lebih Rp. 50 M untuk menaikkan air dari sumber induk ke penampungan di Blambiran lalu turun dengan pipa baru, karena pipa yang ada tidak mampu mengeluarkan air sebanyak 80 lt/dtk, kami sudah minta kepada PDAM untuk mencari sumber pembiayaan-pembiayaan baik dari Pemerintah Pusat maupun Pihak Ketiga, Pihak Ketiga yang ada rata-rata mengalami keberatan masalah ditarip, sedangkan kondisinya tarip yang ada selama ini masih ada banyak pertanyaan mengapa selalu ada kenaikan, ini menjadi kendala utama disamping kapasitas untuk para investor atau pihak Ketiga meminta paling sedikit dengan debit air 100 lt/dtk baru mau invest.

FRAKSI PPP

1. Disamping kegiatan DAK bidang Pendidikan tahun 2012 dan DAKbidang jalan dan jembatan Tahun 2012, masih dalam tahapan proses dan kemungkinan untuk DAK bidang pendidikan 2012 hanya bisa dilaksanakan 1 – 2 item saja dikarenakan adanya tumpukan Permendagri dengan Permendiknas hal ini menyebabkan Dinas Pendidikan belum berani melakukan langkah-langkah melaksanakan DAK tersebut.

FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA

1. Pak Sekda mohon dicek itu yang betul Rp. 28,5 juta bukan 28,5 M.

FRAKSI PDI PERJUANGAN

- 1a. Untuk Tahun Anggaran 2012 menurut informasi yang kami terima ada penambahan lagi kurang lebih 70 M senilai kurang lebih Rp. 10 M sehingga menjadi kurang lebih Rp. 55 M adalah Anggaran dari APBN Kementrian Perhubungan.
- 2c. Untuk mengurangi bencana terkait kehidupan dan penghidupan masyarakat di pinggir pantai. Abrasi pantai telah ditangani oleh Balai Besar wilayah sungai Pemali Juwana, namun kalau kejadian abrasi bisa mengkhawatirkan dan menimbulkan bencana akan ditangani secara darurat oleh BPBD (Badan Penanggulangan Bencana Daerah)

FRAKSI PAN

2. Terkait alokasi Program ini khususnya terkait dengan Perpres 70 Tahun 2012 tentang Pengadaaan Barang / jasa telah kami sesuaikan dan sudah kami informasikan kepada TAPD melalui SUPP untuk dibahas dengan masing-masing Komisi karena proses lelang tidak mungkin selesai pada tahun ini.

FRAKSI BINTANG KEADILAN

3. Kami ingin mengklarifikasikan masalah ini karena memang beredar berita di masyarakat yang tidak mengenakan bagi saya , dan Wakil Bupati, dari mulai sebelum musim tanam saja sudah mengiyaratkan para petani, meskipun keterkaitan yang dicapai petani tembakau sangat luar biasa, bahwa PT. SADANA ini mempunyai kuota, kuota ini setelah penuh kalau mampu membeli kalau tidak ya tidak membeli, saya sudah pernah menyampaikan secara langsung maupun Wakil Bupati, kita sosialisasi dari Dinas Pertanian dan Perkebunan dan PT. SADANA, bahwasannya yg sudah mengikat kontrak dengan PT. SADANA, itu yang wajib dan punya hak untuk dibeli, saya sudah sering mengingatkan karena begitu luarbiasanya hasil dari tembakau-tembakau ini, sehingga yang tidak mempunyai kontrakpun ikut-ikutan ' sehingga mulai dari penanamanpun sudah salah, lalu pada masa panen dengan proses perajangannya salah, lalu pada proses pasca panen juga salah dalam pengerjaannya karena tidak ada kontrak, sekali lagi tidak ada kontrak dengan PT. SADANA ,lalu dari sekian ratus petani yang mengikat kontrak dengan PT. SADANA daya serap masing-masing petani dalam mengalokasikan produksi tembakau belum tentu mempunyai kemampuan yang sama, disinilah letak masalahnya, saya sudah menegaskan Wakil Bupati untuk selalu melakukan pemantauan , bahkan kemarin laporan ke Saya sampai jam 11 malampun staf PT. SADANA masih melakukan pembelian, silahkan supaya semuanya jelas yang dari Dapil III melakukan kunjungan supaya jelas, masalah ini bisa jadi besar dan tidak terjadi simpang siur berita yang ada di masyarakat, kalau masalah motong tangan ini itu sudah diluar kemampuan. Yang penting sekali saya sangat bersyukur tembakau bisa hidup di Rembang menghasilkan uang.
4. Mengenai maraknya warung remang-remang sepanjang jalan Pantura Ini juga sudah menjadi perhatian serius, saya mengakui bahwa kerja Satpol belum optimalkan, saya sudah berusaha untuk mengirimkan Satpol untuk mengikuti pendidikan atau kursus penyidik Satpol, tapi setelah selesai tidak menjadi penyidik Satpol, ini yang menjadikan masalah.

BUPATI REMBANG

ttd

H. MOCH. SALIM M.hum

RISALAH

RAPAT PARIPURNA DPRD IV KABUPATEN REMBANG

MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

Hari : RABU

Tanggal : 18 September 2012

Waktu : Pkl. 09.30 WIB.

Tempat : Gedung DPRD Kabupaten Rembang

I. **JENIS RAPAT** : Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

II. **SIFAT RAPAT** : Terbuka

III. **ACARA RAPAT** :

1. Pembukaan.
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012;
3. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012;
4. Pembacaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012 ;
5. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012 ;
6. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012.

IV. Penutup. PIMPINAN RAPAT

1. Nama : **Ir. H. SUNARTO**
2. Jabatan : **Ketua DPRD Kabupaten Rembang**

V. SEKRETARIS RAPAT

1. Nama : **Drs. ACHMAD MUALIF**
2. Jabatan : **Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang**

VI. JUMLAH ANGGOTA

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 7 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 7 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 45 orang

VII. ANGGOTA YANG HADIR

1. Fraksi Demokrat	: 8 orang
2. Fraksi Golongan Karya	: 8 orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 5 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 6 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: 5 orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: 5 orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: 5 orang
Jumlah	: 42 orang

VIII. ANGGOTA YANG TIDAK HADIR

1. Fraksi Demokrat	: - orang
2. Fraksi Golongan Karya	: - orang
3. Fraksi Persatuan Pembangunan	: 2 orang
4. Fraksi Kebangkitan Bangsa	: 1 orang
5. Fraksi PDI Perjuangan	: - orang
6. Fraksi Amanat Nasional	: - orang
7. Fraksi Bintang Keadilan	: - orang
Jumlah	: 3 orang

IX. JALANNYA RAPAT PIMPINAN RAPAT : (Ir. H. SUNARTO)

LAGU INDONESIA RAYA

Asalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang terhormat	Bupati dan Wakil Bupati Rembang
Yang saya hormati	Anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Ketua Pengadilan Negeri Rembang
Yang saya hormati	Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Dinas, Kantor, Bagian, Instansi dan Camat se Kabupaten Rembang
Yang saya hormati	Pimpinan Partai Politik, LSM, para wartawan dan semua undangan lainnya yang berbahagia.

Segala puji bagi Allah, Tuhan Yang Maha Pemurah yang telah memberikan kepada kita berbagai kenikmatan, dan kerohmatan, sehingga pada hari ini, dengan kekuasaan dan kemurahan-Nya pula, kita masih

diberi kesehatan dan kesempatan untuk dapat mengikuti Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang yang ke empat dalam rangka pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 yang merupakan lanjutan dari rapat-rapat DPRD sebelumnya membahas Raperda Perubahan APBD Tahun 2012 tersebut.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Pada kesempatan ini tidak lupa pula kami segenap pimpinan dan anggota DPRD mengucapkan selamat Hari Olah Raga Nasional (HAORNAS) yang ke-29 yang jatuh pada tanggal 9 September 2012 yang lalu walaupun pelaksanaan peringatannya masih ditunda. Beberapa bulan yang lalu Kabupaten Rembang telah melaksanakan Pekan Olah Raga Kabupaten (PORKAB) yang telah mempertandingkan beberapa cabang olah raga dalam rangka persiapan keikut sertaannya dalam Pekan Olah Raga Provinsi Jawa Tengah tahun 2013 mendatang. Beberapa atlet dari beberapa cabang olah raga yang dipertandingkan dalam Pekan Olah Raga Kabupaten Rembang Insya Allah siap diterjunkan dalam Porprov Jawa Tengah tersebut, untuk itu kami menghimbau agar KONI Kabupaten Rembang benar-benar membina dan mempersiapkan para atlet tersebut sehingga tidak mengecewakan dan bisa membawa nama baik Kabupaten Rembang dalam bidang olah raga selain Tim PSIR yang sudah eksis terlebih dahulu. Semoga Olah Raga Indonesia, khususnya Kabupaten Rembang makin bertambah maju, jaya dan disegani baik ditingkat provinsi maupun nasional. Amiin.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebelum memasuki acara pokok perlu kami sampaikan bahwa rapat paripurna ini merupakan Rapat Paripurna terakhir dalam membahas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Tahun Anggaran 2012, yang telah terjadwalkan oleh Badan Musyawarah DPRD dalam rapatnya tanggal 29

Agustus 2012 yang lalu. Perlu diketahui bahwa pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012 cukup menguras energi melalui tahapan rapat-rapat untuk memutuskan atau menetapkan arah Kebijakan Daerah Kabupaten Rembang dalam menentukan posisi Anggaran Daerah berimbang efektif dan efisien, sehingga dapat mencakup kepentingan Aparatur dan Kepentingan Publik guna menopang terwujudnya Masyarakat di Kabupaten Rembang ke depan lebih baik.

Tahapan pembahasan tersebut ditingkat internal DPRD yaitu Rapat Komisi, Rapat Badan Anggaran internal maupun dengan Pimpinan Komisi serta Rapat Fraksi, sedang ditingkat eksternal yaitu dengan Bupati dan jajarannya seperti Komisi dengan Instansi terkait, Badan Anggaran dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Rembang dan sebagainya, yang semua ini dapat berjalan lancar sesuai jadwal yang telah ditentukan oleh Badan Musyawarah DPRD.

Peserta Rapat dan hadirin yang saya hormati.

Untuk mempersingkat waktu, baiklah akan kami bacakan acara yang akan berlangsung pada Rapat Paripurna hari ini, yaitu :

1. Pembukaan.
2. Laporan Badan Anggaran Atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012;
3. Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012;
4. Pembacaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012 ;
5. Persetujuan Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012 ;

6. Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012.
7. Penutup.

Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati.

Marilah kita masuki acara pertama yaitu Pembukaan, sebagaimana ketentuan pemenuhan kuorum Rapat Paripurna I (pertama), II (kedua) dan III (ketiga) masing-masing pada tanggal 3, 4 dan 5 September 2012 yang lalu, adalah dihadiri dan ditandatangani oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah anggota DPRD, ketentuan tersebut juga berlaku untuk Rapat Paripurna IV (keempat) hari ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (1) huruf b Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang.

Menurut catatan yang saya terima dari Sekretariat DPRD, bahwa jumlah anggota DPRD Kabupaten Rembang sejumlah 45 orang, yang hadir secara fisik dan menandatangani daftar hadir dalam Rapat Paripurna DPRD hari ini adalah sebanyak 42 orang yang berarti telah memenuhi kuorum.

Dengan demikian maka Rapat Paripurna dapat kita mulai, dan dengan membaca "*Bismillahirrohmanirrohim*" pukul 11.00 WIB Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang hari ini saya nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Peserta Rapat dan hadirin yang terhormat.

Kita masuki acara yang kedua, yaitu Laporan Badan Anggaran atas Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Kepada Sekretaris Badan Anggaran dipersilakan.

===== **LAPORAN BADAN ANGGARAN** =====

Dibacakan Bapak Drs. ACHMAD MUALIF Sekretaris DPRD, Teks terlampir)

Terima kasih.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Untuk acara ke tiga adalah Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2012.

Kepada Saudara-saudara anggota Fraksi yang akan menyampaikan Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2012, saya persilakan untuk menunjukkan jari terlebih dahulu :

1. Fraksi Demokrat : GUNASIH, SE
2. Fraksi Partai Golkar : SRI REJEKI, SH
3. Fraksi Persatuan Pembangunan: SA'DULLAH
4. Fraksi PKB : PUJI SANTOSO, SP
5. Fraksi PDI-Perjuangan : RIDWAN, SH
6. Fraksi Amanat Nasional : SUKARMAIN
7. Fraksi Bintang Keadilan : DHIAN RAHWENI DEWI

Selanjutnya dimulai dari juru Bicara Fraksi Demokrat sampai dengan Fraksi Bintang Keadilan, secara berurutan saya persilakan untuk menyampaikan pendapat akhirnya.

Dipersilakan

1. Fraksi Demokrat : GUNASIH, SE
- Membaca Teks Terlampir
2. Fraksi Partai Golkar : SRI REJEKI, SH
- Membaca Teks Terlampir
3. Fraksi Persatuan Pembangunan: SA'DULLAH
- Membaca Teks Terlampir

4. Fraksi PKB : PUJI SANTOSO, SP
- Membaca Teks Terlampir
5. Fraksi PDI Perjuangan : RIDWAN, SH
- Membaca Teks Terlampir
6. Fraksi Amanat Nasional : SUKARMAIN
- Membaca Teks Terlampir
7. Fraksi Bintang Keadilan : DHIAN RAHWENI DEWI
- Membaca Teks Terlampir

Fraksi	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
Fraksi Demokrat	✓		
Fraksi Partai Golkar	✓		
Fraksi Persatuan Pembangunan	✓		
Fraksi PKB	✓		
Fraksi PDI-Perjuangan	✓		
Fraksi Amanat Nasional	✓		
Fraksi Bintang Keadilan	✓		

Terima kasih saya sampaikan kepada Saudara-saudara yang telah mewakili Fraksinya masing-masing dalam Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Tahun 2012.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Sebelum Raperda Perubahan APBD Tahun 2012 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, terlebih dahulu akan dibacakan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 hasil pembahasan antara pihak legislatif (Komisi dan Badan Anggaran DPRD)

dan eksekutif (SKPD dan TAPD Kabupaten Rembang) tersebut oleh Kepala DPPKAD Kabupaten Rembang.

Kepada Saudara SUCIPTONO, SE saya persilakan.

==PEMBACAAN RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2012==

Terima kasih.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Setelah mendengar Laporan Badan Anggaran dan Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012, maka dapat saya simpulkan bahwa Rancangan Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 dapat diterima dan disetujui, dengan memperhatikan dan menindaklanjuti hasil pembahasan yang dilaporkan oleh Badan Anggaran DPRD termasuk Rekomendasi dan Penyampaian Pendapat Fraksi terhadap Hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Namun untuk lebih tegasnya dan keabsahan Peraturan Daerah tersebut terlebih dahulu perlu saya tawarkan kepada Saudara-Saudara Anggota DPRD yang hadir :

“Apakah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012 dan Rekomendasi yang disampaikan Badan Anggaran DPRD melalui Laporannya dapat disetujui ?”

====S e t u j u u u ! ! !=====

(Ketuk palu 1 kali)

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat.

Dengan telah disetujuinya Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012 tersebut diatas menjadi Peraturan Daerah, maka acara Rapat Paripurna hari ini dapat dilanjutkan dengan acara berikutnya, yaitu Penyampaian Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012.

Kepada saudara Bupati dipersilakan

====PENYAMPAIAN PENDAPAT AKHIR BUPATI====

(Dibacakan oleh Bapak H. ABDUL HAFIDZ Wakil Bupati Rembang,
Teks terlampir)

Terima kasih kepada saudara Wakil Bupati Rembang, yang telah menyampaikan “ *Pendapat Akhir Bupati atas Hasil Pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun 2012*”.

Rapat Dewan dan Hadirin yang berbahagia.

Acara demi acara telah kita lalui dengan seksama, akhirnya terima kasih saya sampaikan kepada Bupati beserta jajarannya, rekan-rekan Anggota DPRD baik yang masuk dalam Komisi-Komisi maupun Badan Anggaran serta Sekretaris DPRD beserta seluruh stafnya yang telah melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik sehingga dapat menyelesaikan pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang 2012 sesuai dengan waktu yang telah dijadwalkan.

Kepada saudara-saudara yang telah mengikuti Rapat ini, kami atas nama Pimpinan DPRD mengucapkan banyak terima kasih atas segala perhatian, kehadiran serta kebersamaannya, dan mohon maaf atas segala kekurangan dalam penyelenggaraan Rapat hari ini.

Selanjutnya dengan mengucapkan “ *Alhamdulillahirobbil ‘alamin* “
tepat pukul 11.45 WIB Rapat Paripurna DPRD hari ini saya nyatakan
ditutup.

(*Ketuk palu 3 kali*)

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

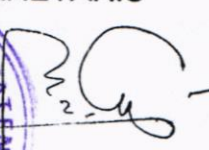
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

KETUA



Ir. H. SUNARTO

SEKRETARIS



Drs. ACHMAD MUALIF
Pembina Utama Muda
NIP. 19620804 198803 1 011

LAMPIRAN : RISALAH RAPAT PARIPURNA (IV) DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS TENTANG RAPERDA PERUBAHAN APBD KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

- LAMPIRAN I** : Daftar Hadir Pimpinan dan Anggota DPRD, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah, SKPD dan Camat Se Kabupaten Rembang ;
- LAMPIRAN II** : Keputusan Pimpinan DPRD Kab. Rembang Nomor 5 Tahun 2012 Tanggal 26 Juli 2012 tentang Persetujuan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 ;
- LAMPIRAN III** : Laporan Badan Anggaran DPRD Atas hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kab. Rembang Tahun 2012 ;
- LAMPIRAN IV** : Penyampaian Pendapat Akhir Fraksi-fraksi DPRD terhadap hasil Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kab. Rembang Tahun 2012 ;
- LAMPIRAN V** : Penyampaian Raperda tentang Perubahan APBD Kab. Rembang Tahun 2012 ;
- LAMPIRAN VI** : Berita Acara Persetujuan Bersama Kepala Daerah dan DPRD Kab. Rembang tentang Raperda tentang Perubahan APBD Kab. Rembang Tahun 2012 menjadi Peraturan Daerah ;
- LAMPIRAN VII** : Keputusan DPRD Kab. Rembang Nomor 16 Tahun 2012 Tanggal 18 September 2012 tentang Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Kab. Rembang Tahun 2012 ;
- LAMPIRAN VIII** : Sambutan Bupati Rembang pada rapat Paripurna Penetapan Raperda tentang Perubahan APBD Kab. Rembang Tahun Anggaran 2012.

**DAFTAR HADIR RAPAT PARIPURNA IV
MEMBAHAS
RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2012**

HARI / TANGGAL : RABU, 18 SEPTEMBER 2012
JAM : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
<u>FRAKSI DEMOKRAT</u>				
1	Ir. H. SUNARTO	Ketua	1	
2	H. HARNO, SE	Anggota	2	
3	GUNASIH, SE	Anggota	3	
4	IMRO'ATUS SOLICHAH, SE	Anggota	4	
5	Hj. HIKMAH PURNAMAWATI	Anggota	5	
6	YULIANI ARI SETYANINGSIH, SE	Anggota	6	
7	EDI KARTONO, S.Pd	Anggota	7	
8	ISLAHUDDIN	Anggota	8	
<u>FRAKSI PARTAI GOLKAR</u>				
9	CATUR WINANTO, SH	Wakil Ketua	9	
10	CHAIRUL ANWAR, S.Sos	Anggota	10	
11	KHAIRUL MUTAKIM	Anggota	11	
12	GATOT PAERAN, SH, MSI	Anggota	12	
13	SRI REJEKI, SH	Anggota	13	
14	H. ISMARI	Anggota	14	
15	DJOKO SOESILO	Anggota	15	
16	SUCI RAHAYU, SH	Anggota	16	
<u>FRAKSI PERSATUAN PEMBANGUNAN</u>				
17	K. H. MAJID KAMIL, MZ	Wakil Ketua	17	
18	SA'DULLAH	Anggota	18	
19	H.M. MURSYID, ST	Anggota	19	
20	H. HAKAM, SH	Anggota	20	
21	SULISTYO WETI ARIANI	Anggota	21	
22	KODRIYAH, S.Pd	Anggota	22	
23	H. YUDIANTO, SH	Anggota	23	
<u>FRAKSI KEBANGKITAN BANGSA</u>				
24	SUWANTO	Wakil Ketua	24	
25	MUHAMMAD ASNAWI, S.Pd	Anggota	25	
26	H. SUTARYO SHOLEH	Anggota	26	
27	PUJI SANTOSO, SP	Anggota	27	
28	H.M. NOOR HASAN, SH	Anggota	28	
29	H. SHOLEH, BA	Anggota	29	
30	H.M. SHODIQIN YASIR	Anggota	30	

NO	N A M A	JABATAN	TANDA TANGAN	KET
1	2	3	4	5
	<u>FRAKSI PDI PERJUANGAN</u>			
31	RIDWAN, SH	Anggota	31	
32	A. MASKUR RUKHANI	Anggota	32	
33	SUPRIHADI	Anggota	33	
34	JASMANI	Anggota	34	
35	SUMARSIH	Anggota	35	
	<u>FRAKSI AMANAT NASIONAL</u>			
36	JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE	Anggota	36	
37	H. MOH. NURHASAN	Anggota	37	
38	MOH. IMAM ZARKASI	Anggota	38	
39	SUKARMAIN	Anggota	39	
40	SAHNINGSIH, SE	Anggota	40	
	<u>FRAKSI BINTANG KEADILAN</u>			
41	dr. ROCHMAD ISNAINI	Anggota	41	
42	ACHMAD ZAMHURI	Anggota	42	
43	MUNTHOHID, SH	Anggota	43	
44	JOKO SUPRIHADI, SH	Anggota	44	
45	DHIAN RAHWENI DEWI	Anggota	45	

Keterangan :

- 1 I : Ijin
- 2 S : Sakit
- 3 C : Cuti
- 4 DL: Dinas Luar

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Ketua
Ir. H. SUNARTO

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SEKRETARIAT DPRD

DAFTAR HADIR FORUM KOORDINASI PIMPINAN DAERAH
RAPAT PARIPURNA IV DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS
RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2012

HARI / TANGGAL : SELASA, 18 SEPTEMBER 2012
PUKUL : 09.30 WIB

NO	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1.	H. MOCH SALIM		1.
2.	H. ABDUL HAFIDZ	Wakil Bupati Rembang	2.
3.	HAMZAH FATONI, SH MKn	Sekretaris Daerah	3.
4.		Pengadilan Negeri Rembang	4.
5.		Dandim 0720 Rembang	5.
6.	IGEDE ARDA	Kepolisian Resort Rembang	6.
7.		Pengadilan Agama Kab. Rembang	7.
8.		Kejaksaan Negeri Rembang	8.



SEKRETARIS DPRD KAB.
REMBANG
Kepala Bagian Persidangan

YULIUS SUDARNO
NIP. 19570711 198603 1 001

DAFTAR HADIR CAMAT
RAPAT PARIPURNA IV DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS
RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2012

HARI / TANGGAL : SELASA, 18 SEPTEMBER 2012
PUKUL : 09.30 WIB

NO	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN
1	Camat Rembang	MUSTHOLICH	1. 2.
2	Camat Kaliori		3.
3	Camat Sumber	SUKISSUTOMO	4.
4	Camat Sulang	Juhant	5.
5	Camat Bulu	U. M. P. S.	6.
6	Camat Pamotan	A. M. P. S.	7.
7	Camat Gunem	SUNARTO.	8.
8	Camat Sale	ISMANTO.	9.
9	Camat Lasem	M. P. S.	10.
10	Camat Pancur	SUSWANTORO	11.
11	Camat Sedan	MARDIYANTO	12.
12	Camat Sluke		13.
13	Camat Kragan	Akh. S. M. S.	14.
14	Camat Sarang		

PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
SETWAN
 SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan
DR. YULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004

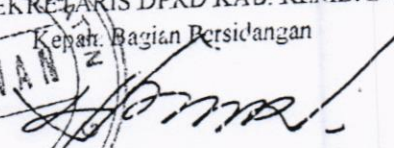
DAFTAR HADIR SKPD
RAPAT PARIPURNA IV DPRD KABUPATEN REMBANG
MEMBAHAS
PAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2012

HARI / TANGGAL : SELASA, 18 SEPTEMBER 2012
 PUKUL : 09.30 WIB

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
1	STAF AHLI BUPATI			1
2	STAF AHLI BUPATI			2
3	STAF AHLI BUPATI			3
4	STAF AHLI BUPATI			4
5	ASISTEN I SEKDA			5
6	ASISTEN II SEKDA			6
7	ASISTEN III SEKDA			7
8	BAG. TATA PEMERINTAHAN	Susanto	Kabag.	8
9	BAG. HUKUM	Eddy Djoko P.	Kabag.	9
10	BAG. HUMAS	Edi Sumantri	Kasubag.	10
11	BAG. ADM. PEMBANGUNAN	ANANDI S	Kasubag.	11
12	BAG. ADM. PEREKONOMIAN			12
13	BAG. KESEJAHTERAAN RAKYAT			13
14	BAG. ADM. KEUANGAN	Mitronjoko	Kasubag.	14
15	BAG. ORGNS. & KEPEGAWAIAN	SURANTO D	Kasubag.	15
16	BAG. UMUM	Agus	Kasubag.	16
17	DPPKAD	SUCIPTONO	DPP KAD	17
18	INSPEKTORAT	Poebagyo	Inspektur	18
19	BAPPEDA	Dipone	Setor	19
20	BPMPKB	HATIMI	Kasubag KB KR	20
21	BKD	ABADI	Sekretaris	21
22	BKP & P4K	Wartono	Ka	22
23	BPBD	SUCIARNO	Ka	23
24	DINAS PEKERJAAN UMUM	Gautama	Sekret	24
25	DINAS KESEHATAN	Supriyo Utomo		25
26	DINAS PENDIDIKAN	Samudra		26
27	DINPERINDAGKOP & UMKM			27
28	DINTANHUT	Suratwin	Sekretaris	28
29	DINLUTKAN	BUDIYONO	Kasubag	29
30	DINHUBKOMINFO	Safwan		30
31	DINAS DUKCAPIL	Safwan		31
32	DINSOSNAKERTRANS	H. Mulyo	KADIS.	32
33	DINBUDPARPORA	SURYAWATI	Sek -	33
34	DINAS ENERGI & SDM	AGUS SUPRIYONO	KA	34
35	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	BUDI PRIYANGGRO	KAS	35
36	KANTOR KESBANGPOLINMAS	HARTONO		36
37	KANTOR PERPUST & ARSIP	Gunawan	Sub Bag TU	37
38	KANTOR PPT	SM Sugiyanti	Ka KPT	38

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN	
1	2	3	4	5	
39	KANTOR KEMENTERIAN AGAMA	M. Dwi Anshary	Ka Sek. Reg. Tu	39	2
40	RSUD dr. R. SUTRASNO	Subang	Kabg. W	40	
41	SATPOL PP	SLAMET Rizadi	Satpol PP	41	4
42	TIM PKK KAB. REMBANG			42	
43	P D A M			43	
44	PERCETAKAN DAERAH			44	
45	PD. BANK PASAR			45	
46	BPD JATENG CAB. REMBANG			46	
47	BRI CAB. REMBANG			47	
48	BKK LASEM			48	
49	BKK KALIORI			49	
50	R B S J			50	
51	B P N KAB. REMBANG			51	
52	BPS KAB. REMBANG	SUMITRO	Pch Kepala	52	5
53	DIPENDA PROPINSI/ UF3AD			53	
54	KANTOR POS DAN GIRO			54	
55	RUMAH TAHANAN			55	
56	PERHUTANI KPH MANTINGAN			56	
57	PERHUTANI KPH KEBONHARJO			57	
58	KANTOR PERHUTANI SPH IV			58	
59	KPU KAB. REMBANG			59	
60	SEKRETARIS KPU KAB. REMBANG			60	
61	PANWASLU KAB. REMBANG			61	
62	TELKOM REMBANG			62	
63	PLN CAB. REMBANG			63	
64	PR1 Surg.	Miftachurrohman	Wustawan	64	6
65	Radio Litra Bahari PA1	Masudi	SAF F1's	65	7
66		A. L. Ventana		66	
67	Staf ahli	Nike Oktavia		67	8
68	Syahrul K. STIE YPPI	Syanhe R.	Polhut III	68	9
69				69	
70				70	
71				71	
72				72	
73				73	
74				74	
75				75	
76				76	
77				77	
78				78	
79				79	
80				80	
81				81	
82				82	

NO	BADAN/BAG/DINAS/KANTOR	NAMA	JABATAN	TANDA TANGAN
1	2	3	4	5
83				83
84				84
85				85
86				86
87				87
88				88
89				89
90				90
91				91
92				92
93				93
94				94
95				95
96				96
97				97
98				98
99				99
100				100


 An SEKRETARIS DPRD KAB. REMBANG
 Kepala Bagian Persidangan

Dr. YULIUS SUDARNO
 NIP. 19570711 198603 1 004



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN RANCANGAN KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN (KUA)
DAN PRIORITAS PLAFON ANGGARAN (PPA) PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

- Menimbang :
- a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun Anggaran Berjalan, maka perlu diperlakukan perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 ;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a. perlu persetujuan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang .

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;
 2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ;

5. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 Tentang **Perimbangan** Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang **Pajak Daerah** dan Retribusi Daerah ;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang **Pembentukan** Peraturan Perundang-Undangan ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang **Pajak** Daerah ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang **Retribusi** Daerah ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang **Kedudukan** Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan **Keuangan** Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang **Pengelolaan** Keuangan Badan Layanan Umum ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang **Standar** Akutansi Pemerintah ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang **Dana** Perimbangan;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang **Sistem** Informasi Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang **Hibah**;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang **Pengelolaan** Keuangan Daerah ;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang **Pelaporan** Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah ;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang **Pengesahan**, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan ;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang **Pembagian** Urusan Pemerintahan Antar Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota ;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang **Standar** Akuntansi Pemerintah ;

21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah ;
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaiannya ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah ;
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah Tahun Anggaran 2012 ;
27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2010-2015 ;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 ;
30. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang .

Memperhatikan : Hasil Rapat Badan Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang tanggal 26 Juli 2012.

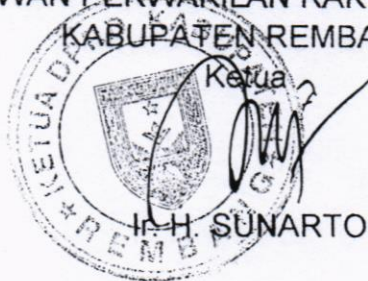
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
PERTAMA : Menyetujui Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 menjadi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran (PPA) Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana terlampir;
- KEDUA : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana Diktum PERTAMA Keputusan ini kepada Bupati Rembang ;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan .

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 26 Juli 2012

PIMPINAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG



Ketua

I. H. SUNARTO

Wakil Ketua

u

CATUR WINANTO, SH.

Wakil Ketua

H. MAJID KAMIL, MZ.

Wakil Ketua

SUWANTO

**LAPORAN BADAN ANGGARAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**



**MEMBAHAS
RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN
ANGGARAN 2012**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

**Jl. P. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194
Rembang 59212**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. Diponegoro No. 88 Telp (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

LAPORAN BADAN ANGGARAN DPRD KABUPATEN REMBANG MEMBAHAS RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2012 KABUPATEN REMBANG

I. PENDAHULUAN :

Sebagaimana tertuang dalam pasal 183 ayat (2) Undang –undang nomor 32 tahun 2004 disebutkan bahwa Pemerintah Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD disertai penjelasan dan dokumen-dokumen pendukungnya kepada DPRD. Sedangkan pada ayat (3) : Pengambilan keputusan mengenai Rancangan Perda tentang Perubahan APBD, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh DPRD paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Tahun Anggaran yang bersangkutan berakhir. Oleh karena itu maka DPRD Kabupaten Rembang telah melakukan pembahasan terhadap Rancangan Perda tentang Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 yang diajukan oleh Bupati tanggal 15 Agustus 2012 dengan nomor surat 188.3/2419/2012.

Sesuai amanat Peraturan DPRD Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang, Badan Musyawarah DPRD bersama TAPD Kabupaten Rembang telah menjadwalkan pembahasan Raperda Perubahan APBD 2012 dari tanggal 3 September s/d 18 September 2012.

Hasil pembahasan selengkapnya dilaporkan oleh Badan Anggaran dalam Rapat Paripurna DPRD.

II. D A S A R.

1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
8. Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang yang telah diubah dengan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan DPRD Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Rembang;
9. Surat Bupati Rembang Nomor 188.3/2419/2011 tanggal 15 Agustus 2012 perihal Pengiriman Raperda yang berisi Permohonan Pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012;
10. Hasil rapat Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Rembang dengan TAPD Pemerintah Kabupaten Rembang tanggal 29 Agustus 2012 yang mengagendakan Jadwal Rapat-rapat DPRD dalam membahas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012.

III. PELAKSANAAN

- a. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 05 September 2012 Jam 12.00 WIB. dengan agenda penjelasan lanjutan atas Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012;
- b. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD Kabupaten Rembang dilakukan pada tanggal 05 September 2012 Jam 14.00 WIB. membahas strategi dan distribusi pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012;
- c. Rapat – rapat Komisi A,B,C,D DPRD dengan SKPD / Instansi terkait dilaksanakan pada :
H a r i : Kamis s/d Kamis.
Tanggal : 6 s/d 13 September 2012.
Jam : 09.30 WIB s/d selesai
Tempat : Ruang Komisi A,B,C dan D DPRD Kabupaten Rembang.
Acara : Membahas Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- d. Rapat Badan Anggaran dengan Pimpinan Komisi-Komisi DPRD pada:
H a r i : Jumat
Tanggal : 14 September 2012.
Jam : 09.30. WIB.
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.
Acara : Penyampaian Laporan Komisi-Komisi atas Pendalam - an Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- e. Rapat Internal Badan Anggaran DPRD pada:
H a r i : Jumat
Tanggal : 14 September 2012.
Jam : 13.00. WIB.
Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang.
Acara : Pembahasan atas Laporan Komisi terhadap Pendalaman Raperda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;

f. Rapat Badan Anggaran dengan TAPD Kabupaten Rembang pada :

H a r i : Senin

Tanggal : 17 September 2012.

Jam : 09.30 WIB.

Tempat : Ruang Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang

Acara : Sinkronisasi dan Koordinasi hasil Pembahasan Ra perda Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.

IV. HASIL RAPAT

Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang setelah melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, yang ringkasannya dapat dijabarkan sebagai berikut :

A. RINGKASAN RANCANGAN PERUBAHAN APBD 2012

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	PERSETUJUAN	PEMBAHASAN	
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN			BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4
1	PENDAPATAN DAERAH	991,500,571,500	1,006,506,434,800	15,005,863,300	1,008,342,314,800	16,841,743,300	1,835,880,000
1.1	Pendapatan Asli Daerah	89,947,696,000	94,672,281,800	4,724,585,800	95,041,791,800	5,094,095,800	369,510,000
1.1.1	Pendapatan Pajak Daerah	15,631,992,100	16,920,000,000	1,288,007,900	17,064,510,000	1,432,517,900	144,510,000
1.1.2	Hasil Retribusi Daerah	22,857,412,900	22,911,304,700	53,891,800	23,136,304,700	278,891,800	225,000,000
1.1.3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	3,071,211,000	5,739,706,000	2,668,495,000	5,739,706,000	2,668,495,000	-
1.1.4	Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	48,387,080,000	49,101,271,100	714,191,100	49,101,271,100	714,191,100	-
1.2	Dana Perimbangan	690,600,636,000	690,572,047,000	(28,589,000)	690,572,047,000	(28,589,000)	-
1.2.1	Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak	41,795,028,000	41,766,439,000	(28,589,000)	41,766,439,000	(28,589,000)	-
1.2.2	Dana Alokasi Umum	570,454,948,000	570,454,948,000	-	570,454,948,000	-	-
1.2.3	Dana Alokasi Khusus	78,350,660,000	78,350,660,000	-	78,350,660,000	-	-
1.3	Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	210,952,239,500	221,262,106,000	10,309,866,500	222,728,476,000	11,776,236,500	1,466,370,000
1.3.1	Hibah	622,670,000	622,670,000	-	622,670,000	-	-
1.3.3	Dana Bagi Hasil Pajak dari pemerintah Provinsi dan pemerintah daerah lainnya	31,343,784,500	41,653,651,000	10,309,866,500	41,653,651,000	10,309,866,500	-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus	107,189,630,000	107,189,630,000	-	108,656,000,000	1,466,370,000	1,466,370,000
1.3.5	Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	71,796,155,000	71,796,155,000	-	71,796,155,000	-	-
2.	BELANJA DAERAH	996,746,518,462	1,023,166,799,043	26,420,280,581	1,025,002,679,043	28,256,160,581	1,835,880,000
2.1	Belanja Tidak Langsung	636,443,960,000	636,226,337,850	(217,622,150)	638,329,807,850	1,885,847,850	2,103,470,000
2.1.1	Belanja Pegawai	559,916,493,000	557,293,201,850	(2,623,291,150)	558,676,221,850	(1,240,271,150)	1,383,020,000
2.1.2	Belanja Bunga	37,000,000	37,000,000	-	37,000,000	-	-
2.1.3	Belanja Subsidi	700,000,000	700,000,000	-	700,000,000	-	-
2.1.4	Belanja Hibah	21,026,064,000	30,006,370,000	8,980,306,000	30,719,820,000	9,693,756,000	713,450,000
2.1.5	Belanja Bantuan Sosial	20,596,003,000	12,021,366,000	(8,574,637,000)	12,028,366,000	(8,567,637,000)	7,000,000
2.1.7	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintahan Desa	33,168,400,000	35,168,400,000	2,000,000,000	35,168,400,000	2,000,000,000	-
2.1.8	Belanja Tidak Terduga	1,000,000,000	1,000,000,000	-	1,000,000,000	-	-

NO	SKPD	JUMLAH (Rp)		BERTAMBAH (BERKURANG)	PEMBAHASAN		
		SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN		PERSETUJUAN	BERTAMBAH (BERKURANG)	BERTAMBAH (BERKURANG)
1	2	3	4	5 = 4-3	6	7 = 6-3	8 = 6-4
2.2	Belanja Langsung	360,302,558,462	386,940,461,193	26,637,902,731	386,672,871,193	26,370,312,731	(267,590,000)
2.2.1	Belanja Pegawai	53,723,825,375	55,597,752,475	1,873,927,100	55,636,383,350	1,912,557,975	38,630,875
2.2.2	Belanja Barang dan Jasa	109,065,146,505	119,339,969,116	10,274,822,611	120,304,848,241	11,239,701,736	964,879,125
2.2.3	Belanja Modal	197,513,586,582	212,002,739,602	14,489,153,020	210,731,639,602	13,218,053,020	(1,271,100,000)
	Jumlah Belanja	996,746,518,462	1,023,166,799,043	26,420,280,581	1,025,002,679,043	28,256,160,581	1,835,880,000
	surplus (devisit)	(5,245,946,962)	(16,660,364,243)	(11,414,417,281)	(16,660,364,243)	(11,414,417,281)	-
3.	PEMBIAYAAN DAERAH						
3.1	Penerimaan Pembiayaan	19,794,522,962	33,462,940,243	13,668,417,281	33,462,940,243	13,668,417,281	-
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran sebelumnya (SILPA)	19,794,522,962	33,462,940,243	13,668,417,281	33,462,940,243	13,668,417,281	-
	Jumlah penerimaan Pembiayaan	19,794,522,962	33,462,940,243	13,668,417,281	33,462,940,243	13,668,417,281	-
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	14,548,576,000	16,802,576,000	2,254,000,000	16,802,576,000	2,254,000,000	-
3.2.2	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah	5,000,000,000	7,254,000,000	2,254,000,000	7,254,000,000	2,254,000,000	-
3.2.3	Pembayaran pokok utang	9,548,576,000	9,548,576,000	-	9,548,576,000	-	-
	Jumlah Pengeluaran Pembiayaan	14,548,576,000	16,802,576,000	2,254,000,000	16,802,576,000	2,254,000,000	-
	Pembiayaan Netto	5,245,946,962	16,660,364,243	11,414,417,281	16,660,364,243	11,414,417,281	-
3.3	Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berkeinginan	-	-	-	-	-	-

B. REKAPITULASI ANGGARAN SKPD PERUBAHAN APBD 2012

NO.	SKPD	PEMBAHASAN PERSETUJUAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	16	17	18	19=17+18
1	DINAS PENDIDIKAN		382,799,308,000	98,348,792,350	481,148,100,350
2	DINAS KESEHATAN	5,994,464,000	30,312,280,000	21,596,348,770	51,908,628,770
3	RSUD dr R. SOETRASNO	45,300,000,000	19,170,457,000	57,215,917,000	76,386,374,000
4	DINAS PEKERJAAN UMUM	1,105,000,000	11,315,705,000	58,147,142,663	69,462,847,663
5	BAPPEDA		2,642,684,000	6,272,940,000	8,915,624,000
6	DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1,992,170,800	4,422,399,000	6,655,617,000	11,078,016,000
7	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP		1,233,375,000	1,842,213,000	3,075,588,000
8	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	465,000,000	2,210,959,000	3,854,394,910	6,065,353,910
9	BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA		7,243,323,000	5,189,088,000	12,432,411,000
10	DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI		3,999,393,000	1,036,319,000	5,035,712,000
11	DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI DAN UMKM	2,317,903,100	7,388,900,000	4,587,943,000	11,976,843,000
12	KANTOR KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT		1,274,019,000	1,529,100,000	2,803,119,000
13	SATPOL PP		2,587,489,000	855,699,200	3,443,188,200
14	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH			3,368,000,000	3,368,000,000
15	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH		6,859,131,000	-	6,859,131,000
16	BUPATI DAN WAKIL BUPATI		525,388,000	-	525,388,000

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	16	17	18	19=17+18
17	SETDA	1,484,408,000	10,431,965,000	17,984,966,000	28,416,931,000
a	SETDA (BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT)	21,000,000	-	7,729,220,000	7,729,220,000
b	SETDA (BAGIAN ORGANISASI KEPEGAWAIAN)		-	300,000,000	300,000,000
c	SETDA (BAGIAN ADM KEUANGAN)	90,000,000	10,431,965,000	3,129,700,000	13,561,665,000
d	SETDA (BAGIAN UMUM)		-	2,484,765,000	2,484,765,000
e	SETDA (BAGIAN HUMAS)	45,000,000	-	528,316,000	528,316,000
f	SETDA (BAGIAN TATA PEMERINTAHAN)		-	1,379,465,000	1,379,465,000
g	SETDA (BAGIAN HUKUM)		-	540,000,000	540,000,000
h	SETDA (BAGIAN ADM PEREKONOMIAN)	1,328,408,000	-	1,443,500,000	1,443,500,000
i	SETDA (BAGIAN ADM PEMBANGUNAN)		-	450,000,000	450,000,000
18	SEKRETARIAT DPRD		2,610,599,000	11,754,046,000	14,364,645,000
19	DINAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH	938,541,896,900	91,171,551,850	13,246,294,000	104,417,845,850
a	(SKPD)	25,241,373,900	11,517,965,850	13,246,294,000	24,764,259,850
b	(PPKD)	913,300,523,000	79,653,586,000	-	79,653,586,000
20	INSPEKTORAT KABUPATEN		3,126,528,000	2,198,260,000	5,324,788,000
21	BKD		2,860,875,000	1,948,380,000	4,809,255,000
22	KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU		1,018,029,000	761,900,000	1,779,929,000
23	KECAMATAN REMBANG		4,304,316,000	257,760,000	4,562,076,000
24	KECAMATAN KALIORI		1,519,236,000	260,200,000	1,779,436,000
25	KECAMATAN SULANG		1,618,458,000	161,984,000	1,780,442,000
26	KECAMATAN SUMBER		1,275,398,000	163,304,000	1,438,702,000
27	KECAMATAN BULU		1,278,118,000	152,680,000	1,430,798,000
28	KECAMATAN LASEM		1,608,025,000	222,516,000	1,830,541,000
29	KECAMATAN PANCUR		1,725,835,000	163,380,000	1,889,215,000
30	KECAMATAN SLUKE		1,188,665,000	166,997,900	1,355,662,900

NO.	SKPD	PEMBAHASAN			
		PERSETUJUAN			
		PENDAPATAN	BELANJA		
			BELANJA TIDAK LANGSUNG	BELANJA LANGSUNG	JUMLAH
1	2	16	17	18	19=17+18
31	KECAMATAN PAMOTAN		1,315,326,000	171,690,000	1,487,016,000
32	KECAMATAN GUNEM		1,323,433,000	157,125,000	1,480,558,000
33	KECAMATAN SALE		1,148,785,000	163,220,000	1,312,005,000
34	KECAMATAN KRAGAN		1,370,988,000	192,180,000	1,563,168,000
35	KECAMATAN SEDAN		1,242,806,000	167,640,000	1,410,446,000
36	KECAMATAN SARANG		1,477,030,000	199,060,000	1,676,090,000
37	BADAN KETAHAN PANGAN DAN PELAKSANAAN PENYULUHAN PERTANIAN,PERIKANAN DAN KEHUTANAN		6,500,044,000	2,079,082,400	8,579,126,400
38	KANTOR PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH		1,511,875,000	612,010,000	2,123,885,000
39	DINAS PERTANIAN DAN KEHUTANAN	156,872,000	4,981,802,000	11,817,016,000	16,798,818,000
40	DINAS ESDM	-	1,998,727,000	10,766,908,000	12,765,635,000
41	DINAS KEBUDAYAAN,PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA	1,012,500,000	2,285,173,000	1,767,810,000	4,052,983,000
42	DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	9,972,100,000	3,451,410,000	38,636,947,000	42,088,357,000
	JUMLAH	1,008,342,314,800	638,329,807,865	386,672,871,193	1,025,002,679,043

B. REKOMENDASI :

1. DINAS ESDM

Agar penerangan jalan lingkaran dari Desa Tireman sampai perempatan Desa Ketanggi agar diperhatikan;

2. DINAS PERINDAGKOP & UMKM.

Supaya Pemkab meningkatkan pemeliharaan pasar

3. DINAS PEKERJAAN UMUM (DPU).

- a. Agar membenahi RKA, untuk menyeragamkan harga satuan pekerjaan pada masing-masing bidang.
- b. Pemeliharaan rutin trotoar agar dianggarkan pada tahun anggaran 2013.

4. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH (BPBD)

Agar dianggarkan kendaraan dinas roda empat untuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) pada tahun anggaran 2013.

5. RSUD Dr. R. SOETRASNO DAN DINAS KESEHATAN

- a. Untuk pelayanan kesehatan JKRS diharapkan kebutuhan darah pasien dapat dimasukkan dalam klaim pelayanan JKRS;
- b. Mengingat sangat pentingnya peran Kepala Dinas, agar Pemerintah Kabupaten Rembang segera menunjuk Kepala Dinas Kesehatan yang definitif.
- c. Agar RSUD dr. R. Soetrasno Rembang selalu meningkatkan pelayanannya.
- d. Agar keberadaan parkir di halaman RSUD dengan pihak ketiga ditinjau kembali;
- e. Untuk meringankan beban pasien harap diterbitkan kartu parkir khusus penunggu pasien, sehingga tidak terjadi penarikan berulang kali dalam satu hari.

C. Lain-lain.

Pada setiap pembahasan Raperda APBD diharapkan agar SKPD dapat menguasai dengan baik Program-program dan Kegiatan yang sudah direncanakan agar pembahasan dapat berjalan dengan lancar.

V. PENUTUP

Demikian Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang dalam membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012, Selanjutnya laporan ini sebagai bahan pertimbangan dalam Persetujuan DPRD Kabupaten Rembang pada Rapat Paripurna IV (keempat) DPRD Kabupaten Rembang.

Rembang, 18 September 2012.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

BADAN ANGGARAN

K e t u a,

Sekretaris,

ttd

ttd

Ir. H. SUNARTO

Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

Mengetahui :

Sesuai dengan aslinya

Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang

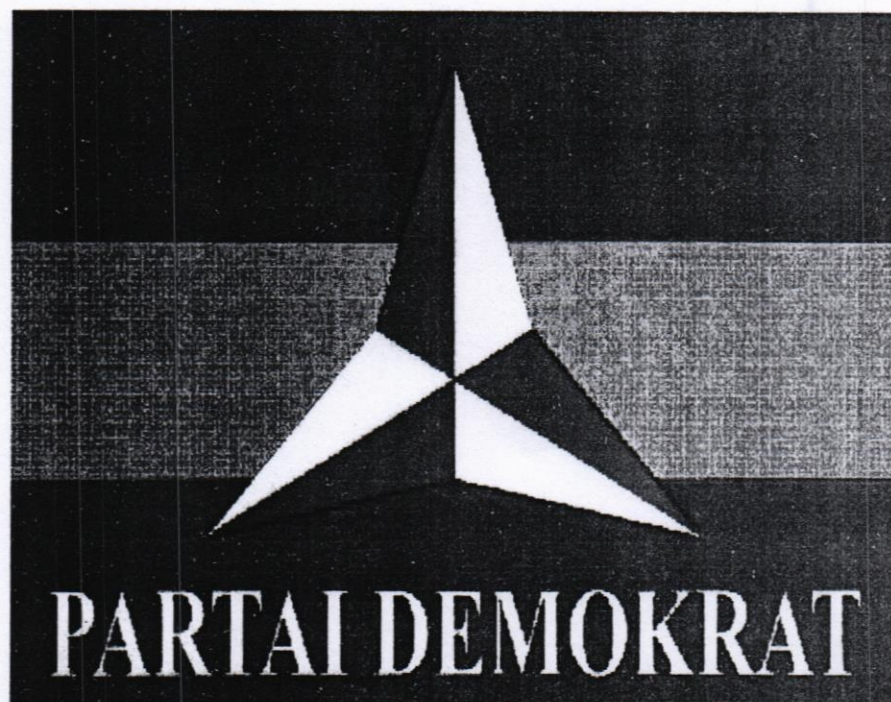


Drs. ACHMAD MUALIF

Pembina Utama Muda

NIP. 19620804 198803 1 011

**PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEMOKRAT
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN BELANJA DAERAH
TAHUN 2012
KABUPATEN REMBANG**



**FRAKSI DEMOKRAT
DPRD KABUPATEN REMBANG
Rembang 18 September 2012
DIBACAKAN OLEH: H.MOCH GUNASIH,SE.**



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI DEMOKRAT

Jl. Diponegoro No. 88 Rembang;
telp. (0295) 691194; 693290; 693291

PENDAPAT AKHIR FRAKSI DEKOKRAT

TERHADAP

RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN 2012

Selasa , 18 September 2012

Dibacakan oleh : H.Moch Gunasih,SE.

Assalamualaikum Wr.Wb.

Yang kami hormati :

1. Saudara Bupati , Wakil Bupati .
2. Saudara pimpinan dan segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang .
3. Saudara Ketua pengadilan Negeri dan pengadilan Agama Rembang.
4. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang .
5. Saudara Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat dilingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
6. Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang berserta Staf.
7. Saudara Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM , rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Syukur Alhamdullilah kami ucapkan kehadiran Allah SWT . bahwa di pagi hari ini kita masih diberi Rahmat dan hidayahNya yang berupa kesehatan sehingga kita masih dapat bertemu dan bertatap muka dalam Rapat Paripurna tentang persetujuan DPRD atas Raperda perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2012 .

Setelah melalui rangkaian jadwal mulai dari penyampaian KUAPPA, RAPBD sampai dengan pembahasan ditingkat komisi, dan mengalami beberapa perubahan baik pergeseran, pengurangan serta penambahan itu merupakan wujud dari kesungguh-sungguhan kami demi masyarakat Rembang pada umumnya .

Bupati,Wakil Bupati Sidang Dewan yang terhormat,

Dengan mengucapkan Bismillahirrohmanirrohkim..... kami fraksi Demokrat menerima dan menyetujui RAPBD perubahan tahun 2012 untuk ditetapkan sebagai perda perubahan APBD 2012 .

Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan sebagai masukan untuk ditindaklanjuti antara lain :

1. Lampu penerangan Jalan lingkaran Rembang supaya segera direalisasikan
2. Agar pemerintah Kabupaten Rembang bisa membantu dan mengkoordinir masyarakat yang menyediakan lahan parkir truk supaya lebih baik dan teratur. Serta memohon dinas perhubungan untuk segera menertibkan truk-truk parkir di sepanjang pantura karena sudah sangat meresahkan pengguna jalan.
3. Mohon pemerintah daerah memperhatikan asset yang digunakan untuk areal pemakaman etnis tionghua yang ada di gunung bugel lasem, karena hampir semua dengan seenaknya membuat kuburan permanen yang besar besar dan sangat luas, serta diperparah dengan banyaknya jenazah yang bukan asli warga rembang.
4. Kami berharap Pembinaan Generasi Muda dalam masalah budi pekerti dan Bela Negara segera ditumbuhkan kembali
5. Penertiban dan pembinaan pengawasan melekat terhadap PNS dan anak sekolah untuk lebih ditingkatkan.
6. Pengawasan terhadap pelayanan pemerintahan desa sangat kurang mohon untuk diperhatikan.

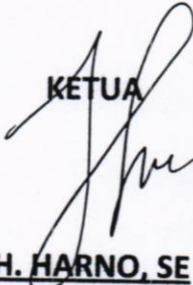
Demikian beberapa catatan yang kami sampaikan dalam pendapat akhir fraksi ini.

Akhirnya kepada saudara Bupati, wakil Bupati Saudara Ketua dan Wakil Ketua DPRD segenap tamu undangan kami ucapkan terima kasih telah mengikuti penyampaian ini semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan kekuatan, petunjuk, bimbingan serta perlindungan kepada kita semua dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab membangun masyarakat, bangsa dan Negara.

Terima kasih, kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya.

Wassalamu 'alaikum Wr.Wb.

FRAKSI DEMOKRAT
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

 KETUA <u>H. HARNO, SE</u>		 SEKRETARIS <u>IMRO'ATUS SOLICHAH</u>
--	---	--

PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI GOLKAR
DPRD KABUPATEN REMBANG



Terhadap
Rancangan Peraturan Daerah
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang TA 2012



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA

Sekretariat: DPRD Rembang, Jl. Diponegoro No.88, Rembang 59212

PENDAPAT AKHIR

FRAKSI PARTAI GOLKAR DPRD KABUPATEN REMBANG

terhadap

Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012

Disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Rembang

Selasa, 18 September 2012

Juru Bicara:

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Yth. Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang
- Yang kami hormati Sdr. Pimpinan dan Segenap anggota DPRD Kabupaten Rembang
- Yth. Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang
- Yth. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang
- Yth. Sdr. Staf Ahli, Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian Setda dan Camat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.
- Yth. Sdr. Pimpinan Organisasi Kemasyarakatan, LSM, rekan wartawan dan segenap hadirin yang berbahagia.

Sebelum menyampaikan Pendapat Akhir ini, mari kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan kenikmatan sehingga kita bisa hadir dalam suasana yang sehat bahagia penuh rahmah dan berkah dari-NYA. Kami mengajak panjenengan semua "*memayu hayuning bawana*", artinya mari berbuat baik kepada sesama manusia dan alam semesta, untuk melindungi kehidupan dunia dan masa depan.

Rapat Dewan dan hadirin yang terhormat

Setelah melalui pembahasan yang mendalam antara komisi-komisi dengan SKPD terkait dan memperhatikan perkembangan suasa kemasyarakatan Kabupaten Rembang, dengan semboyan *SUARA RAKYAT adalah SUARA GOLKAR* tibalah saatnya kami menyatakan bahwa, pada prinsipnya Fraksi Partai GOLKAR DPRD Kabupaten Rembang tidak keberatan atas

penetapan RAPERDA APBD Perubahan APBD TA 2012 menjadi PERDA, namun kami merekomendasikan beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut, sbb:

- Pada pembahasan APBD atau APBD Perubahan, kami masih melihat fungsi koordinasi perencanaan dalam SKPD belum berjalan sebagaimana mestinya, terkesan asal jadi. Disaat mendatang hendaknya SKPD memperhatikan hal-hal sbb:
 - ❖ SKPD mempersiapkan RKA-nya dengan cermat, misalnya harga satuan biaya untuk jenis yang sama, antara bidang/bagian/seksi/sub bagian/UPT satu dengan yang lain dalam satu SKPD tidak menurut selera masing-masing.
 - ❖ Pejabat yang datang dalam pembahasan antara komisi DPRD dengan SKPD hendaknya menguasai masalah yang dibahas, misalnya saat ditanya anggota komisi dijawab “tidak tahu, kami hanya menghimpun dari UPT/bidang”. Kalau perlu UPT diajak hadir agar bisa memberi penjelasan yang memuaskan. Kami berikan contoh, PUSKESMAS diberi tugas untuk menyusun rencana anggaran sendiri, kami harap pada Dinas Kesehatan ada pejabat yang menguasai program/kegiatan PUSKESMAS agar pada saat pembahasan berjalan lancar.
- Dengan bertambahnya anggaran melalui APBD Perubahan ini hendaknya Pemerintah lebih berhati-hati dalam membelanjakan uang rakyat, digunakan sesuai peruntukannya agar tidak terjadi pemborosan atau mengambil untung demi kepentingan pribadi.

- Kepada SKPD pemungut PAD yang yang target pendapatannya bertambah pada APBD Perubahan ini, (misalnya Dinas Kelautan & Perikanan) kami berharap hendaknya bekerja lebih keras agar bisa mencapai target yang ditetapkan.
- Kegiatan yang bisa dianggarkan dalam APBD tahun berikutnya hendaknya jangan dipaksakan masuk dalam APBD Perubahan. Sehingga tidak berimbas pada dikurangi/ ditunda/dibatalkannya kegiatan yang lain.
- Ada perubahan anggaran yang meningkat hingga 150% bahkan 400 %, rasanya hal ini tidak etis dan logis. Untuk itu kami berharap agar hal ini tidak terjadi pada masa mendatang.
- Dalam penyusunan rancangan APBD atau APBD Perubahan, pemerintah harus selalu memperhatikan aspek realistis dan relevansinya terhadap tujuan kegiatan, serta harus transparan dan proporsional, sehingga tidak terkesan seolah-olah anggota DPRD dianggap sebagai *tukang jagal* anggaran pemerintah.
- Pengelolaan keuangan melalui SKPD sebagai penerima dan penanggung jawab kegiatan pembangunan daerah harus selalu mempertimbangkan aspek efisiensi dan proporsional dalam memenuhi target kebutuhan, serta selalu transparan dan relevan serta realistis dalam pertanggungjawabannya.
- Di bidang pelayanan kesehatan, untuk kesekian kalinya kami menghimbau kepada BLUD RS Dr Soetrasno untuk

lebih meningkatkan pelayanan kepada pasien, perlu adanya pengawasan dan kalau perlu ada sanksi kepada para petugas yang dianggap kurang baik pelayanannya. Banyak sekali keluhan masyarakat terhadap pelayanan RS Dr. Soetrasno dan bagi masyarakat yang mampu lebih puas berobat keluar kota. Kami bermimpi kapan RSUD Dr Soetrasno menjadi tuan rumah atau pelayan yang baik di negeri sendiri.

- Mengenai parkir di RS Dr Soetrasno, untuk kesekian kalinya kami minta agar pihak RSUD Dr Soetrasno memerintahkan pengelola parkir untuk memperhatikan keamanan dan kenyamanan parkir dengan membangun peneduh. Masyarakat pengguna sudah rela membayar jasa parkir, sebagai imbal baliknya pihak pengelola harus memberi pelayanan yang baik kepada masyarakat. Khusus untuk parkir penunggu pasien agar diberi karcis atau kupon khusus agar tidak berkali-kali membayar parkir untuk satu hari.
- Untuk kesekian kalinya pula kami berharap peningkatan kinerja dan profesionalisme PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

Saudara Bupati yang kami hormati.

“Sukeng tyas yen den hita”, hendaknya kita suka dan bersedia menerima nasihat, kritik, tegoran. Beberapa kalangan masyarakat Kabupaten Rembang keberatan dengan digantinya nama Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang menjadi Dampo Awang Beach. Sebutan Taman Kartini sudah begitu familier di telinga masyarakat Rembang, sedang tokoh

Dampo Awang menurut cerita adalah musuh Sunan Bonang. Untuk itu kami menghimbau agar nama "*Dampo Awang Beach*" diganti dan dikembalikan menjadi "*Taman Rekreasi Pantai Kartini Rembang*".

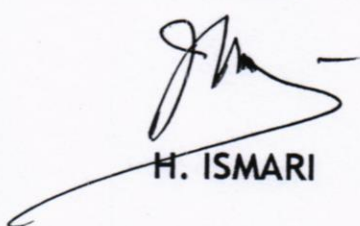
Rapat Dewan dan hadirin yang berbahagia,

"Sura dira jyaningrat, lebur dening pangastuti", artinya sifat keras hati/picik/angkara murka, akan dikalahkan dengan sikap bijak, lembut hati dan sabar. Akhirnya, bila ada kata yang kurang berkenan pada penyampaian Pendapat Akhir Fraksi Partai GOLKAR kali ini, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga Tuhan YME senantiasa memberikan berkah dan bimbingan untuk kita semua dalam menjalankan tugas dan pengabdian kita untuk membangun Kabupaten Rembang.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

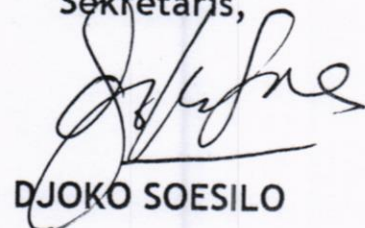
**DPRD KABUPATEN REMBANG
FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA**

Ketua,

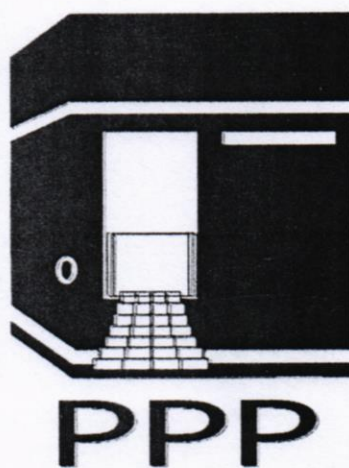

H. ISMARI



Sekretaris,


DJOKO SOESILO

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2012**



DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
HARI : SELASA
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2012
Dibacakan oleh :

**FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl. P.Diponegoro no.88 Rembang Telp. (0295) 693292**

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI PARTAI PERSATUAN PEMBAGUNAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH (APBD)
TAHUN ANGGARAN 2012**

DI SAMPAIKAN DALAM RAPAT PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
HARI : SELASA
TANGGAL : 18 SEPTEMBER 2012
Dibacakan oleh :

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Yang kami hormati saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang

Yang kami hormati :

- Saudara Pimpinan dan anggota DPRD kabupaten Rembang;
- Saudara Muspida kabupaten Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Negeri dan Kejaksaan Negeri Rembang;
- Saudara ketua Pengadilan Agama kabupaten Rembang;
- Saudara Sekda, Asisten Sekda, Kepala Bagian, Kepala Dinas, Kepala Kantor, dan Camat se- kabupaten Rembang;
- Saudara Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang;
- Saudara-saudara dari kalangan media serta semua yang hadir pada sidang paripurna hari ini yang berbahagia.

Alhamdulillah robbil'alamien, segala puja dan puji syukur senantiasa kita haturkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan yang tiada memberikan beban kepada hambaNya kecuali sesuai dengan kesanggupan hambaNya, Tuhan yang selalu memberi pertolongan kepada para hambanya serta memberi petunjuk bagi siapapun yang dikehendakiNya, Tuhan yang telah menjadikan kita termasuk golongan orang yang senantiasa mendapat nikmat dan karuniaNya,

sehingga pada saat ini kita dapat hadir mengikuti sidang paripurna DPRD kabupaten Rembang dengan agenda penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi sekaligus persetujuan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 ini dalam keadaan sehat wal afiat.

Sholawat dan salam senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Muhammad SAW, Nabi yang pada dirinya suri tauladan yang baik bagi siapa saja yang mempercayai dan mengikuti ajaran-ajaran beliau, Nabi yang tiada lagi setelahnya, Nabi yang kepadanya kita harapkan syafaatnya besok pada hari kiamat. “ HUWAL HABIBULLADHI TURJA SYAFA'ATUHU – LIKULLI HAULIN MINAL AHWALI MUQTAHIMI ”

Saudara Bupati, wakil Bupati sidang dewan yang termat,

Mengawali Pendapat akhir Fraksi ini, kami FP3 mengucapkan “selamat” atas terselenggaranya Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama’ (NU) di Cirebon, semoga dapat menghasilkan keputusan-keputusan, fatwa-fatwa ulama’ yang membawa kemaslahatan ummat pada umumnya, serta memberikan sumbangsih atas kemajuan negara kita tercinta Indonesia, semoga....., amien.

Saudara-saudara, hadirin sidang dewan yang terhormat...!

Melalui forum yang mulia ini, kami FP3 mengecam keras atas beredarnya film “**Innocence of muslims**” yang mendiskreditkan ummat Islam dengan menghina Nabi Muhammad SAW. Film ini membuat kemarahan besar bagi sebagian besar ummat Islam, bahkan membangkitkan gelombang demo memprotes atas beredarnya film tersebut di berbagai negara di dunia. FP3 mengutuk keras bagi pembuat dan pengedar film **Innocence of muslims**.

Bahwa pembahasan Raperda Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah sesuatu yang sangat penting, perlu kehati-hatian, cermat dan aspiratif. Untuk sebuah hasil yang baik, tentu membutuhkan system pembahasan yang komperhensif dan dibutuhkan waktu yang memadai, mengapa? Karena dalam perubahan ini ada beberapa yang dalam perjalanan waktu, ada kemungkinan yang harus di *cancel* dan ada pula kemungkinan hal-hal yang harus dimasukkan menurut sekala prioritas.

Pada tataran implementasi / pelaksanaan APBD ini adalah sesuatu yang tidak mudah. FP3 berharap pihak eksekutor yakni eksekutif dalam hal ini, dapat melaksanakan semua kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek fisik maupun non fisik sesuai dengan apa yang tertuang dalam Perda APBD ini dengan tepat, baik tepat waktu pelaksanaannya maupun tepat sasaran yang ingin dicapai.

Hadirin sidang dewan yang terhormat.

Sebagai salah satu dari empat pilar program pemerintah kabupaten Rembang, Program Jaminan Kesehatan Rembang Sehat (JKRS) mendapat apresiasi positif dari masyarakat. Pemerintah harus serius dalam menangani pelaksanaan program JKRS ini, jangan hanya indah didengar tapi tidak enak dirasakan.

Demikian juga terkait dengan program sekolah gratis yang sudah menjadi komitmen pemerintah daerah untuk menjadi salah satu program prioritas daerah, bahkan termasuk salah satu program empat pilar kabupaten Rembang, FP3 minta agar anggaran terkait dengan program tersebut tercukupi sehingga tidak ada lagi kekurangan pada setiap tahun anggaran.

FP3 menilai program sekolah gratis ini adalah program sangat baik dan mulia, sehingga jangan sampai program yang baik dan mulia ini menjadi gagal karena tidak didukung dengan anggaran yang memadai. Karena itu FP3 berharap ditahun 2012 ini kekurangan anggaran didalam program sekolah gratis, dapat diselesaikan. Sebab ada beberapa sekolah negeri dan swasta yang biaya operasionalnya menunggu cairnya program sekolah gratis ini.

Terobosan baru yang telah di lakukan oleh Pemerintah Daerah dibidang pendidikan yakni memberikan subsidi biaya kepada peserta didik baru terutama bagi keluarga kurang mampu ini, FP3 sangat memberikan apresiasi positif. Untuk masuk sekolah/madrasah baru, dimana anak harus membayar seragam, "uang gedung", daftar ulang, SPP dan sebagainya dirasa sangat berat, terutama bagi keluarga kurang mampu. Namun sekali lagi FP3 meminta agar program tersebut benar terlaksana dan tidak ada lagi kendala apapun, terutama anggaran, semoga.....!

Hadirin sidang dewan yang terhormat.

Terkait di bidang perekonomian, FP3 meminta agar pemerintah dapat menggerakkan perekonomian rakyat, antara lain dengan membangun sarana-sara perekonomian rakyat seperti pasar, sentra-sentra perdagangan rakyat, serta sarana lain yang dapat menunjang pertumbuhan perekonomian masyarakat.

Saudara Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD serta hadirin yang berbahagia....

Dari apa yang telah disepakati di komisi-komisi, Banggar dengan berbagai proses yang tentu tidak mudah, akhirnya dengan mengucapkan *bismillaahirrahmaanirrahiem, laahaula waaa quwwata illaa billahil'aliyyil adziim*, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan **MENYETUJUI** Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan tahun anggaran 2012 ini untuk di sahkan dengan berbagai rekomendasi-rekomendasi dan catatan-catatan yang ada.

Demikian Pendapat Akhir FP3 yang kami sampaikan, dengan harapan semoga APBD Perubahan Tahun Anggaran 2012 ini dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan sasaran. Akhirnya segala kesalahan dan kekhilafan kami mohon maaf, teriring doa semoga rahmat, taufiq dan hidayah-Nya senantiasa mengiringi langkah kita dalam melaksanakan aktifitas sehari-hari. Amien, Amien, Amien yaa Robbal 'alamien...!

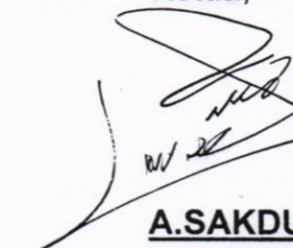
Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Rembang, 18 September 2012

Fraksi PPP,

Ketua,

Sekretaris,




A.SAKDULLAH

KODRIYAH, S.Pd.I



PARTAI KEBANGKITAN BANGSA

Membela Yang Benar

Pendapat Akhir
FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APBD TAHUN ANGGARAN 2012

disampaikan oleh m. sholeh

Pada Sidang Paripurna DPRD kabupaten Rembang, Selasa 18 September 2012

Assalamu 'alaikum wr wb.

Yang kami Hormati, Bupati dan Wakil Bupati Rembang beserta jajarannya di lingkungan Pemkab Rembang

Yang Kami Hormati, segenap jajaran Forum Pimpinan Daerah Kabupaten

Yang kami Hormati, Pimpinan Sidang, Ketua dan Para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Rembang, beserta segenap anggota DPRD kabupaten Rembang.

Yang kami Hormati, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD kabupaten Rembang beserta jajarannya.

Yang kami Hormati, kawan-kawan pers, kawan-kawan partai politik dan hadirin yang berbahagia.

Untuk mengawali pendapat akhir kami terhadap raperda perubahan APBD tahun anggaran 2012 ini perkenalkan kami mengingatkan kepada semua pemangku kebijakan untuk mencermati pertanda dini atas perkiraan kemarau panjang di tahun ini. Setidaknya telah beberapa kali mobil pemadam kebakaran berlalu lalang menjalankan tugasnya. Bukan ini saja, kemarau panjang dipastikan akan menyebabkan kebutuhan air dan air bersih menjadi sulit di beberapa daerah langganan kekeringan.

Kami juga mengingatkan kepada semua pihak atas kegagalan pendidikan holistik kita, yaitu pendidikan budi pekerti. Ada realitas yang luput jangkauan pandang kita karena terlalu sibuk terbelit oleh persoalan pragmatis politis. Para pejabat dan pemangku kebijakan terlalu sibuk dengan kalkulasi politik untuk melanggengkan kekuasaan, sementara sebagai orang tua terlalu sibuk dengan urusan pekerjaan atau urusan material belaka, hanya menyerahkan urusan kepada pendidik yang waktunya terbatas di sekolah.

Belajar dari tertangkapnya Keyko yang memperdagangkan gadis remaja 18 – 22 tahun untuk kalangan atas dan maraknya tawuran pelajar seharusnya melahirkan sebuah refleksi dan secara jujur sebaiknya diakui, para orang tua telah mempersempit makna pendidikan hanya pada wilayah persekolahan. Orang tua merasa nyaman apabila anak-anaknya telah pamit sekolah atau ada pelajaran tambahan dan belajar kelompok di rumah temannya. Adakah kita mampu mengontrol bahwa pamit ke sekolah bisa saja menjadi modus anak-anak untuk lepas dari pengamatan orang tua. Atau, kita terlalu dininabobokkan untuk memilih sekolah favorit lalu merasa telah memberikan pendidikan paling optimal kepada anak.

Adakah kita pernah menyadari dan mempertanyakan bahwa diantara anak-anak yang masih berseragam sekolah dan berada di tempat-tempat wisata bersama pasangannya adalah anak-anak kita? Adakah kita tersentuh untuk mengamati diantara anak-anak berseragam sekolah pada jam pelajaran yang berada kedai kopi, tempat PS, atau bergerombol di tempat-tempat tertentu adalah anak-anak kita? Adakah kita prihatin mereka yang bergerombol di sekitar alun-alun kabupaten Rembang dan berseragam sekolah pada saat orang-orang lain berjama'ah sholat jum'ah adalah anak-anak kita?. Kita tampaknya diam saja karena tidak ada anak kita di sana? Tetapi pernahkah kita menyadari bahwa mereka adalah anak-anak kita yang akan meneruskan estafet negeri dan daerah tercinta?

Bahwa pendidikan holistik dimulai dari rumah dengan menanamkan nilai-nilai moral, sebab sekolah saat ini mengalami penurunan dalam hal mengajarkan nilai-nilai moral, terlalu terjerambab pada "nilai-nilai ujian". Patut kita sadari bersama terjerumusnya anak-anak lebih didominasi oleh komunikasi dan teladan orang tua dan para pemimpin dalam menanamkan nilai-nilai moral.

Sidang Dewan Yang Kami Mulyakan

Di lain pihak kondisi ini ditambah lagi dengan munculnya idiologi-idiologi baru sebagai akibat euforia demokrasi. Idiologi baru yang lahir melalui informasi dan teknologi maupun idiologi yang sifatnya radikal telah memasuki para remaja kita yang dibuktikan oleh tertangkapnya teroris berusia muda telah melemahkan idiologi kebangsaan yang kita miliki.

Kami berharap Pemkab melalui Kesbang Linmas segera *cancel taliwondho* membentengi pudarnya idiologi kebangsaan ini dengan melakukan aktualisasi wawasan kebangsaan secara konseptual, metodologis, strategis, serta indoktrinasi yang jujur.

Pimpinan Sidang, Saudara Bupati-Wakil Bupati dan Hadirin Yang Kami Hormati

Sebelum melanjutkan hasil akhir pendapat kami tentang perubahan APBD tahun anggaran 2012 ini perkenankan juga kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan layanan kesehatan dan komunikasi serta koordinasi antara legislatif dengan eksekutif.

Berkaitan dengan pembahasan perubahan APBD tahun 2012 ini kami "terpaksa" tidak menyetujui beberapa program dan mengalihkannya untuk program yang lain bukan karena programnya yang tidak baik tetapi karena SKPD yang bersangkutan tidak mampu menjelaskan secara komperhensif Kerangka Acuan Kerja (KAK) maupun RKA-nya kepada kami. Bahkan ada kesan beberapa SKPD yang sangat percaya diri tetapi ketika diperdalam tidak mampu menjelaskannya secara baik. Akibatnya kami ragu dengan program mereka.

Berkaitan dengan layanan kesehatan kami prihatin dengan kondisi para pembesuk yang istirahat di depan pintu gerbang RSUD R Soetrasno pada siang tidak teratur. Mereka duduk dan tiduran di depan pintu karena tidak tersedianya ruang tunggu bagi para pembesuk. Lebih dari itu para penjaga keamanan di RSUD sebaiknya jangan bersikap angkuh tetapi bersikap untuk melayani dengan senyum.

Kami dapat memahami bahwa munculnya kasus pencurian yang dilakukan oleh mereka yang pura-pura menjadi pengunjung menimbulkan kewaspadaan yang tinggi. Tentunya kewaspadaan ini harus dibarengi dengan kemampuan memberikan layanan bagi para keluarga pasien secara cukup. Kami menilai layanan beberapa tahun yang lalu jauh lebih baik dibandingkan kondisi setelah gedungnya tampak besar dan megah.

Contoh kasus, bayi primatur yang meninggal sendirian tanpa didampingi orang tuanya (Kamis, 13 September 2012) menjadi contoh agar jangan terulang lagi. Bayi ini ditinggal sendirian karena orang tuanya tengah sibuk mengurus jamkesmas dan biaya untuk perawatan bayi tersayangnya. Ini yang menyebabkan FKB mulai mempertanyakan apa benar jika program layanan gratis untuk warga tidak mampu dilayani dengan seadanya? Mereka dilayani jika telah memenuhi beberapa biaya dan administrasinya?

Berita di Suara Merdeka 14 September 2012 dengan judul "Orang Tua Bayi Prematur Berusaha Urus Jamkesmas" pada alenia terakhir ditulis " ... Kapolres menambahkan, pihaknya juga telah meminta keterangan dari saksi, baik bidan dan perwakilan rumah sakit ... dari pemeriksaan itu, untuk sementara kami menyimpulkan tidak ada unsure kesengajaan. Namun lebih karena minimnya kondisi ekonomi orang tua pasien ...". Jangan-jangan ini membenarkan "orang miskin dilarang sakit".

Ini adalah bagian kasus yang seharusnya menjadi pembelajaran bagi RSUD R. Soetrasno untuk semakin memberikan layanan yang terbaik bagi pasien. Layanan juga dapat dibuktikan dari performance kantor, jangan ada dikresi untuk yang miskin dan kayak arena di front office layanan jamkesmas hanya ada satu loket sementara yang lain lebih banyak.

Di luar kasus ini, kami berkewajiban memberikan apresiasi terhadap RSUD R. Soetrasno yang telah mampu menambah dokter-dokter spesialis dan tampak bersih tidak kumuh lagi. Prestasi ini akan semakin sempurna jika pelayanan kepada pasien, juga kepada pasien miskin bisa semakin optimal. Inilah yang menyebabkan kami meyakini bahwa kurangnya layanan RSUD R. Soetrasno bukan pada masalah managerial, tetapi lebih kepada masalah kebijakan yang lebih tinggi. Utamanya masalah JKRS dan Jamkesmas yang masih setengah hati.

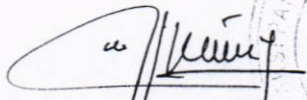
Sidang Dewan Yang Kami Mulyakan

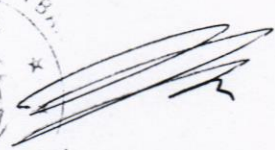
Dengan mengucapkan *bismillahirrahmanirrahim* kami dapat menerima Raperda Perubahan APBD tahun 2012 untuk selanjutnya ditetapkan sebagai Perda.

Demikian pendapat akhir ini kami sampaikan agar mendapatkan perhatian semua pihak. Kami berharap selalu ada tahapan kemajuan bagi proses menyejahterakan masyarakat Rembang melalui layanan birokrasi yang prima.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Rembang, 18 September 2012
Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa


Muhammad Asnawi, SPdI
Ketua


Puji Santoso, SE
Sekretaris



Pendapat Akhir
FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG

Terhadap
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2012

Dibacakan Oleh,
RIDWAN, SH.

PADA SIDANG PARIPURNA
DPRD KABUPATEN REMBANG
SELASA, 18 SEPTEMBER 2012



**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG**

Pemandangan Umum

**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Terhadap

**RANCANGAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

Dibacakan Oleh,

RIDWAN, SH.

**Assalamualaikum warohmatullahi wabarokatuh
Salam sejahtera untuk kita semua
MERDEKA...!!!**

Yang terhormat, Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang;

Yang terhormat, Saudara Ketua beserta Pimpinan DPRD Kabupaten Rembang.

Yang terhormat, Saudara Pimpinan Fraksi, Komisi, Badan Legislasi Daerah, Badan Kehormatan dan Saudara-Saudaraku Anggota DPRD Kabupaten Rembang.

Yang terhormat, Saudaraku yang tergabung dalam Forum Koordinasi Daerah.

Yang terhormat, Saudara Sekretaris Daerah dan Sekretaris DPRD Kab. Rembang

Yang terhormat, Saudara Staf Ahli Bupati, para Asisten Sekretaris Daerah, Kepala Dinas, Kepala Kantor, Kepala Badan, Kepala Bagian, serta Saudaraku-Saudaraku Camat se-Kabupaten Rembang;

Hadirin, Peserta Sidang Paripurna DPRD Kabupaten Rembang yang berbahagia.

Alhamdulillah robbil 'alamin, wabihi nasta'inu 'ala umuuriddunya wa addin...

Puja dan puji syukur selalu kami panjatkan ke hadirat Ilahi Robbi, atas segala nikmat dan karuniaNya sehingga di pagi yang cerah ini, kita semua dapat menjalankan tugas dan aktivitas sehari-hari.

Sehubungan dengan kewajiban rutin konstitusional kami sebagai Fraksi yang harus menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terkait Pengantar Nota Keuangan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012, maka kami menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada Saudara Bupati dan Wakil Bupati Rembang yang telah memerintahkan kepada seluruh jajaran SKPD Kabupaten Rembang guna menghadiri pembahasan anggaran perubahan ini bersama DPRD dan mampu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang kita jadwalkan, semoga setiap kegiatan yang dilaksanakan dengan tulus oleh para SKPD, Fraksi, Komisi, TAPD, Badan Anggaran dan pihak-pihak terkait yang membantu selama pembahasan Anggaran Perubahan ini dicatat sebagai amal baik dan dapat bermanfaat bagi masyarakat Rembang.

Hadirin, Sidang Paripurna Yang Berbahagia,

Berkaitan dengan disepakatinya anggaran pemeliharaan jalan dan jembatan maka kami mendorong kepada Pemerintah Kabupaten Rembang agar dalam sisa waktu yang ada Pemkab bisa melaksanakan perbaikan atas jalan-jalan yang rusak secara transparan dan akuntabel serta mampu memberikan kenyamanan bagi pengguna jalan sebagai wujud tanggung jawab pemerintah kepada para pembayar pajak serta sebagai wujud terlaksananya kewajiban penguasa kepada rakyatnya.

Kedepan, kami berharap agar dalam suatu SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang tidak lagi menerapkan standar ganda dan beragam dalam menentukan standarisasi harga dalam penganggaran, namun akan lebih baik jika penerapan standarisasi harga dalam suatu SKPD dapat dilaksanakan secara single standarisasi dengan memakai standar terendah guna penghematan dan pemerataan anggaran.

Tak henti-hentinya kami mendorong kepada manajemen BLUD RSUD dr. Soetrasno Rembang terkait aspek pelayanan, apalagi katanya sudah mendapatkan sertifikasi ISO mestinya sembarang terkait pelayanan kudu ISO, kudu ISO ramah, kudu ISO ora cemberut, kudu ISO nambani sampek waras, terutama kepada pasien yang menggunakan fasilitas JKRS dan JAMKESMAS yang nota bene adalah masyarakat yang kurang beruntung.

Demikian Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan dibuat, selama tidak bertentangan dengan peraturan-perundangan yang berlaku, Fraksi dapat menyetujui ditetapkannya Raperda ini menjadi Perda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012.

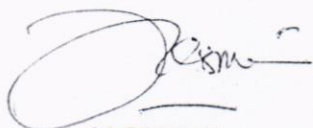
Ada kurang lebihnya mohon maaf...

**Wassalamu'alaikum warohmatullahi wabarokatuh
MERDEKA...!!!**

Rembang, 18 September 2012

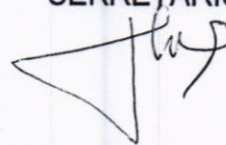
**FRAKSI PDI PERJUANGAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

KETUA,



JASMANI

SEKRETARIS,



SUMARSIH



PENDAPAT AKHIR FRAKSI
TERHADAP
RAPERDA PERUBAHAN APBD T.A 2012

18 SEPTEMBER 2012

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KABUPATEN REMBANG

PENDAPAT AKHIR FRAKSI

TERHADAP

RAPERDA PERUBAHAN APBD T.A 2012

Dibacakan Oleh : SUKARMAIN

Yang Terhormat,

Saudaraku Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Rembang

Saudaraku Bupati dan Wakil Bupati Rembang.

Saudaraku Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang

Saudaraku Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang.

Saudaraku Sekretaris DPRD, Staf Ahli Bupati, Asisten Sekda, Kepala Badan, Kepala

Dinas, Kepala Kantor, Kepala Bagian dan Camat Lingkungan Pemerintah Kab. Rembang.

Saudaraku Pimpinan Organisasi Profesi, LSM dan hadirin yang berbahagia.

Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan Rahmat serta Karunianya, sehingga pada hari ini kita dapat menyampaikan Pendapat Akhir Fraksi terhadap Raperda tentang Perubahan APBD T.A 2012 dalam keadaan sehat.

Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada *uswatun hasanah*, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabat yang setia mengikuti sunnahnya. Semoga kita termasuk di dalamnya. *Aamin.*

Saudaraku Pimpinan dan hadirin yang berbahagia,

Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, adalah kesempatan yang diberikan kepada pemerintah daerah, sesuai dengan Peraturan Menteri dalam Negeri nomor 21

tahun 2011, untuk melakukan penyesuaian alokasi anggaran agar lebih optimal. Pada kesempatan ini Fraksi Partai Amanat Nasional :

1. Tren kenaikan dana hibah dan bantuan sosial baik dari pemerintah pusat atau daerah adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah untuk pemberdayaan masyarakat baik dari segi ekonomi ataupun politik. Aliran dana yang cukup besar ini seyogyanya diikuti dengan sistem pembinaan dan pengawasan yang memadai, sehingga tren ini tidak menjadikan kesempatan penyalahgunaan dana dari wilayah birokrasi ke masyarakat langsung. Untuk itu kami mengharapkan di tahun anggaran 2013 dialokasikan dana dan sumber daya manusia yang cukup untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan program-program hibah dan bantuan sosial.
2. Mensikapi Kebijakan pemerintah tentang pencabutan subsidi untuk kendaraan milik pemerintah (dinas), kami merekomendasikan agar pemerintah daerah (secara bertahap) mulai mengganti kendaraan-kendaraan yang umur teknis dan ekonomisnya sudah tidak layak dan efisien. Penggunaan kendaraan-kendaraan tersebut malah akan menambah beban operasional pemerintah.
3. Pasar Tradisional adalah salah satu pintu rejeki bagi masyarakat. Ratusan bahkan ribuan orang yang menggantungkan mata pencahariannya pada sector ini. Menjadi tanggung jawab kita bersama untuk menjaga kelangsungan hidup Pasar Tradisional. Kami tidak anti investasi dan kami menyadari bahwa kemampuan keuangan daerah belum cukup untuk melakukan revitalisasi pasar, tetapi menyerahkan Revitalisasi Pasar kepada pihak investor justru akan memberatkan para pedagang.

Untuk itu seiring dengan raperda inisiatif tentang penataan pasar tradisional dan program pemerintah tentang perkuatan pasar tradisional, kami mengharapkan pemerintah daerah pada tahun 2013 untuk segera menganggarkan kegiatan penyusunan *Detil Engineering Design* atau perencanaan masing-masing pasar untuk diusulkan pada Kementerian terkait. Kalo daerah atau kota lain bisa, kenapa kita tidak.

Saudaraku Pimpinan sidang dan hadirin yang kami muliakan,

Demikianlah pendapat akhir dari Fraksi Partai Amanat Nasional dan kami menyetujui Raperda Perubahan APBD T.A 2012 ditetapkan menjadi Peraturan Daerah agar dapat dilaksanakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Amin.

Billahi taufiq wal hidayah.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Rembang, 18 September 2012

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL DPRD KAB. REMBANG

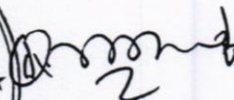
Ketua



JIHAD ASIA PUSTAKAWAN, SE.



Sekretaris



MOH. IMAM ZARKASI

**PANDANGAN AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN
TERHADAP
RAPERDA APBD TAHUN ANGGARAN 2012**



REMBANG , 18 SEPTEMBER 2012

**PANDANGAN AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG**

TERHADAP

**RAPERDA APBD
TAHUN ANGGARAN 2012**



REMBANG, 18 SEPTEMBER 2012



**FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG
Jl.P.Diponegoro No.88 Rembang (0295) 691194
Kode Pos 59251**

**PENDAPAT AKHIR
FRAKSI BINTANG KEADILAN DPRD KABUPATEN REMBANG
TERHADAP
RAPERDA APBD KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2012**

Selasa, 18 September 2012

Dibacakan oleh : DHIAN RAHWENI DEWI , SE

بسم الله الرحمن الرحيم

ASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Yang kami hormati , Sdr. Pimpinan DPRD dan segenap Anggota DPRD ;

Yang kami hormati , Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Rembang ;

Yang kami hormati , Sdr. Bupati dan Wakil Bupati Rembang ;

Yang kami hormati , Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang ;

Yang kami hormati, Sdr. Staf ahli Bupati , Asisten Sekretaris Daerah , Kepala
Badan , Kepala Dinas , Kepala Kantor , Kepala Bagian dan
Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang ;

Yang kami hormati, Sdr. Pimpinan Organisasi Profesi , LSM dan Hadirin yang
berbahagia serta semua Masyarakat Rembang yang kami
cintai;

Mengawali sambutan ini perkenankanlah kami mengajak hadirin sekalian
untuk selalu memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, karena atas limpahan
rahmat dan hidayahNYA kita dapat menyelesaikan semua tahapan pembahasan

RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2012, sekaligus dapat hadir dalam sidang paripurna ini dalam rangka penyampaian Pandangan Akhir Fraksi-Fraksi terhadap RAPBD Perubahan Tahun Anggaran 2012.

Setelah melakukan pencermatan dan pengkajian baik di tingkat Fraksi maupun di tingkat Komisi-Komisi . FBK dapat menerima RAPBD perubahan Tahun Anggaran 2012 menjadi PERDA APBD PERUBAHAN KABUPATEN REMBANG 2012. Dengan beberapa rekomendasi sebagai berikut :

1. Agar RSUD DR. SUTRASNO REMBANG meningkatkan kualitas pelayanan.
2. Untuk tidak memberatkan keluarga pasien, FBK mengharapkan agar di berlakukan kartu parkir khusus bagi penunggu pasien, sehingga tidak terjadi penarikan restribusi parkir dalam satu hari.
3. Terkait dengan Pilar ke 3 tentang pemberdayaan ekonomi masyarakat agar Pemerintah Daerah lebih memperhatikan Manajemen seluruh pasar yang ada di kabupaten rembang. Termasuk penganggarannya. Di samping itu PEMKAB REMBANG sebaiknya belajar kepada PEMKOT SURAKARTA yang telah berhasil menata pasar tradisional tanpa ada permasalahan yang merugikan pedagang.
4. Sehubungan dengan kesemrawutan lingkungan pasar kota Rembang terutama terganggunya lalu lintas akibat munculnya parkir- parkir liar dan pedagang-pedagang liar yang berdampak pada keengganannya masyarakat untuk berbelanja di pasar tersebut, FBK merekomendasikan agar SKPD terkait yaitu : DISHUBKOMINFO, DINPERINDAGKOP UMKM serta SATPOL PP agar berkoordinasi untuk menertibkan pasar .

Demikian Pendapat Akhir FBK ,Kami Sampaikan Semoga Bermanfaat.

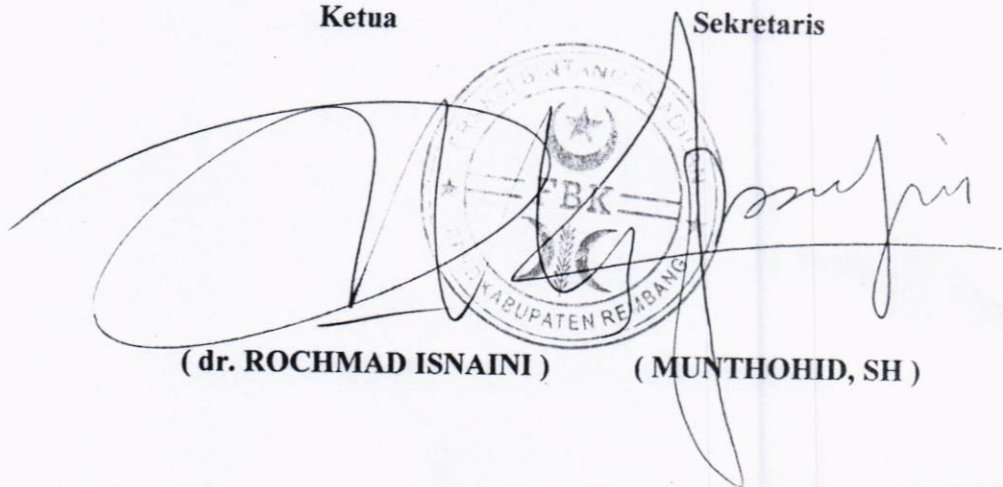
WASSALAMU'ALAIKUM WR.WB

Rembang, 18 September 2012

**FRAKSI BINTANG KEADILAN
DPRD KABUPATEN REMBANG**

Ketua

Sekretaris



The image shows two handwritten signatures. The signature on the left is for the Chairman, and the signature on the right is for the Secretary. Both signatures are written in black ink and are positioned over a circular official stamp. The stamp contains the text 'FRAKSI BINTANG KEADILAN' at the top, 'FBK' in the center, and 'DPRD KABUPATEN REMBANG' at the bottom. The stamp also features a star and a crescent moon symbol.

(dr. ROCHMAD ISNAINI)

(MUNTUHOID, SH)



BUPATI REMBANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3988) ;

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perubahan Ketigabelas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 24);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
26. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 61);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2007 Nomor 99 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 72);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 81);

3. Pembiayaan Daerah		
a. Penerimaan		
1). Semula	Rp. 19.794.522.962,00	
2). Bertambah	<u>Rp. 13.668.417.281,00</u>	
Jumlah Penerimaan setelah perubahan		<u>Rp. 33.462.940.243,00</u>
b. Pengeluaran		
1). Semula	Rp. 14.548.576.000,00	
2). Bertambah	<u>Rp. 2.254.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan		<u>Rp. 16.802.576.000,00</u> (-)
Jumlah Pembiayaan Netto setelah perubahan		Rp. 16.660.364.243,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan.		Rp. 0,00

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- | | |
|---|------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | |
| 1. Semula | Rp. 89.947.696.000,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 5.094.095.800,00</u> |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan | Rp.95.041.791.800,00 |
| b. Dana Perimbangan | |
| 1. Semula | Rp.690.600.636.000,00 |
| 2. Berkurang | <u>(Rp. 28.589.000,00)</u> |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan | Rp.690.572.047.000,00 |
| c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah | |
| 1. Semula | Rp.210.952.239.500,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 11.776.236.500,00</u> |
| Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan | Rp.222.728.476.000,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pendapatan:
- | | |
|---|-----------------------------|
| a. Pajak daerah | |
| 1. Semula | Rp. 15.631.992.100,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 1.431.729.900,00</u> |
| Jumlah pajak daerah setelah perubahan | Rp.17.063.722.000,00 |
| b. Retribusi daerah | |
| 1. Semula | Rp. 22.857.412.900,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 278.891.800,00</u> |
| Jumlah retribusi daerah setelah perubahan | Rp.23.136.304.700,00 |

- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 3.071.211.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 2.668.495.000,00</u> | |
| Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan | | Rp. 5.739.706.000,00 |
- d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah
- | | | |
|--|---------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp. 48.387.080.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 714.979.100,00</u> | |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan | | Rp.49.102.059.100,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan:
- a. Dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1. Semula | Rp 41.795.028.000,00 | |
| 2. Berkurang | <u>(Rp. 28.589.000,00)</u> | |
| Jumlah dana bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak setelah perubahan | | Rp.41.766.439.000,00 |
- b. Dana alokasi umum
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.570.454.948.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi umum setelah perubahan | | Rp.570.454.948.000,00 |
- c. Dana alokasi khusus
- | | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 78.350.660.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah dana alokasi khusus setelah perubahan | | Rp. 78.350.660.000,00 |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :
- a. hibah
- | | | |
|--------------------------------|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. 622.670.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah hibah setelah perubahan | | Rp. 622.670.000,00 |
- b. dana darurat
- | | | |
|---------------------------------------|-----------------|----------|
| 1. Semula | Rp. 0,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah dana darurat setelah perubahan | | Rp. 0,00 |
- c. dana Bagi Hasil Pajak, Pajak dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | |
|--|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 31.343.784.500,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 10.309.866.500,00</u> | |
| Jumlah dana Bagi Hasil Pajak, Retribusi dan Bagi Hasil Lainnya setelah perubahan | | Rp. 41.653.651.000,00 |

- d. dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.107.189.630.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 1.466.370.000,00</u> | |
| Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah perubahan | | Rp.108.656.000.000,00 |
- e. bantuan Keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya
- | | | |
|---|-----------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 71.796.155.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah bantuan Keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya setelah perubahan | | Rp. 71.796.155.000,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.636.443.960.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 1.885.847.850,00</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan | | Rp.638.329.807.850,00 |
- b. Belanja Langsung
- | | | |
|---|------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp. 360.302.558.462,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 26.370.312.731,00</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan | | Rp.386.672.871.193,00 |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis belanja :
- a. belanja pegawai
- | | | |
|--|---------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp.559.916.493.000,00 | |
| 2. Berkurang | <u>(Rp. 1.240.271.150,00)</u> | |
| Jumlah belanja pegawai setelah perubahan | | Rp.558.676.221.850,00 |
- b. belanja bunga
- | | | |
|--|-------------------|-------------------|
| 1. Semula | Rp. 37.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | Rp. 37.000.000,00 |
- c. belanja subsidi
- | | | |
|--|--------------------|--------------------|
| 1. Semula | Rp. 700.000.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 0,00</u> | |
| Jumlah belanja bunga setelah perubahan | | Rp. 700.000.000,00 |
- d. belanja hibah
- | | | |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 21.026.064.000,00 | |
| 2. Bertambah | <u>Rp. 9.693.756.000,00</u> | |
| Jumlah belanja hibah setelah perubahan | | Rp. 30.719.820.000,00 |
- e. belanja bantuan sosial
- | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| 1. Semula | Rp 20.596.003.000,00 | |
| 2. Berkurang | <u>(Rp. 8.567.637.000,00)</u> | |
| Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan | | Rp. 12.028.366.000,00 |

f. belanja Bagi Hasil	Rp.	0,00
g. belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi /Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa		
1. Semula	Rp. 33.168.400.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 2.000.000.000,00</u>	
Jumlah belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan		Rp. 35.168.400.000,00
h. belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp 1.000.000.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 0,00</u>	
Jumlah belanja Tidak Terduga setelah perubahan		Rp. 1.000.000.000,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis belanja:		
a. belanja pegawai		
1. Semula	Rp. 53.723.825.375,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 1.911.799.600,00</u>	
Jumlah belanja pegawai setelah perubahan		Rp. 55.635.624.975,00
b. belanja barang dan jasa		
1. Semula	Rp.109.065.146.505,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 11.423.572.111,00</u>	
Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan		Rp.120.488.718.616,00
c. belanja Modal		
1. Semula	Rp.197.513.586.582,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 13.034.941.020,00</u>	
Jumlah belanja Modal setelah perubahan		Rp.210.548.527.602,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri atas:		
a. penerimaan		
1. Semula	Rp. 19.794.522.962,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 13.668.417.281,00</u>	
Jumlah penerimaan setelah perubahan		Rp. 33.462.940.243,00
b. pengeluaran		
1. Semula	Rp. 14.548.576.000,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 2.254.000.000,00</u>	
Jumlah pengeluaran setelah perubahan		Rp.16.802.576.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas jenis pembiayaan:		
a. sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya sejumlah		
1. Semula	Rp. 19.794.522.962,00	
2. Bertambah	<u>Rp. 13.668.417.281,00</u>	
Jumlah sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran sebelumnya setelah perubahan		Rp.33.462.940.243,00

- | | | | |
|-----|---|------------|-------------------------|
| b. | pencairan Dana Cadangan sejumlah | | - |
| c. | hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan sejumlah | | - |
| d. | penerimaan pinjaman daerah sejumlah | | |
| | 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| | 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| e. | penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman sejumlah | | |
| | 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| | 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman setelah perubahan | Rp. | 0,00 |
| f. | penerimaan Piutang sejumlah | | - |
| g. | pencairan Deposito sejumlah | | - |
| (3) | Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pembiayaan: | | |
| a. | pembentukan dana cadangan sejumlah | | - |
| b. | penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | | |
| | 1. Semula | Rp. | 5.000.000.000,00 |
| | 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>2.254.000.000,00</u> |
| | Jumlah penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah setelah perubahan sejumlah | | Rp.7.254.000.000,00 |
| c. | pembayaran pokok utang sejumlah | | |
| | 1. Semula | Rp. | 9.548.576.000,00 |
| | 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan | | Rp.9.548.576.000,00 |
| d. | pemberian pinjaman daerah sejumlah | | |
| | 1. Semula | Rp. | 0,00 |
| | 2. Bertambah | <u>Rp.</u> | <u>0,00</u> |
| | Jumlah pemberian pinjaman daerah setelah perubahan | Rp | 0,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini; dan
8. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.
- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) sekurang-kurangnya memenuhi kriteria :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

Pasal 7

Bupati menetapkan peraturan sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal

BUPATI REMBANG,

H. MOCH. SALIM

Diundangkan di Rembang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG

HAMZAH FATONI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2012 NOMOR



BUPATI REMBANG

BERITA ACARA

NOMOR : 060.1510.1 2012
NOMOR : 900.12703.1 2012

PERSETUJUAN BERSAMA KEPALA DAERAH DAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

TENTANG

RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012
MENJADI PERATURAN DAERAH

Pada Hari ini *Selasa* tanggal *Delapan belas* bulan *September* Tahun *dua ribu duabelas* kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. H.MOCH.SALIM,M.Hum : Bupati Rembang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Rembang yang beralamat di jalan P. Diponegoro No 90 Rembang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. Ir. H. SUNARTO : Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
3. CATUR WINANTO,SH : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
4. H. MAJID KAMIL MZ : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang
5. SUWANTO : Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

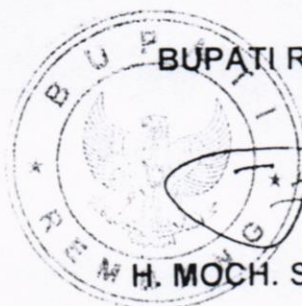
Menyatakan bahwa :

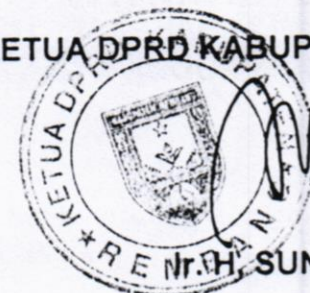
1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 menjadi Peraturan Daerah yang telah diajukan oleh **PIHAK PERTAMA** dengan penyesuaian dan perubahan sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir pada Berita Acara ini ;

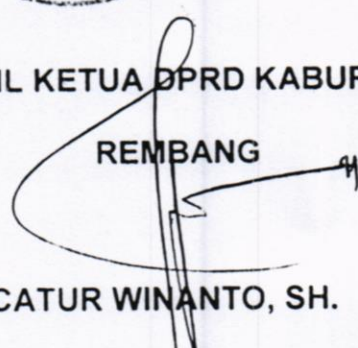
2. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapat pengesahan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah ditandatangani Persetujuan Bersama ini.

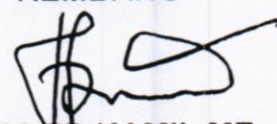
Demikian Persetujuan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam Rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

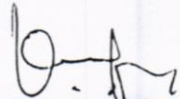
Rembang, 18 September 2012


BUPATI REMBANG
H. MOCH. SALIM, M, Hum


KETUA DPRD KABUPATEN REMBANG
N. H. SUNARTO


WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG
CATUR WINANTO, SH.


WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG
H. MAJID KAMIL MZ.


WAKIL KETUA DPRD KABUPATEN
REMBANG
SUWANTO.



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

Jl. P. Diponegoro No.88 Telp. (0295) 691194 Kode Pos 59212
REMBANG

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR : 16 TAHUN 2012

TENTANG

PERSETUJUAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan terhadap asumsi Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun Anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a maka perlu menetapkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2012 menjadi Peraturan Daerah ;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf b, perlu persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang **Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara** ;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang **Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional**;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang **Pemerintahan Daerah** sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang **Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004** tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang **Perimbangan Keuangan** antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang **Pajak Daerah dan Retribusi Daerah** ;
12. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang **Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan** ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang **Pajak Daerah**;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang **Retribusi Daerah**;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang **Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah** sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang **Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004** tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang **Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum**;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang **Standar Akuntansi Pemerintahan**;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang **Dana Perimbangan**;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang **Sistem Informasi Keuangan Daerah**;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang **Hibah Kepada Daerah**;
21. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang **Pengelolaan Keuangan Daerah**;
22. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang **Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal**;
23. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang **Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah**;
24. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang **Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah**;

25. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
27. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah ;
28. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan ;
29. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah
30. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Rembang ;
36. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang Nomor 01 Tahun 2012 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang.

Memperhatikan : 1. Laporan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Rembang pada tanggal 18 September 2012 ;
2. Pendapat Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 18 September 2012 ;
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Rembang tanggal 18 September 2012 .

MEMUTUSKAN :

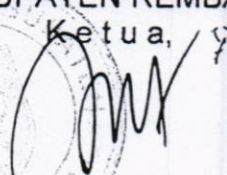
Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 beserta perubahan-perubahannya sebagaimana tersebut dalam laporan Badan Anggaran untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah sebagaimana terlampir.
- KEDUA** : Menyerahkan proses selanjutnya sebagaimana diktum **PERTAMA** Keputusan ini kepada Bupati Rembang.
- KETIGA** : Memberikan Rekomendasi kepada Bupati sebagaimana laporan Badan Anggaran untuk ditindak lanjuti .
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 18 September 2012

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REMBANG

Ketua,


Ir. H. SUNARTO



BUPATI REMBANG

**SAMBUTAN BUPATI REMBANG
PADA RAPAT PARIPURNA
PENETAPAN RAPERDA TENTANG PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012**
Rembang, 18 September 2012

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

- Ykh. - Ketua DPRD Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Para Ketua Komisi dan Anggota DPRD
Kabupaten Rembang ;
- Ykh. - Rekan-Rekan Forpimda Kab. Rembang ;
- Ykh. - ~~Wakil Bupati Rembang~~ ;
- Ykh. - Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Asisten dan
Kabag. di Lingkungan Setda Kabupaten
Rembang ;
- Ykh. - Kepala SKPD se Kab. Rembang ;
- Ykh. - Para Camat dan Hadirin sekalian yang
berbahagia.

berpengaruh terhadap tahapan penyusunan anggaran, yang di dalam proses perencanaannya harus dilandasi transparansi dan akuntabilitas, serta secara ekonomi, efisien dan efektif mampu mencerminkan pengelolaan keuangan dalam rangka memberikan fungsi pelayanan publik secara utuh.

Penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2012 ini, pada setiap program yang akan dilaksanakan nantinya dapat memberikan *output* dan *outcome* dengan kuantitas dan kualitas yang terencana dan terukur.

Hal ini merupakan implementasi dari fungsi perencanaan, fungsi koordinasi dan motivasi serta fungsi pengendalian dan evaluasi pelaksanaan strategi kinerja Pemerintah Daerah sebagai bentuk manajemen koordinasi yang baik.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa, esensi dari Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2012 adalah karena diperlukannya penyesuaian program dan kegiatan untuk peningkatan kinerja

penyelenggaraan urusan pemerintahan, dengan indikator perubahan yang memberi manfaat, perubahan yang lebih efisien dan tepat sasaran, perubahan APBD yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemberdayaan dan kemandirian masyarakat serta penyerapan anggaran yang lebih baik.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, kita bersama telah melaksanakan koordinasi dan pembahasan yang sistematis dan terencana baik pada tingkat komisi maupun Badan Anggaran, dalam rangka untuk menyamakan persepsi dan pemahaman terhadap setiap perencanaan pemerintahan dan pembangunan yang dituangkan dalam program dan kegiatan, serta besaran Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012

Rancangan Anggaran Pendapatan pada Perubahan APBD tahun 2012 sebesar Rp.1.008.342.314.800,- (*Satu trilyun delapan*

milyar tiga ratus empat puluh dua juta tiga ratus empat belas ribu delapan ratus rupiah), mengalami peningkatan sebesar 1,70% dari APBD tahun 2012 sejumlah Rp.991.500.571.500,- (Sembilan ratus sembilan puluh satu milyar lima ratus juta lima ratus tujuh puluh satu ribu lima ratus rupiah), maka terdapat kenaikan sebesar Rp.16.841.743.300,- (Enam belas milyar delapan ratus empat puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus rupiah)

Selanjutnya untuk Rancangan Perubahan Anggaran Belanja APBD Tahun 2012 sebesar Rp.1.025.002.679.043,- (Satu trilyun dua puluh lima milyar dua juta enam ratus tujuh puluh sembilan ribu empat puluh tiga rupiah) mengalami peningkatan sebesar 2,83 %, dibanding anggaran belanja APBD tahun 2012 sebesar Rp.996.746.518.462,- (Sembilan ratus sembilan puluh enam milyar tujuh ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu empat ratus enam puluh dua rupiah), maka terjadi kenaikan sebesar Rp.28.256.160.581,- (Dua puluh delapan milyar dua ratus lima puluh enam juta seratus

enam puluh ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah).

Pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2012 terdapat defisit sebesar Rp. 16.660.364.243,- (*Enam belas milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*), yang akan ditutup melalui pembiayaan daerah sebesar Rp. 16.660.364.243,- (*Enam belas milyar enam ratus enam puluh juta tiga ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah*), sehingga pada Rancangan Perubahan APBD Tahun 2012 menjadi balance.

Hadirin Sidang Dewan yang Saya hormati,

Melalui rapat Paripurna ini pula, saya atas nama Pemerintah Kabupaten Rembang mengucapkan terima kasih kepada saudara Pimpinan dan segenap Anggota Dewan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah, serta seluruh Pimpinan SKPD beserta staf yang telah bekerja keras dalam menyelesaikan penyusunan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2012 ini.

Berbagai masukan, saran, dan kritik konstruktif yang disampaikan Badan Anggaran maupun lintas Komisi DPRD baik secara kelembagaan maupun perorangan akan dijadikan bahan evaluasi untuk perbaikan kedepan.

Demikian beberapa hal yang dapat kami sampaikan dalam Rapat Paripurna Persetujuan Penetapan Raperda Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

Semoga Allah Swt. senantiasa memberikan petunjuk dan bimbingan kepada kita dalam membangun daerah dan mensejahterakan masyarakat Kabupaten Rembang. *Amin, amin, ya Robbal 'Alamin.*

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bupati Rembang



H. MOH. SALIM, M.Hum